
LAPORAN KINERJA (LAKIP) 2019



DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

KEMENTERIAN PPUPR

DAFTAR ISI

Daftar isi	i
Daftar tabel	ii
Daftar gambar	iii
Daftar Diagram.....	iv
Daftar Lampiran	v
Kata Pengantar.....	vi
Ringkasan Eksekutif.....	vii
BAB 1 . Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas dan Fungsi	3
1.3 Struktur Organisasi	10
1.4 Isu Strategis	11
BAB 2 . Perencanaan Kinerja.....	21
2.1 Uraian Singkat Renstra	21
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Strategis	24
2.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi.....	28
2.1.4 Program dan Kegiatan.....	31
2.2 Perjanjian Kinerja	33
2.3 Metode Pengukuran.....	40
2.4 Target Tahun Ini Menurut Renstra	48
BAB 3 Kapasitas Organisasi	52
3.1 Sumber Daya Manusia	52
3.2 Sarana dan Prasarana.....	57
3.3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).....	61
BAB 4 Akuntabilitas Kinerja.....	65
4.1 Capaian Kinerja Organisasi	65
4.1.1 Capaian Kinerja Sasaran Program	65
4.1.2 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan.....	66
4.1.3 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	87
4.1.4 Kegiatan Yang Menunjang	89
4.2 Perbandingan Kinerja	93
4.2.1 Perbandingan Dengan Tahun Lalu	93
4.2.2 Perbandingan Kinerja terhadap Renstra.....	95
4.2.3 Perbandingan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah.....	100
4.3 Realisasi Anggaran.....	102
4.3.1 Analisis Efisiensi Sumber Daya	102
4.4 Penghargaan.....	102
BAB 5 Penutup	104
5.1 Permasalahan	104
5.2 Rekomendasi	105

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2015-2019	x
Tabel 2. Kinerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2019	xi
Tabel 3. Sasaran Kegiatan dan Indikator Sasaran Kegiatan Ditjen Bina Konstruksi	32
Tabel 4. Persentase Pembobotan Indikator Sasaran Kegiatan	41
Tabel 5. Tabel dan Baseline Sasaran Kegiatan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	47
Tabel 6. Target Sasaran Program Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Tahun 2015-2019.....	48
Tabel 7. Target Sasaran Kegiatan Ditjen Bina Konstruksi Tahun 2015-2019	48
Tabel 8. Jumlah Pegawai Ditjen Bina Konstruksi per Unit Kerja	52
Tabel 9. Luas Tanah Bangunan Kantor Ditjen Bina Konstruksi	59
Tabel 10. Detail Aset Bangunan Milik Ditjen Bina Konstruksi.....	60
Tabel 11. Alokasi Pagu Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2019 ..	61
Tabel 12. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2019	65
Tabel 13. Komponen Indikator Sasaran Kegiatan 1 Ditjen Bina Konstruksi	67
Tabel 14. Capaian Produk Draft NSPK dan Profil Pembinaan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi	68
Tabel 15. Komponen Indikator Sasaran Kegiatan 2 Ditjen Bina Konstruksi	72
Tabel 16. Capaian Produk Draft NSPK dan Profil Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.....	73
Tabel 17. Komponen Indikator Sasaran Kegiatan 3 Ditjen Bina Konstruksi	75
Tabel 18. Capaian Produk Draft NSPK dan Profil Layanan Pembinaan Kelembagaan dan Usaha Jasa Konstruksi	75
Tabel 19. Komponen Indikator Sasaran Kegiatan 4 Ditjen Bina Konstruksi	77
Tabel 20. Capaian Produk Draft NSPK dan Profil Layanan Pembinaan Rantai Pasok dan Produksi Produk Unggulan	78
Tabel 21. Komponen Indikator Sasaran Kegiatan 5 Ditjen Bina Konstruksi	79
Tabel 22. Capaian Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi TA 2019	80
Tabel 23. Capaian Produk Draft NSPK dan Profil Layanan Kerja Sama Lembaga Pemerintah dan Masyarakat	81
Tabel 24. Penambahan Sertifikasi Ahli dan Terampil Tahun 2014-2019.....	81
Tabel 25. Komponen Indikator Sasaran Kegiatan 6 Ditjen Bina Konstruksi	82
Tabel 26. Capaian Produk Draft NSPK dan Profil Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	82
Tabel 27. Hasil Evaluasi SAKIP Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2014-2018	84
Tabel 28. Perbandingan Kinerja Sasaran Program terhadap Renstra	95
Tabel 29. Perbandingan Kinerja Sasaran Kegiatan terhadap Renstra	95
Tabel 30. Perbandingan Capaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019	100
Tabel 31. Perbandingan Capaian dengan Target RKP 2019.....	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Direktur Jenderal Bina Konstruksi	vi
Gambar 2. Peta Balai-Balai Jasa Konstruksi di Lingkungan Ditjen Bina Konstruksi	8
Gambar 3. Piagam Perjanjian Kinerja Ditjen Bina Konstruksi TA 2019.....	33
Gambar 4. Lampiran Perjanjian Kinerja Ditjen Bina Konstruksi TA 2019	34
Gambar 5. Piagam Perjanjian Kinerja Revisi Ditjen Bina Konstruksi TA 2019	35
Gambar 6. Lampiran Perjanjian Kinerja Revisi Ditjen Bina Konstruksi TA 2019	35
Gambar 7. Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	36
Gambar 8. Perjanjian Kinerja Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	37
Gambar 9. Perjanjian Kinerja Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi.....	38
Gambar 10. Perjanjian Kinerja Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	39
Gambar 11. Perjanjian Kinerja Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan	40
Gambar 12. Alur Proses Kegiatan Pengukuran dan Pendampingan Penerapan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	70

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	10
Diagram 2. Jumlah Kecelakaan Konstruksi Tahun 2015-2019	16
Diagram 3. Peta Strategis Ditjen Bina Konstruksi 2015-2019	28
Diagram 4. Metode Pengukuran Sasaran Program Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	41
Diagram 5. Komposisi Agregat Sasaran Program Ditjen Bina Konstruksi TA 2019	42
Diagram 6. Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	53
Diagram 7. Jumlah Pegawai Berdasarkan Gender	54
Diagram 8. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	54
Diagram 9. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan	55
Diagram 10. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	55
Diagram 11. Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia	56
Diagram 12. Hubungan Empat Perspektif <i>Balanced Scorecard</i>	57
Diagram 13. Pemetaan Klasifikasi Barang Milik Negara	58
Diagram 14. Komposisi Pagu Berdasarkan Jenis Belanja	63
Diagram 15. Kronologis Revisi Anggaran Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2019	63
Diagram 16. Skoring Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Per Unit Organisasi TA 2019	72
Diagram 17. Perbandingan Kinerja Sasaran Program 2018 dan 2019	94
Diagram 18. Perbandingan Kinerja Sasaran Kegiatan 2018 dan 2019	94

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1.** Perjanjian Kinerja
- Lampiran 2.** Rencana Aksi
- Lampiran 3.** Laporan Bulanan
- Lampiran 4.** Hasil Review LaKIP Tahun 2018 Ditjen Bina Konstruksi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum
- Lampiran 5.** Matriks Program dan Kegiatan Revisi Renstra Ditjen Bina Konstruksi 2015-2019
- Lampiran 6.** DIPA
- Lampiran 7.** Dokumentasi
- Lampiran 8.** Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
- Lampiran 9.** Penghargaan
- Lampiran 10.** Daftar Jumlah Paket Berkualitas Per Provinsi
- Lampiran 11.** Daftar Satker Tertib Penyelenggaraan
- Lampiran 12.** Daftar BUJK Kualifikasi B2
- Lampiran 13.** Daftar Jumlah Kapasitas Produksi Beton Pra Cetak

KATA PENGANTAR



Gambar 1. Direktur Jenderal Bina Konstruksi

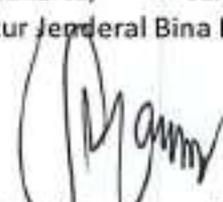
Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan “Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi tahun 2019” dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dalam melaksanakan berbagai kewajibannya secara transparan dan akuntabel.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (pengganti Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Dan dalam rangka pelaksanaan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Permen PAN & RB No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai pedoman dalam penyusunan laporan kinerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi tahun 2019.

LaKIP ini juga merupakan perwujudan kewajiban Direktorat Jenderal Bina Konstruksi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban untuk periode TA 2019.

Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan LaKIP Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2019, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Jakarta, 13 Januari 2020
Direktur Jenderal Bina Konstruksi



Dr. Ir. Syarif Burhanuddin, M.Eng
NIP 196001091989031007

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Tahun 2019 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Dalam upaya merealisasikan *good governance*, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah melaksanakan berbagai program melalui unit kerjanya untuk mencapai sasaran serta mewujudkan visi dan misi Presiden yang telah dituangkan dalam Revisi Renstra Ditjen Bina Konstruksi. Adapun visi dan misi Direktorat Jenderal Konstruksi yang selaras dengan NAWACITA antara lain: membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, dan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Hal-hal tersebut akan diwujudkan sesuai dengan Revisi Renstra Kementerian PUPR 2015-2019 terkait Bina Konstruksi yaitu: “Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran yang didukung oleh industri konstruksi yang berkualitas dan berdaya saing untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, dengan mengutamakan pembangunan bagi kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan pedesaan”.

Beberapa hal yang dapat disampaikan terkait program pembinaan konstruksi yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi adalah sebagai berikut:

A. Tujuan dan Sasaran

Dalam upaya merealisasikan *good governance*, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung program pembinaan konstruksi. Tujuan pembangunan sektor konstruksi secara umum terdapat di dalam salah satu tujuan yang tercantum pada Revisi Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu: **“Menyelenggarakan pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terpadu dan berkelanjutan yang didukung oleh industri konstruksi yang berkualitas dan berdaya saing tinggi untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antar daerah, dengan mengutamakan pembangunan bagi kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan pedesaan”**.

Sasaran yang ingin dicapai pada stakeholder/customers oleh Ditjen Bina Konstruksi, yaitu: **“Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional, untuk dapat mewujudkan meningkatnya kehandalan pelaku konstruksi infrastruktur PUPR dalam**

menwujudkan keterpaduan pembangunan antar daerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan untuk menyejahterakan masyarakat”.

B. Kinerja Sasaran

Pencapaian sasaran strategis Kementerian PUPR didukung oleh pencapaian sasaran program Ditjen Bina Konstruksi yang telah dilaksanakan selama 1 tahun ini. Adapun pencapaian **sasaran program** Ditjen Bina Konstruksi tahun 2019 adalah **“Meningkatnya Kapasitas dan Pengendalian Kualitas Konstruksi Nasional”** sebesar **95,63%** dari target 90% dengan **indikator sasaran program** yang lebih terukur yaitu **“Tingkat Pengendalian Pelaksanaan Konstruksi Nasional”**.

Dalam rangka pencapaian sasaran program tersebut, Ditjen Bina Konstruksi didukung dengan pencapaian **6 (enam) sasaran kegiatan** sesuai dengan jumlah Unit Eselon II di lingkungan Ditjen Bina Konstruksi, yaitu:

1. Pembinaan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi;
2. Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
3. Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi;
4. Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi
5. Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi; dan
6. Penyelenggaraan Pelayanan Teknis dan Administrasi Pembinaan Jasa Konstruksi.

Ketercapaian target dari sasaran program Ditjen Bina Konstruksi merupakan agregat dari seluruh kegiatan Unit Eselon II kecuali kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Teknis dan Administrasi Pembinaan Jasa Konstruksi yang telah dilaksanakan selama 1 tahun ini. Adapun pencapaian sasaran kegiatan Ditjen Bina Konstruksi adalah sebagai berikut:

1. Terhadap sasaran *Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi* telah tercapai tingkat kualitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa konstruksi sebesar 97,23% atau sebanyak 6.068 paket berkualitas dari total 6.241 paket selesai di tahun 2019;
2. Terhadap sasaran *Peningkatan Penerapan Manajemen Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Tertib Pengadaan dan Administrasi Kontrak* telah tercapai peningkatan persentase kenaikan tingkat tertib penyelenggaraan konstruksi yaitu dengan adanya 111 satker baru tertib penyelenggaraan pada TA 2019, sehingga total terdapat 339 satker dari target 313 satker (40% dari 782 satker fisik Kementerian PUPR);

3. Terhadap sasaran *Peningkatan Persentase BUJK yang Berkinerja Baik* telah tercapai jumlah BUJK berkualifikasi B2 dari 470 BUJK pada tahun 2018 meningkat menjadi 496 BUJK pada tahun 2019;
4. Terhadap sasaran *Peningkatan Persentase Utilitas Produk Unggulan* telah tercapai peningkatan persentase tingkat utilitas produk unggulan dengan kenaikan jumlah kapasitas produksi perusahaan beton pracetak dari 37 juta ton pada tahun 2018 menjadi 41,28 juta ton pada tahun 2019 atau setara dengan kenaikan 3,12% tingkat utilitas produk unggulan;
5. Terhadap sasaran *Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi* telah tercapai jumlah fasilitasi pemberdayaan jasa konstruksi pada tahun 2019 sebesar 12.976 angkatan atau setara dengan 169,36%;
6. Terhadap sasaran *Meningkatnya SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten* tercapai 331.837 orang penambahan tenaga kerja konstruksi berkompeten pada TA 2019, atau meningkat sebesar 12,05%.

Adapun rincian ketercapaian target dari sasaran program Direktorat Jenderal Bina Konstruksi per indikator sasaran kegiatan dapat dilihat pada tabel di halaman berikutnya.

Tabel 1. Capaian Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2015-2019

No.	Sasaran Kegiatan Ditjen Bina Konstruksi (Renstra Ditjen Bina Konstruksi)	Indikator Kinerja Kegiatan	2014	2015	2016	2017	2018		2019		Target Renstra 2015-2019	Capaian Renstra 2015-2019	% Progres Terhadap Target Renstra 5 Tahun	Selisih Realisasi Terhadap Target Renstra	Formulasi % Capaian 2018	Sumber	
			Baseline	Realis %	Realis %	Realisasi %	Realisasi		Target PK	Realisasi							
							Capaian	%	Capaian	%							
1	Peningkatan Investasi Infrastruktur dan Pasar Konstruksi	Tingkat Rasio Kapitalisasi Konstruksi															
	a	Peningkatan total nilai Konstruksi yang diselesaikan	509 Triliun	12.77%	12.18%	29.27%	958 Triliun	33.99%	0.0%		88%	88.21%	100.2%	0.21%		BPS, Subdit Statistik Konstruksi, 2018	
1	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi	Tingkat Kualitas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi															
	a								70.0%	97,23%	97,23%	70%	97,23%	138.90%	27.2%	$\frac{6.068 \text{ paket}}{6.241 \text{ paket}} \times 100\%$ Dit. Pengadaan Jasa Konstruksi	
2	Peningkatan Penerapan Manajemen Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Tertib Pengadaan dan Administrasi Kontrak	Persentase Kenaikan Tingkat Tertib Penyelenggaraan Konstruksi															
	a	Peningkatan tertib sistem penyelenggaraan melalui penetapan lelang	129 proyek												$\left(\frac{111}{782}\right) \times 100\%$ Jumlah Satker di Kementerian PUPR adalah 782 satker, target 4% Tertib Penyelenggaraan	Dit. Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	
	b	Peningkatan tertib administrasi kontrak melalui kesesuaian kontrak dengan peraturan															
	c	Peningkatan tertib konstruksi berkelanjutan melalui tersedianya dokumen RK3K	89 proyek	4.13%	5.94%	8.31%	86 saker	11.00%	11.0%	111 saker	14.19%	40%	43.57%	108.92%			3.57%
	d	Peningkatan tertib manajemen mutu melalui tersedianya dokumen RMP dan RMK															
		Total	218 proyek/ 0 satker														
3	Peningkatan Persentase Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) yang berkinerja baik dan Peningkatan Utilitas Produk Unggulan	Persentase Kenaikan BUJK Berkinerja Baik															
	a	Peningkatan jumlah BUJK berkualifikasi B2	139 BUJK	32.37%	25.18%	115.83%	470 BUJK	64.75%	11.0%	496 BUJK	18.71%	184%	256.83%	139.58%	72.83%	$\frac{(496 - 470) \text{ BUJK}}{139 \text{ BUJK}} \times 100\%$ LPJKN, Desember 2019	
		Persentase Kenaikan Tingkat Utilitas Produk Unggulan															
	a	Peningkatan jumlah kapasitas produksi perusahaan beton pracetak	24 juta m ³	1.06%	1.86%	4.69%	37.00 juta ton	1.88%	5.6%	41.28 juta ton	3.12%	15%	12.62%	84.11%	-2.38%	$\frac{(41,28 - 37,00) \text{ juta ton}}{136,97 \text{ juta ton}} \times 100\%$ AP3I, Desember 2019	
4	Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi															
	a	Jumlah Fasilitas Pemberdayaan Jasa Konstruksi	0	16.11%	28.48%	24.64%	5.073 Angkatan	66.21%	24.0%	12.976 Angkatan	169.36%	159%	304.79%	191.69%	145.79%	$\frac{12.976 \text{ Angkatan}}{7.662 \text{ Angkatan}} \times 100\%$ Dayanaker, Desember 2019	
5	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penyedia Jasa Konstruksi yang Kompeten	Persentase Kenaikan SDM Penyedia Jasa Konstruksi yang															
	a	Peningkatan jumlah tenaga ahli bersertifikat	68,202	6.8%	7.44%	6.75%	74,501	9.05%	4.0%	69,168	12.05%	27%	42.08%	155.83%	15.08%	$\left(\frac{331.837 \text{ orang}}{2.754.160 \text{ orang}} \times 100\%\right)$ 2.754.160 orang adalah total Skilled Labour yang diharapkan pada tahun 2019 LPJKN, Desember 2019	
	b	Peningkatan jumlah tenaga terampil bersertifikat	53,629				174,810			262,669							
		Total	121,831				249,311			331,837							

Sasaran program Ditjen Bina Konstruksi tersebut merupakan dasar untuk menjawab realisasi **sasaran strategis** yang termuat dalam Laporan Kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai “**Meningkatnya Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur PUPR Antardaerah, Antarsektor, dan Antartingkat Pemerintah**”. Adapun ketercapaian sasaran program dari Program Pembinaan Konstruksi adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Kinerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2019

Indikator Sasaran Program / Indikator Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi	% Ketercapaian Target	Bobot	% Realisasi Per Bobot	Target Renstra Kemen PUPR	Realisasi Renstra Kemen PUPR	Kinerja
Tingkat Pengendalian Pelaksanaan Konstruksi Nasional								
1 Tingkat Kualitas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi	70.00%	97,23%	138.90%	15%	15.00%	90.00%	95.63%	106.26%
2 Persentase Kenaikan Tingkat Tertib Penyelenggaraan Konstruksi	11.00%	14.19%	129.00%	15%	15.00%			
3 Persentase Kenaikan BUJK Berkinerja Baik	11.00%	18.71%	170.05%	15%	15.00%			
4 Persentase Kenaikan Tingkat Utilitas Produk Unggulan	5.55%	3.12%	56.30%	10%	5.63%			
5 Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	24.00%	169.36%	705.65%	15%	15.00%			
6 Persentase Kenaikan SDM Penyedia Jasa Konstruksi yang Kompeten	3.00%	12.05%	401.67%	30%	30.00%			

C. Kinerja Keuangan

Dalam melaksanakan tujuan dan sasaran kinerja tersebut, Ditjen Bina Konstruksi didukung oleh pendanaan pagu APBN sebesar Rp558.160.700.000,-, kemudian Ditjen Bina Konstruksi mendapat pagu tambahan untuk menutup kekurangan belanja pegawai sebesar Rp20.963.147.000,- dan mendapat pagu tambahan (insentif) sebesar Rp15.200.000.000,- yang diperuntukan belanja modal sarana dan prasarana Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) di 34 Provinsi, penyelenggaraan pendidikan vokasional sebanyak 5.000 orang serta pemeliharaan Gedung Citeureup. Maka pagu akhir Ditjen Bina Konstruksi adalah sebesar Rp594.305.997.000,- dengan capaian sebesar Rp530.375.585.000,- atau sekitar 89,24%. Jika dibandingkan dengan progres fisik yang mencapai 92,75%, maka dapat dilihat bahwa terjadi efisiensi anggaran dalam pelaksanaannya sehingga anggaran yang dikeluarkan berada di bawah pagu. Namun, pencapaian keuangan Ditjen Bina Konstruksi mengalami penurunan sebesar 9,7% dibandingkan dengan tahun lalu. Hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan dan kondisi internal Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

D. Kendala

Secara umum, hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan telah tercapai sesuai dengan rencana yang ditetapkan walau masih terdapat kendala dan permasalahan yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Rendahnya pengawasan konstruksi di lapangan terutama K3;
2. Kurangnya pengawas K3 di daerah;
3. Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan jakon di daerah karena masih belum optimalnya kinerja OPD Jakon daerah dan masa transisi LPJK berdasarkan UUK 2/2017;
4. Perubahan struktur organisasi dengan pembentukan Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi dan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi di 34 Provinsi sehingga menyebabkan penurunan progres penyerapan anggaran;
5. Target pelatihan dan sertifikasi yang besar yaitu sebanyak 26.000 pelatihan, 170.000 sertifikasi dan 21.000 sertifikasi vokasional jika dibandingkan dengan target tahun sebelumnya yaitu hanya menargetkan tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi sebesar 36.383 orang;
6. Beberapa hal yang menyebabkan pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi kurang optimal adalah sebagai berikut:
 - a. Kurangnya jumlah asesor dari LPJKP di beberapa Provinsi
 - b. Minimnya respon dari unit organisasi lain terkait program sertifikasi tenaga kerja
 - c. Mobilisasi peserta yang sulit dikarenakan beberapa lokasi kegiatan yang cukup jauh
 - d. Terdapat permasalahan penolakan sebagian asosiasi profesi untuk bergabung dalam program percepatan sertifikasi dikarenakan biaya sertifikasi yang murah
 - e. Utilisasi Mobile Training Unit (MTU) yang tidak optimal untuk sertifikasi tenaga terampil di daerah yang sulit dijangkau;
7. Kebijakan Omnibuslaw membuat beberapa NSPK seperti RPP UU Jasa Konstruksi dan Permen terkait Lembaga direviu ulang;
8. Kurangnya kapasitas dan jumlah SDM sehingga merekrut tenaga kontrak individual secara tahunan;
9. Kurang terkelolanya data dan informasi dikarenakan pengumpulan data masih belum kontinu dan terintegrasi.

E. Rekomendasi

Berdasarkan kendala dan permasalahan yang dihadapi, berikut adalah beberapa rekomendasi yang disampaikan sebagai langkah perbaikan pada tahun anggaran berikutnya:

1. Meningkatkan program yang mendukung pengawasan konstruksi di lapangan dan pemberdayaan SDM konstruksi daerah bidang K3;

2. Melakukan bimtek OPD dalam rangka pembinaan daerah bidang jasa konstruksi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
3. Pemenuhan kekurangan SDM kompeten untuk internal Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, khususnya untuk Balai P2JK (satker baru). Hal tersebut dilakukan diantaranya dengan penyusunan rencana pengembangan kapasitas staf melalui keikutsertaan pada training terkait dan transfer of knowledge secara berkala;
4. Untuk strategi peningkatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi, akan dilakukan pemetaan pola kerjasama di setiap daerah berdasarkan input dari BJKW;
5. Terkait pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi, beberapa hal yang perlu ditindak lanjuti adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan penyusunan SOP Quality Assurance untuk menjaga mutu kegiatan pelatihan dan sertifikasi di lapangan;
 - b. Pencetakan instruktur dan asesor pelatihan dan sertifikasi;
 - c. Balai Jasa Konstruksi melaksanakan fungsi pengaturan, bimbingan, dan pengawasan LPPK dan LSP di daerah;
 - d. Melakukan kerja sama dengan stakeholder dalam pengadaan alat uji;
 - e. Mengidentifikasi standar alat uji minimal jabatan kerja dasar;
 - f. Melakukan modernisasi dan digitalisasi modul;
 - g. Melakukan ratifikasi modul-modul dari stakeholder;
 - h. Menyusun pedoman inpassing Master Asesor untuk mencetak asesor-asesor yang kompeten;
 - i. Melakukan pengkajian ulang sistem pinjam pakai Mobile Training Unit (MTU) di Pemerintah Provinsi terkait pemanfaatan dan masa akhir pinjam MTU
 - j. Pemindahan biaya operasional dan pengelolaan MTU dari Balai MPK ke Balai Jasa Konstruksi;
 - k. Menyusun SOP mengenai tata kelola MTU;
6. Melakukan review kembali terhadap peraturan perundang-undangan bidang Jasa Konstruksi dan rancangan peraturan yang sedang disusun agar dapat selaras dengan substansi UU Omnibus Law;
7. Mengembangkan sistem data dan informasi eksisting agar data yang sudah terkumpul dapat terintegrasi dan terolah serta dijadikan informasi dalam pengambilan kebijakan.

Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Ditjen Bina Konstruksi Tahun ini, diharapkan menjadi suatu bahan perbaikan dalam perencanaan kegiatan dan langkah Ditjen Bina Konstruksi dalam mencapai tujuan dan sasaran pada Renstra Direktorat Jenderal Bina Konstruksi tahun 2020-2024.

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (pengganti Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja, perjanjian kinerja dan rencana tindak yang merupakan bagian dari komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP). Adapun sistem kinerja dibangun dan dikembangkan bagi penyelenggara manajemen kinerja melalui upaya: merencanakan, melaksanakan, mengukur dan mengevaluasi kinerja. Hal ini bertujuan untuk perbaikan kinerja secara berkesinambungan guna mendukung pencapaian tujuan dalam kerangka pemenuhan visi dan misi presiden.

Selain itu, berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP, maka diperlukan adanya evaluasi atas implementasi SAKIP yang salah satu komponen pentingnya adalah informasi evaluasi terkait tingkat kemajuan/perkembangan (progres). Dalam hal ini, Ditjen Bina Konstruksi melakukan monitoring dan evaluasi secara bulanan guna membantu pengawasan agar kegiatan tetap berada dalam alurnya. Berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR terhadap LaKIP Ditjen Bina Konstruksi TA 2018, nilai LaKIP Ditjen Bina Konstruksi adalah 78,54 dengan interpretasi nilai BB (Sangat Baik). Nilai tersebut mengalami penurunan dari hasil penilaian dan evaluasi Laporan Kinerja Ditjen Bina Konstruksi TA 2017, serta masih terdapat beberapa hal pokok yang memerlukan perhatian, yaitu:

A. Perencanaan Kinerja

1. Ukuran keberhasilan tujuan, sasaran dan indikator kinerja sasaran (*outcome* dan *output*) agar direviu kembali mengacu pada Permen PAN dan RB No.PER/20/M.PAN/11/2008;
2. Menyusun SOP tentang mekanisme monitoring Renstra secara periodic dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil monitoring Target Jangka Menengah;

3. Menerapkan *reward* dan *punishment* pada monitoring rencana kinerja dan memasukkan hal terkait dengan otorisasi dan eksekusi pelaksanaan atau penundaan kegiatan pada Pemanfaatan Rencana Aksi atas kinerja;
4. Melakukan Monitoring dan Evaluasi bulanan dan melaporkan hasilnya sesuai dengan target kinerja Rencana Aksi.

B. Pengukuran Kinerja

1. Menyusun SOP pengumpulan data kinerja yang mengatur penanggung jawab, waktu delivery dan mekanisme yang jelas jika terjadi kesalahan data;
2. Menggunakan capaian Indikator Kinerja Sasaran sebagai dasar promosi atau kenaikan/penurunan peringkat dasar insentif atau disinsentif terkait *reward* dan *punishment*;
3. Mendokumentasikan dan memonitoring target kinerja secara terencana dan terjadwal dan dilengkapi dengan SOP atau mekanisme yang jelas;
4. Melaksanakan hasil rekomendasi pengukuran Rencana Aksi yang telah dilaksanakan.

C. Pelaporan Kinerja

1. Menjadi perhatian agar dalam penyusunan Laporan Kinerja tahun berikutnya memuat penjelasan alur mulai dari input-proses-output dan outcome, menyajikan analisis terkait efisiensi yang telah dilakukan serta menyajikan informasi capaian kinerja, terkait dengan:
 - a. Realisasi sampai dengan tahun berjalan dibandingkan dengan target jangka menengah;
 - b. Realisasi atau capaian tahun berjalan dibandingkan dengan standar nasional atau RPJMN;
 - c. Realisasi atau capaian organisasi/instansi dibandingkan realisasi atau capaian organisasi/instansi sejenis;
2. Dalam penyusunan Laporan Kinerja agar menyajikan informasi capaian kinerja yang terkait;
3. Menjadikan informasi dalam Laporan Kinerja sebagai perbaikan perencanaan (perencanaan jangka menengah, tahunan maupun dalam penetapan atau perjanjian kinerja yang disusun); perbaikan dalam pengelolaan program dan kegiatan; perbaikan capaian kinerja organisasi yang lebih baik periode berikutnya;

4. Menggunakan Laporan Kinerja sebagai dasar informasi dalam perbaikan perencanaan, baik perencanaan jangka menengah, tahunan maupun dalam penetapan atau perjanjian kinerja yang disusun.

D. Evaluasi Kinerja

1. Melakukan evaluasi dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi, dimana kriteria hasil evaluasi antara lain adalah:
 - a. Terdapat informasi tentang capaian hasil-hasil rencana atau agenda;
 - b. Terdapat simpulan keberhasilan atau ketidakberhasilan rencana atau agenda;
 - c. Terdapat analisis dan simpulan tentang kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakannya suatu rencana atau agenda;
 - d. Terdapat ukuran yang memadai tentang keberhasilan rencana atau agenda.
2. Mendokumentasikan kegiatan yang dilaksanakan sebagai hasil perbaikan sesuai rekomendasi evaluasi Rencana Aksi termasuk hasil supervisi terhadap hasil evaluasi.

E. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

1. Agar berinisiatif dalam pemberantasan korupsi yaitu dengan upaya pembentukan zona bebas korupsi;
2. Menindaklanjuti sistem manajemen kinerja dengan pemberian insentif/merit kepada pegawai.

Dalam rangka memperbaiki kekurangan yang terjadi pada tahun sebelumnya, maka disusunlah Perjanjian Kinerja TA 2019, Rencana Aksi, Laporan Monev Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) TA 2019 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah diamanahkan kepada Ditjen Bina Konstruksi.

1.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian PUPR, Ditjen Bina Konstruksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Ditjen Bina Konstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Ditjen Bina Konstruksi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan penyelenggaraan, kelembagaan, dan sumber daya jasa konstruksi;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyelenggaraan, kelembagaan, dan sumber daya jasa konstruksi;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah daerah;
4. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan jasa konstruksi;
5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan penyelenggaraan, kelembagaan, dan sumber daya jasa konstruksi;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan penyelenggaraan, kelembagaan, dan sumber daya jasa konstruksi;
7. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Berdasarkan Permen PUPR Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR, Ditjen Bina Konstruksi terdiri atas 6 unit eselon II. Adapun tugas dan fungsi masing-masing Unit Eselon II di lingkungan Ditjen Bina Konstruksi adalah sebagai berikut:

A. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan dan strategi, program jangka menengah, dan rencana kerja dan anggaran, serta evaluasi dan laporan kinerja pembinaan penyelenggaraan, kelembagaan, dan sumber daya konstruksi;
- b. Pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana;
- c. Pengelolaan urusan administrasi keuangan, tata usaha, dan rumah tangga serta pengelolaan barang milik Negara Jenderal; dan
- d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum dan pertimbangan hukum, pengolahan data serta penyelenggaraan komunikasi publik Direktorat Jenderal.

B. Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi

Direktorat Bina Pengadaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengadaan barang/jasa

konstruksi di Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengadaan barang/jasa, system pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengadaan barang/jasa, system pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi, dan advokasi dan fasilitasi pengelolaan pengadaan jasa konstruksi;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa, sistem pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi, dan adzokasi dan fasilitasi pengelolaan pengadaan jasa konstruksi;
- d. Advokasi dan fasilitasi pengelolaan pengadaan jasa konstruksi;
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan pengadaan barang/jasa, sistem pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi, dan advokasi dan fasilitasi pengelolaan pengadaan jasa konstruksi;
- f. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyelenggaraan pengadaan barang/jasa, sistem pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi, dan advokasi dan fasilitasi pengelolaan pengadaan jasa konstruksi; dan
- g. Pelaksanaan urutan tata usaha Dirketorat.

C. Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jasa konstruksi. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang sistem penyelenggaraan jasa konstruksi, kontrak konstruksi, konstruksi berkelanjutan, dan manajemen mutu;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang sistem penyelenggaraan jasa konstruksi, kontrak konstruksi, konstruksi berkelanjutan, dan manajemen mutu;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sistem penyelenggaraan jasa konstruksi, kontrak konstruksi, konstruksi berkelanjutan, dan manajemen mutu;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sistem penyelenggaraan jasa konstruksi, kontrak konstruksi, konstruksi berkelanjutan, dan manajemen mutu;

- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang sistem penyelenggaraan jasa konstruksi, kontrak konstruksi, konstruksi berkelanjutan, dan manajemen mutu; dan
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

D. Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi

Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kelembagaan dan sumber daya jasa konstruksi. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan kelembagaan dan pembinaan perijinan, rantai pasok material dan peralatan konstruksi, teknologi konstruksi dan produksi dalam negeri, serta usaha jasa konstruksi;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kelembagaan dan pembinaan perijinan, rantai pasok material dan peralatan konstruksi, teknologi konstruksi dan produksi dalam negeri, serta usaha jasa konstruksi;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan kelembagaan dan pembinaan perijinan, rantai pasok material dan peralatan konstruksi, teknologi konstruksi dan produksi dalam negeri, serta usaha jasa konstruksi;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan kelembagaan dan pembinaan perijinan, rantai pasok material dan peralatan konstruksi, teknologi konstruksi dan produksi dalam negeri, serta usaha jasa konstruksi;
- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kelembagaan dan pembinaan perijinan, rantai pasok material dan peralatan, teknologi konstruksi dan produksi dalam negeri, serta usaha jasa konstruksi; dan
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

E. Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi

Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kompetensi dan produktivitas konstruksi. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang standar, penerapan, pengembangan kompetensi profesi jasa konstruksi, dan produktivitas konstruksi;

- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang standar, penerapan, pengembangan kompetensi profesi jasa konstruksi, dan produktivitas konstruksi;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standar, penerapan, pengembangan kompetensi profesi jasa konstruksi, dan produktivitas konstruksi;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standar, penerapan, pengembangan kompetensi profesi jasa konstruksi, dan produktivitas konstruksi;
- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang standar, penerapan, pengembangan kompetensi profesi jasa konstruksi, dan produktivitas konstruksi; dan
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

F. Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan

Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan penyelenggaraan jasa konstruksi. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang kerja sama dan pemberdayaan penyelenggaraan jasa konstruksi;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama dan pemberdayaan penyelenggaraan jasa konstruksi;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kerja sama dan pemberdayaan penyelenggaraan jasa konstruksi;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kerja sama dan pemberdayaan penyelenggaraan jasa konstruksi;
- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kerja sama dan pemberdayaan penyelenggaraan jasa konstruksi; dan
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Selain Unit Eselon II, berdasarkan Permen PUPR Nomor 5 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PUPR, terdapat beberapa UPT dibawah koordinasi Ditjen Bina Konstruksi, antara lain sebagai berikut:

A. Balai Jasa Konstruksi

Balai Jasa Konstruksi berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi. Balai Jasa Konstruksi mempunyai tugas melakukan pemberdayaan dan

- b. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan kerjasama peningkatan penerapan teknologi konstruksi;
- c. Pengelolaan informasi teknologi konstruksi;
- d. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan penyebarluasan materi penerapan teknologi konstruksi;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penerapan teknologi konstruksi; dan
- f. Penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, pelayanan sarana dan prasarana serta urusan rumah tangga Balai.

C. Balai Material dan Peralatan Konstruksi

Balai Material dan Peralatan Konstruksi berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi. Balai Material dan Peralatan Konstruksi mempunyai tugas melakukan peningkatan pendayagunaan material dan peralatan konstruksi. Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Material dan Peralatan Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja bidang peningkatan pendayagunaan material dan peralatan konstruksi;
- b. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama bidang pendayagunaan material dan peralatan konstruksi;
- c. Pengelolaan data dan aset bidang material dan peralatan konstruksi;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan peningkatan pendayagunaan material dan peralatan konstruksi; dan
- e. Penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pelayanan sarana dan prasarana serta urusan rumah tangga Balai.

D. Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi

Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi. Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa konstruksi dan tugas lainnya di bidang pengadaan barang/jasa konstruksi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi. Dalam melakukan tugas, BP2JK menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengelolaan pengadaan barang/jasa

- b. Pelaksanaan pendampingan, konsultasi proses pengadaan, konsultasi sistem informasi, konsultasi substansi hukum, dan/atau bimbingan teknis di wilayahnya; dan
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi.

1.3 Struktur Organisasi

Dengan terbitnya Permen PUPR Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR dan Permen PUPR Nomor 5 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PUPR, terjadi perubahan struktur organisasi di dalam Ditjen Bina Konstruksi, yaitu pemindahan tugas dan fungsi direktorat bina investasi infrastruktur ke Ditjen Pembiayaan Perumahan, pembentukan unit eselon II Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, dan pembentukan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi di 34 Provinsi di Indonesia untuk menggantikan Unit Layanan Pengadaan (ULP). Sehingga struktur organisasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menjadi sebagai berikut:

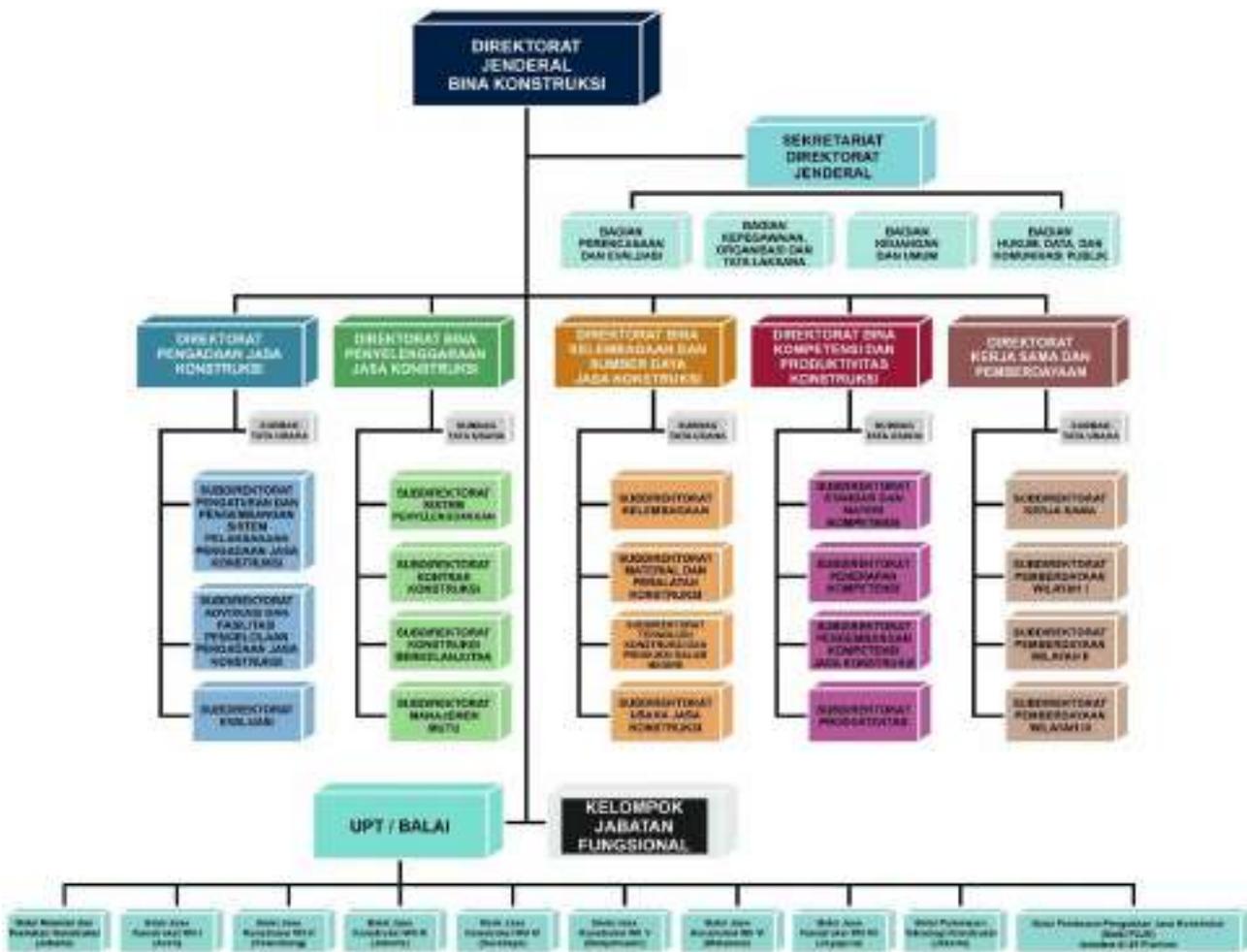


Diagram 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

Sumber: Website Ditjen Bina Konstruksi

1.4 Isu Strategis

Ditjen Bina Konstruksi bersifat strategis serta lebih menuju ke arah perumusan kebijakan dan standardisasi teknis. Harapan masyarakat konstruksi yang besar terhadap Ditjen Bina Konstruksi dalam melakukan pembinaan tidak hanya pada lingkup PUPR melainkan pada keseluruhan dunia konstruksi Indonesia sehingga memberi konsekuensi tanggung jawab yang besar pula khususnya terhadap pencapaian target organisasi.

Isu strategis Ditjen Bina Konstruksi yang saat ini diperhatikan/dikedepankan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi antara lain sebagai berikut:

a. Tenaga Kerja Konstruksi dan Badan Usaha Jasa Konstruksi (*Man*)

SDM Jasa Konstruksi pada tahun 2014 berjumlah lebih kurang 6,9 juta pekerja, di mana dari total tenaga kerja tersebut, kurang dari 10% yang telah disertifikasi. Kondisi tersebut tentu belum memadai bila dibandingkan dengan peningkatan jumlah pekerjaan proyek konstruksi yang akan dilaksanakan pada periode 2015 – 2019. Sementara dengan akan diberlakukannya kesepakatan MEA pada tahun 2015, kualitas SDM Jasa Konstruksi perlu terus ditingkatkan agar dapat bersaing dengan tenaga kerja asing. Di sisi lain peningkatan daya saing SDM konstruksi akan berpengaruh terhadap peningkatan daya saing perusahaan, BUIK akan menjadi semakin kredibel untuk mengerjakan proyek infrastruktur karena tenaga kerjanya telah terjamin kualitasnya.

Berdasarkan data LPJKN, secara nasional jumlah tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat hingga tahun 2018 adalah 616 ribu orang atau hanya 7,6% dari total Tenaga Kerja Konstruksi sebanyak 8,3 juta jiwa (BPS, 2018). Secara rinci jumlah tenaga kerja yang tersertifikasi itu terdiri dari 419 ribu tenaga kerja terampil dan 197 ribu tenaga kerja ahli.

Melihat kondisi tersebut maka tantangan terbesar pembinaan SDM adalah melatih tenaga tidak terampil yang merupakan porsi paling besar dari profil angkatan kerja di sektor konstruksi, di samping peningkatan kualitas materi dan penyelenggaraan pelatihan serta penyederhanaan dan kemudahan di dalam proses sertifikasi yang harus mengikuti dinamika perubahan lingkungan strategis. Pada tahun 2019 Kementerian melaksanakan percepatan program sertifikasi bagi tenaga kerja konstruksi Indonesia. Program pelatihan dan sertifikasi diselenggarakan bekerjasama dengan berbagai pihak mulai dari perguruan tinggi, asosiasi perusahaan konstruksi, BUMN konstruksi, dan juga Lembaga Pemasarakatan (Lapas).

Selain permasalahan Tenaga Kerja Konstruksi, dari segi Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK), jumlah BUJK spesialis sebanyak 5.943 unit jumlah ini lebih sedikit dibandingkan dengan BUJK generalis dengan jumlah sebanyak 12.448 unit atau berdasarkan rasio kondisi BUJK Indonesia 0,047% lebih rendah jika dibandingkan dengan negawa Kuwait, China, Inggris dan USA. Sampai dengan tahun 2019 jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) perwakilan yang beroperasi di Indonesia mencapai 223 BUJKA, dengan 193 diantaranya adalah BUJKA kontraktor dan 30 BUJKA konsultan. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan daya tarik atas peningkatan pasar konstruksi di Indonesia, di samping terbukanya peluang yang semakin besar dengan adanya kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang dimulai pada tahun 2015. Melihat kondisi tersebut, maka BUJK Nasional harus meningkatkan daya saing agar mampu menguasai pangsa pasar konstruksi di dalam negeri, antara lain dengan melakukan pengembangan BUJK agar memiliki kualifikasi yang setara dalam persaingan pasar

b. *Supply and Demand* Material dan Peralatan Konstruksi (*Machine and Material*)

Kondisi saat ini, belum memadainya informasi tentang *supply and demand* alat berat baik dari sisi jumlah maupun sebarannya. Dari total 70.000 alat berat utama yang beredar, hanya sebanyak 28.000 alat berat utama atau sebesar 40% yang telah teregistrasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sehingga masih banyaknya kebutuhan jenis alat berat dipenuhi oleh import. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Pemerintah perlu mendorong investasi industri alat berat dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan jenis alat berat, dan bekerjasama dengan asosiasi untuk menyusun data statistik pasokan alat berat secara nasional per jenis alat berat (kapasitas produksi, jumlah produksi, dan jumlah penjualan).

Sedangkan bahan dan material konstruksi saat ini masih memiliki kelemahan di dalam manajemen rantai pasok, antara lain belum adanya database dan informasi yang memadai perihal pasokan dan permintaan (*supply and demand*), kurangnya optimalnya utilisasi produksi MPK dalam negeri. Kedepannya kita perlu mendorong prioritas penggunaan produk-produk MPK yang diproduksi dalam negeri pada setiap pekerjaan konstruksi, menyiapkan regulasi pelaksanaan registrasi MPK, serta menyiapkan sebuah sistem registrasi MPK dan perhitungan demand MPK.

c. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (*Methodology*)

Dalam penyelenggaraan konstruksi secara umum masih dijumpai permasalahan, antara lain: para penyelenggara proyek konstruksi belum banyak memahami urutan proses penyelenggaraan proyek yang benar; proses pengadaan (procurement) yang masih rumit; terjadinya kegagalan konstruksi yang disebabkan oleh berbagai faktor: terjadinya sengketa konstruksi, serta adanya hasil pekerjaan yang tidak sesuai dan perubahan pada lingkup pekerjaan. Keseluruhan proses di atas yang paling utama sebetulnya terkait dengan penerapan standar mutu produk, terlebih dalam menghadapi persaingan global, penerapan standar mutu produk ini menjadi sebuah keharusan.

Selama tahun 2017-2018, terjadi kecelakaan konstruksi sebanyak 17 kasus yang disebabkan oleh kurangnya pengawasan tertib penyelenggaraan konstruksi.

d. Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi

Sejak tahun 2015 hingga saat ini, Kementerian PUPR telah menerapkan proses pengadaan barang dan jasa lebih awal (lelang dini) sebagai wujud komitmen kepada masyarakat bahwa Kementerian PUPR bekerja lebih cepat. Dengan lelang dini, diharapkan infrastruktur dapat terbangun lebih cepat dan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat, serta memacu pertumbuhan ekonomi sejak awal tahun. Selama ini pelelangan baru dilakukan pada awal tahun anggaran berjalan dengan proses hingga 4 (empat) bulan sehingga pekerjaan baru efektif mendekati tengah tahun anggaran. Dengan adanya proses lelang dini dan readiness criteria (pembebasan lahan, kematangan lokasi, DED, Feasibility Study, dokumen AMDAL, dll) telah disiapkan di tahun anggaran sebelumnya, diharapkan pekerjaan sudah dapat dimulai di awal tahun anggaran berjalan dan percepatan anggaran dapat segera dilakukan.

Selain itu, dalam rangka penguatan layanan PBJ di Kementerian PUPR, Peraturan Menteri PUPR Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengakibatkan perubahan fungsi Unit Layanan Pengadaan yang selama ini melekat pada unit kerja Biro Pengelolaan Barang Milik Negara menjadi bagian unit kerja pada Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Langkah tersebut merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh Kementerian PUPR dalam melaksanakan Reformasi Organisasi Pengadaan Jasa Konstruksi dengan membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) yakni Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi. Selain itu ditetapkannya Peraturan Menteri PUPR Nomor 05/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit

Pelaksana Teknis Kementerian PUPR, dibentuk 34 (tiga puluh empat) Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi sehingga diharapkan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang selama ini dilakukan proses seleksinya pada masing-masing unit organisasi dapat dialihkan tanggung jawabnya pada Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang Jasa (UPTPB).

Pembentukan Balai P2JK sebagai unit kerja yang lebih independen di setiap provinsi yang akan melaksanakan PBJ seluruh pekerjaan di Kementerian PUPR merupakan langkah Kementerian PUPR dalam mengimplementasikan 9 strategi pencegahan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. Strategi itu yaitu:

1. Reorganisasi struktur organisasi ULP dan Pokja PBJ;
2. Memperkuat sumber daya manusia;
3. Memperbaiki mekanisme penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
4. Pembinaan penyediaan jasa baik kontraktor maupun konsultan;
5. Pemeriksaan hasil pekerjaan yang melibatkan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP);
6. Mengurangi risiko di unit organisasi (Unor), balai dan satuan kerja;
7. Pembentukan unit kepatuhan internal;
8. Pembentukan inspektorat bidang investigasi dan penguatan kapasitas auditor; dan
9. *Continuous monitoring* atas perangkat pencegahan kecurangan dengan teknologi informasi.

Dengan adanya pembentukan Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi dan Balai P2JK di 34 provinsi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi diharap dapat menjadi sebuah pusat keunggulan (*center of excellence*) yang memegang prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel dalam pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa (PBJ) di Kementerian PUPR.

e. Dukungan Kegiatan Komite K2

Sebagai upaya mencapai *zero accident* pada proyek konstruksi, Pemerintah pada Januari 2018 telah membentuk Komite Keselamatan Konstruksi (Komite K2) yang bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi potensi bahaya tinggi, investigasi kecelakaan konstruksi, dan memberikan rekomendasi kepada Menteri PUPR.

Pada tahun 2019, Komite Keselamatan Konstruksi telah melakukan investigasi kecelakaan konstruksi terhadap beberapa kasus kecelakaan konstruksi, melakukan

kunjungan lapangan ke beberapa tempat dan melakukan Pembahasan Metode Pelaksanaan Pekerjaan, diantaranya:

1. Runtuhnya Dinding Penahan Tanah (DPT) Pada Pembangunan Mix-Use Development Milik PT. Saputra Karya dan Kelongsoran Jalan Raya Gubeng di Surabaya;
2. Kecelakaan Konstruksi Runtuhnya Jembatan Gantung Banjarsari II di Kabupaten Pacitan;
3. Terjatuhnya Pekerja Pada Saat Pemasangan Kubah Masjid di Proyek Masjid Al Jabbar di Gedebage, Bandung;
4. Jatuhnya Steel I-Girder Saat Mobilisasi Pada Proyek Jalan Tol Jakarta Cikampek II Elevated;
5. Jatuhnya Besi Siku Pada Proyek Pembangunan Tol Ruas Cimanggis – Cibitung;
6. Investigasi Awal Runtuhnya Formwork Pierhead Pada Proyek Pembangunan Tol Bogor Ring Road (BORR) Tahap 2 Seksi 3a;
7. Terbakarnya Wisma Penginapan Milik Kementerian PUPR di Balai Produksi Informasi Audio Visual (BPIAV);
8. Tergulingnya G'roer Saat Pengangkutan Pada Proyek Jalan Tol Cisumdawu (Cileunyi - Sumedang - Dawuan) Seksi 3;
9. Putusnya Sling Crawler Crane pada Proyek Pembangunan Tol BORR Tahap 2 Seksi 3A;
10. Keruntuhan Dinding Penahan Tanah pada Proyek Pembangunan Pengaman Pantai Tahap 3 Paket 2;
11. Runtuhnya Jembatan Lengkung Utan Kota Kemayoran.

Selain itu, Komite Keselamatan Konstruksi (Komite K2) ditugaskan untuk melakukan pengecekan bangunan gedung bertingkat di Provinsi DKI Jakarta yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi para penghuni dan masyarakat melalui pemeriksaan kelaikan pengelolaan bangunan gedung. Pemeriksaan juga merupakan tindak lanjut hasil evaluasi beberapa peristiwa kegagalan bangunan dan kegagalan pengelolaan bangunan seperti runtuhnya selasar di Gedung Bursa Efek Indonesia, kebakaran Gedung Kementerian Perhubungan dan Mall Taman Anggrek akibat kebocoran gas.

Berikut terdapat grafik jumlah kecelakaan konstruksi yang terjadi selama tahun 2015-2019:

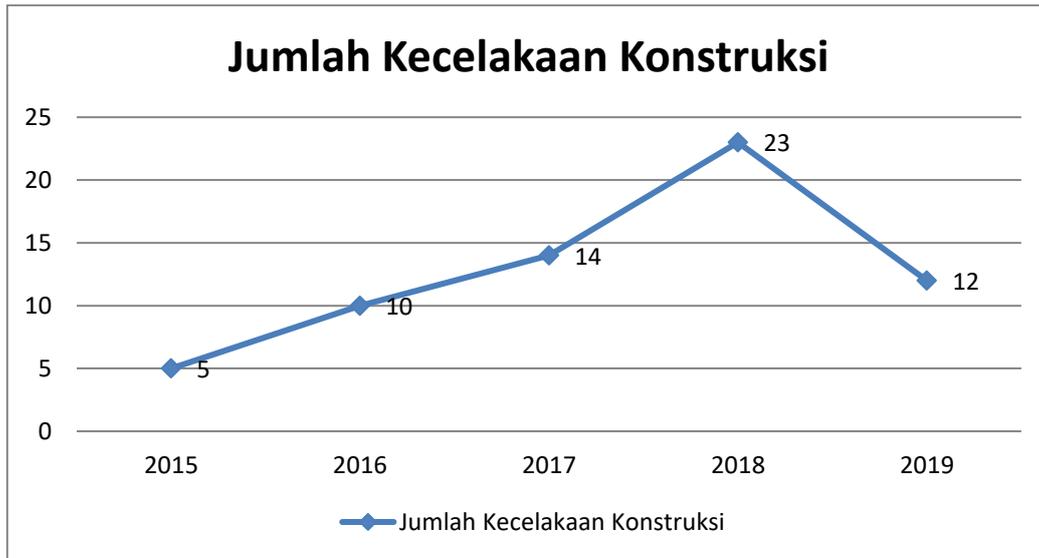


Diagram 2. Jumlah Kecelakaan Konstruksi Tahun 2015-2019

Sumber: Direktorat Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, 2019

Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa jumlah kecelakaan kerja pada tahun 2015-2018 mengalami peningkatan sampai 45%, namun pada tahun 2019 angka kecelakaan konstruksi mengalami penurunan. Penurunan angka kecelakaan konstruksi pada tahun 2019 dapat menjadi indikasi bahwa pelaksanaan Komite Keselamatan Konstruksi (Komite K2) berdampak positif dalam meningkatkan keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi para penghuni dan masyarakat.

f. Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi

Upaya dalam melakukan percepatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi Indonesia tahun 2019 yaitu dengan menjalin kolaborasi baik dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional/Provinsi, asosiasi kontraktor dan konsultan, BUMN, perusahaan kontraktor dan konsultan, dan institusi pendidikan (SMK, Poltek, dan Universitas). Selain itu, upaya Kementerian PUPR mendorong tenaga kerja konstruksi memiliki sertifikat keahlian merupakan bagian dari melaksanakan fokus Pemerintah untuk membangun Sumber Daya Manusia Indonesia yang berdaya saing.

Dalam rangka percepatan sertifikasi di 2019, LPJKN sebagai lembaga sertifikasi menerbitkan Surat Edaran 02/SE/LPJK-N/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Kompetensi dan Registrasi Tenaga Kerja Konstruksi Tingkat Ahli Muda dan Surat Edaran 03/SE/LPJK-N/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Kompetensi dan Registrasi Tenaga Kerja Konstruksi Tingkat Terampil. Di dalam surat tersebut, diatur persyaratan uji yang masuk dalam program percepatan, sehingga proses uji menjadi lebih singkat dan dengan

biaya yang lebih murah daripada program regular. Persyaratan uji meliputi program uji kerjasama dengan stakeholder mana saja yang bisa diproses ke program percepatan sertifikasi (SIBIMA, vokasi, sertifikasi kerjasama Kementerian PUPR dengan K/L/Lembaga non Profit), syarat dokumen, standar proses sertifikasi dan biayanya. Diharapkan program ini dapat meningkatkan kualitas sekaligus kuantitas sumber daya manusia jasa konstruksi di 2019.

Selain itu Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menjalin kerjasama dengan Kementerian dan Lembaga lain dalam sertifikasi pekerja konstruksi. Setelah di tahun sebelumnya (2018) melakukan penandatanganan MoU kerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM (warga binaan lapas) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (lulusan SMK), kerja sama terbentuk dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di tahun 2019. Dengan Kemendagri, kerja sama melingkupi pemanfaatan data nomor induk kependudukan (NIK), data kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) untuk dapat terhubung dengan database sertifikasi dengan LPJKN dan Sekretariat Ditjen Bina Konstruksi. Sedangkan dengan Kemenristekdikti, telah dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) tentang Peningkatan Kompetensi Bidang Jasa Konstruksi di Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Akademik dan membuat program 6.000 lowongan magang di sektor konstruksi bagi mahasiswa.

Kerjasama lain dilaksanakan di lapangan adalah dalam bentuk *cost sharing* penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi. *Cost sharing* dapat berupa penyediaan biaya instruktur, biaya bahan uji, biaya sertifikasi, biaya APD, hingga biaya sewa tempat kegiatan. Tercatat hingga Desember 2019, sebagian besar kegiatan pelatihan dan uji sertifikasi yang diselenggarakan balai-balai telah menggunakan pola *cost sharing* dengan stakeholder sebesar 67%, meningkat 3% dari tahun sebelumnya, sedangkan sisanya dengan dana tunggal (APBN).

g. Pengembangan Sistem Informasi MPK (SIMPk)

Dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur nasional yang dirancang oleh pemerintah, dukungan sumber daya konstruksi yang memadai sangat diperlukan demi kelancaran pelaksanaan program secara efektif dan efisien. Salah satu yang diperlukan adalah dukungan data material dan peralatan konstruksi. Sejalan dengan hal tersebut, salah satu aspek bidang konstruksi yang juga menjadi perhatian pemerintah saat ini adalah ketidakpastian informasi mengenai material dan peralatan konstruksi yang akurat dan

komprehensif. Selama ini data dan analisis terkait kebutuhan (*demand*) dan ketersediaan (*supply*) material dan peralatan konstruksi juga belum dapat disampaikan. Informasi jumlah kebutuhan dan pasokan material dan peralatan konstruksi masih belum termuat sepenuhnya dalam database, khususnya belum tersedia wadah yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat pengguna jasa konstruksi.

Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi dalam pelaksanaannya menggagas sebuah sistem informasi Material dan Peralatan Konstruksi yang bernama Aplikasi Material dan Peralatan Konstruksi (SiMPK) yang bertujuan untuk meningkatkan layanan informasi material dan peralatan konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. SiMPK diharapkan dapat menjadi portal informasi bagi para pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan material dan peralatan konstruksi di suatu daerah. Selain itu, SiMPK diharapkan dapat mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk terus memberikan data dan informasi, serta meningkatkan kemampuan industri konstruksi dalam memenuhi kebutuhan pekerjaan konstruksi di Indonesia.

Pengembangan Aplikasi Material dan Peralatan Konstruksi dilakukan secara bertahap dengan dibagi menjadi 3 (tiga) fitur utama, yaitu: Fitur Informasi Material dan Peralatan Konstruksi (MPK), Fitur Registrasi Alat Berat Konstruksi dan Fitur Supply-Demand Material dan Peralatan Konstruksi (MPK). Selain 3 (tiga) fitur utama tersebut, SiMPK juga dilengkapi dengan fitur pendukung lainnya seperti: Fitur Publikasi, Fitur Agenda dan Fitur Galeri.

h. Kebijakan Omnibus Law

Omnibus Law mulai dibicarakan setelah pidato pertama Presiden usai dilantik. Pemerintah merencanakan, Omnibus Law akan terdiri atas dua Undang-Undang (UU) besar, yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Perpajakan. Akibat kebijakan Omnibus Law, terdapat beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang dihapus yaitu Perizinan dan Pengadaan. Selain itu, syarat Permen yang diterbitkan oleh Kementerian PUPR adalah yang bersifat mengatur internal Kementerian PUPR dan bersifat pelayanan. Sedangkan Permen yang bersifat pengaturan eksternal akan dihapuskan dan diatur ke dalam Peraturan Pemerintah.

Permasalahan yang berpotensi muncul akibat kebijakan Omnibus Law adalah:

1. Permen tentang *Design & Build* yang sedang disusun bersifat eksternal, sehingga harus diselesaikan dalam waktu dekat; dan

2. Permen tentang kelembagaan masyarakat bersifat mengatur eksternal. Jika tidak segera diselesaikan akan mengakibatkan proses transisi LPJK tertunda.
3. Berdasarkan UU No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, terdapat sebanyak 28 pasal yang terdampak Omnibus Law.

Beberapa Permen amanat Undang-Undang Jasa Konstruksi yang telah terbit:

1. Permen PUPR No. 19/PRT/M/2017 tentang Standar Remunerasi Minimal TKK pada Jenjang Jabatan Ahli;
 2. Permen PUPR No.8/PRT/M/2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan UJK Nasional; dan
 3. Permen PUPR Nomor. 9/PRT/M/2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan BUJKA telah dicabut dengan terbitnya Permen PUPR No.17/PRT/M/2019.
- i. Kerja Sama dengan Stakeholder untuk Link and Match

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melakukan kerja sama dengan pihak luar yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia bidang konstruksi. Kegiatan kerja sama yang telah dilakukan dengan pihak luar dapat berupa Nota Kesepakatan (MoU) atau dalam bentuk kolaborasi pelaksanaan kegiatan. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi bersama dengan Kementerian Riset dan Teknologi telah menandatangani Nota Kesepakatan (MoU) terkait dengan kerja sama mahasiswa program vokasi. Kegiatan kerjasama melalui program vokasi dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada mahasiswa yang berkeinginan untuk menggali dan mengembangkan potensi dirinya untuk memperoleh keahlian dan kompetensi, sehingga diharapkan kedepannya dapat mencetak individu kompeten yang mampu bersaing di dunia kerja

Bidang konstruksi adalah salah satu prioritas pembangunan nasional yang diyakini akan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan meluncurkan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) dan Sertifikasi Siswa SMK Bidang Konstruksi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan peran pendidikan kejuruan untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan kerja.

Selain itu pada bulan Agustus 2019 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Perumahan Rakyat dengan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan

Kemahasiswaan (Ditjen Belmawa), Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemendiknas) menandatangani perjanjian kerja sama tentang Peningkatan Kompetensi Bidang Konstruksi di Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Akademik yang dihadiri oleh 21 perwakilan Politeknik dari seluruh Indonesia. Untuk menegakkan standarisasi sertifikasi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dengan BNSP mendorong pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) pada Lembaga Pendidikan (Poltek dan Perguruan Tinggi) dan menciptakan asesor pada Lembaga Pendidikan (Poltek dan Perguruan Tinggi). Telah dilakukan kerjasama dengan 19 Politeknik dalam rangka mendampingi saat proses pembentukan LSP dan 21 skema kompetensi. Berdasarkan surat dari Dirjen Pembelajaran Mahasiswa, ditetapkan 5 (lima) politeknik yang dijadikan piloting implementasi program *Link and Match*. Ke-lima politeknik tersebut yakni Politeknik Negeri Sriwijaya, Politeknik Negeri Samarinda, Politeknik Negeri Bandung, Politeknik Negeri Ujung Pandang dan Politeknik Negeri Ambon.

Dalam rangka menginisiasi *link & match* kebutuhan industri konstruksi dan pendidikan tinggi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melakukan implementasi Pedoman *Link and Match* bidang konstruksi yang melibatkan mitra kerja terkait. Pedoman ini berisikan berbagai pengaturan beban, kewenangan, kriteria dan proses pelaksanaan program *Link and Match* yang dijalankan oleh Kementerian PUPR, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Ristek-Dikti, sesuai dengan kewenangan masing-masing unit.

BAB 2. **PERENCANAAN KINERJA**

2.1 Uraian Singkat Renstra

Rencana strategis merupakan hasil penurunan dari arah dan tujuan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi selama lima tahun ke depan, yang disusun untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2109, dan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L Tahun 2015-2019.

Renstra Kementerian disusun sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian berdasarkan Peraturan Presiden No 15 tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut untuk mendukung upaya mewujudkan ketahanan air, kedaulatan pangan, kedaulatan energi, pengembangan wilayah, penguatan konektivitas nasional, peningkatan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan, pengusahaan penyediaan rumah, mewujudkan industri konstruksi yang kompetitif dan berkualitas, sinergitas pusat dan daerah, serta pengelolaan sumber daya yang efektif, efisien dan akuntabel yang dituangkan dalam rencana strategis Kementerian PUPR tahun 2015-2019.

Ditjen Bina Konstruksi sebagai salah satu Unit Organisasi di bawah Kementerian menyusun Renstra sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan industri konstruksi yang kompetitif dan berkualitas. Renstra disusun sebagai pedoman dan arahan pembangunan dan pembinaan jasa konstruksi yang dilaksanakan melalui: (a) pengembangan sumber daya manusia (SDM) konstruksi; (b) pemberdayaan dan pengembangan usaha Jasa Konstruksi; (c) pengembangan teknologi di bidang Jasa Konstruksi; (d) pengawasan terhadap penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi; serta (e) bentuk pembinaan lainnya.

Pada Program Pembinaan Konstruksi, terdapat beberapa penyesuaian pada Revisi Renstra 2015-2019 yaitu: 1) Beberapa sasaran di dalam RPJMN yang semula pada level outcome disesuaikan menjadi level output dalam Renstra; 2) Penyesuaian sasaran dan satuan yang terdapat di dalam RPJMN dan Renstra dari sisi nomenklatur, yaitu sasaran: "Jumlah Badan Usaha" dalam RPJMN disesuaikan menjadi sasaran: "Tingkat BUJK yang berkualifikasi besar" dalam Renstra. Adapun untuk target disesuaikan dengan melakukan konversi; 3) Kebutuhan anggaran sebesar Rp.

3.558 (tiga ribu lima ratus lima puluh delapan) miliar di dalam RPJMN belum termasuk anggaran untuk komponen dukungan manajemen, oleh karenanya dilakukan penyesuaian dengan menambahkan anggaran untuk dukungan manajemen, sedangkan kebutuhan sesungguhnya adalah sebesar Rp. 5.743 (lima ribu tujuh ratus empat puluh tiga) miliar yang sudah mencakup kebutuhan anggaran untuk target RPJMN dan dukungan manajemen.

Pada bulan November 2019 terbit Permen PUPR No. 18/PRT/M/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri PUPR Nomor 13.1/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 2015-2019. Dengan terbitnya Permen tersebut, maka berdampak pada Renstra Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Bina Konstruksi adalah Tingkat Pengendalian Pelaksanaan Konstruksi Nasional melalui Sasaran Proram Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional. Selain itu terjadi perubahan pada level sasaran kegiatan, target kegiatan meningkatnya investasi infrastruktur dan pasar konstruksi yang semula di targetkan sebesar 10% berubah menjadi 0% dikarenakan perubahan struktur organisasi. Selain itu muncul sasaran kegiatan baru yaitu meningkatnya kualitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa konstruksi.

Tujuan Ditjen Bina Konstruksi pada tahun 2019 sesuai dengan tugas dan fungsinya diwujudkan melalui pencapaian sasaran program yaitu “Meningkatnya Kapasitas dan Pengendalian Kualitas Konstruksi Nasional”. Sehingga pada tahun 2019, untuk mencapai sasaran program tersebut diatas, didukung dengan sasaran kegiatan Unit Eselon II antara lain:

1. Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi
2. Peningkatan Penerapan Manajemen Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Tertib Pengadaan dan Administrasi Kontrak
3. Peningkatan Persentase Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) yang berkinerja baik dan Peningkatan Utilitas Produk Unggulan
4. Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi
5. Peningkatan Sumber Daya Manusia Penyedia Jasa Konstruksi

Sejalan dengan meningkatnya kompleksitas tantangan yang dihadapi, upaya yang harus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dalam mencapai sasaran tersebut juga harus meningkat, baik dalam skala kuantitas maupun kualitasnya. Keberhasilan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dalam menjawab tantangan yang dihadapi sangat tergantung dari keberhasilannya dalam menyiapkan organisasi dan tata kelola Ditjen Bina Konstruksi serta sumber daya yang

diperlukan. Kegiatan-kegiatan sebagaimana diuraikan di atas merupakan hal-hal yang diupayakan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi untuk dapat mencapai sasaran program.

2.1.1 Visi dan Misi

Berdasarkan arahan dari Presiden, bahwa setiap kementerian memiliki fungsi operasional dalam mendukung pencapaian visi dan misi presiden yang tertuang di dalam Nawacita Presiden sebagai berikut:

1. Menghadirkan Kembali Negara Untuk Melindungi Segenap Bangsa Dan Memberikan Rasa Aman Pada Seluruh Warga Negara
2. Membuat Pemerintah Tidak Absen Dengan Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis, Dan Terpercaya
3. **Membangun Indonesia Dari Pinggiran Dengan Memperkuat Daerah-daerah Dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan**
4. Menolak Negara Lemah Dengan Melakukan Reformasi Sistem Dan Penegakan Hukum Yang Bebas Korupsi, Bermartabat Dan Terpercaya
5. **Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia**
6. **Meningkatkan Produktivitas Rakyat Dan Daya Saing Di Pasar Internasional**
7. **Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Menggerakkan Sektor-sektor Strategis Ekonomi**
8. Melakukan Revolusi Karakter Bangsa
9. Memperteguh Ke-bhineka-an dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia

Unsur Nawacita Presiden yang difokuskan dalam program Pembinaan Konstruksi adalah poin 3, 5, 6 dan 7. Pada dokumen RPJMN 2015-2019, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melakukan dukungan terhadap tercapainya target mengenai tertib penyelenggaraan, produktivitas Badan Usaha, volume perusahaan, penggunaan dan nilai tambah dalam negeri, serta penguasaan pasar. Berdasar kepada Renstra PUPR 2015-2019, visi Kementerian adalah **“Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Handal dalam Mendukung Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, sesuai dengan program utamanya yaitu **Pembinaan Konstruksi**, berperan dalam pengembangan konstruksi nasional, pembinaan penyelenggaraan konstruksi, pembinaan produktivitas badan usaha dan sumber daya konstruksi, serta pemberdayaan tenaga kerja konstruksi dan masyarakat dalam rangka mewujudkan terciptanya

industri konstruksi yang mandiri, produktif dan berdaya saing dengan dilandasi iklim usaha yang sehat, sumber daya manusia yang kompeten dan menggunakan teknologi unggulan.

Adapun Misi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi berangkat dari misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat poin 4 yaitu:

“Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan pedesaan, dalam kerangka NKRI”.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam upaya merealisasikan *good governance*, Ditjen Bina Konstruksi telah melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung program pembinaan konstruksi. **Tujuan** pembangunan sektor konstruksi secara umum terdapat di dalam salah satu tujuan yang tercantum pada Revisi Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu: **“menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terpadu dan berkelanjutan yang didukung oleh industri konstruksi yang berkualitas dan berdaya saing tinggi untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antar daerah, dengan mengutamakan pembangunan bagi kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan pedesaan”**.

Peta strategi hasil Revisi Renstra Kementerian PUPR tahun 2015-2019 menggambarkan semua sasaran Kementerian PUPR yang strategis. Sasaran strategis dalam hal ini merupakan kondisi yang hendak dicapai secara nyata oleh Kementerian PUPR sebagai penjabaran dari tujuan yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) satu atau beberapa program. Sasaran-sasaran yang strategis tersebut distrukturkan menjadi 5 Sasaran Strategis Kementerian PUPR. Sesuai dengan tujuan Kementerian PUPR poin 1 yang didukung oleh Ditjen Bina Konstruksi akan dicapai melalui **sasaran strategis** Kementerian PUPR, yaitu **“Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat antardaerah, antarsektor, dan antartingkat pemerintahan”**. Selain Ditjen Bina Konstruksi, sasaran strategis Kementerian PUPR tersebut didukung oleh sasaran program Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dengan pembobotan dari sasaran program masing-masing sebesar 50%.

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran tersebut diperlukan *Internal Process* yang memiliki 5 (lima) Sasaran Kegiatan yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi

Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa konstruksi diindikasikan dengan jumlah paket lelang yang dikategorikan sebagai pelaksanaan PBJ berkualitas melalui layanan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi dengan waktu layanan maksimal 125 hari. Indikator Sasaran kegiatan yang ditetapkan yaitu:

“Tingkat Kualitas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi”

Data indikator ini merupakan data tersedia yang bersumber dari kinerja Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi yaitu data rata-rata kualitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa konstruksi.

2. Meningkatnya penerapan manajemen mutu, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), tertib pengadaan dan administrasi kontrak.

Meningkatnya penerapan manajemen mutu, K3, tertib pengadaan dan administrasi kontrak dimaksudkan untuk menilai tingkat penerapan Sistem Manajemen Mutu, K3, Sistem Pengadaan dan Administrasi Kontrak pada para pelaksana pekerjaan konstruksi secara kualitas, yaitu dengan membandingkan pelaksanaan terhadap ketentuan dan/atau regulasi yang mengaturnya. Melalui penerapan 4 (empat) komponen tersebut secara konsisten dan penuh integritas, diharapkan proses pelaksanaan pekerjaan konstruksi dapat tertib dan hasil pekerjaan konstruksi berkualitas sebagaimana yang diharapkan. Indikator Sasaran Kegiatan yang ditetapkan yaitu:

“Persentase kenaikan tingkat tertib penyelenggaraan konstruksi”

Indikator ini merupakan indikator komposit yang datanya dari sumber internal yang diperoleh dari hasil survei terhadap pekerjaan konstruksi dalam penyelenggaraan lelang, kesesuaian kontrak dengan peraturan, ketersediaan dokumen RK3K, dan ketersediaan dokumen RMP dan RMK. Persentase kenaikan dihitung dari rata-rata hasil kesesuaian pada 4 (empat) komponen tersebut pada tahun ke-N dikurangi rata-rata hasil kesesuaian pada 4 (empat) komponen tersebut pada tahun sebelumnya (N-1).

3. Meningkatnya Badan Usaha dan Jasa Konstruksi (BUJK) yang berkinerja baik dan peningkatan utilitas produk unggulan.

Meningkatnya persentase BUJK yang berkualifikasi besar diindikasikan dengan penambahan jumlah BUJK yang berkualifikasi B2, dari semula berkualifikasi B1, yang mencerminkan peningkatan kinerja BUJK sehingga memiliki daya saing yang lebih tinggi dalam persaingan pasar konstruksi. Dengan demikian, maka indikator Sasaran Kegiatan yang ditetapkan yaitu:

“Persentase kenaikan BUJK menjadi berkualitas Besar”

Data indikator ini merupakan data tersedia yang bersumber dari lembaga Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (GAPEKSINDO). Persentase kenaikan dihitung dari jumlah BUJK berkualitas B2 pada tahun ke-N dikurangi jumlah BUJK berkualitas B2 pada tahun sebelumnya (N-1).

Meningkatnya utilitas produk unggulan diindikasikan dengan peningkatan penggunaan beton pra-cetak pada pekerjaan konstruksi secara nasional sebagai salah satu sumber daya industri konstruksi yang merupakan produk unggulan karena memiliki daya saing tinggi terhadap efisiensi dan kualitas hasil pekerjaan konstruksi. Oleh karena itu penggunaan produk ini perlu terus ditingkatkan. Dengan demikian, maka indikator Sasaran Kegiatan yang ditetapkan yaitu:

“Persentase kenaikan tingkat utilitas produk unggulan”

Data indikator ini merupakan data tersedia yang bersumber dari Asosiasi Perusahaan Pracetak dan Prategang Indonesia (AP3I) berupa jumlah produksi beton pra-cetak pada setiap tahun. Persentase peningkatan utilitas dihitung dari jumlah produksi pada tahun ke-N yang dipastikan terserap semuanya dalam proyek konstruksi, dimana penggunaan beton pracetak tersebut sebesar 15% setiap tahun dari total penggunaan beton secara keseluruhan.

4. Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) penyedia jasa konstruksi yang kompeten.

Meningkatnya SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten dimaksudkan sebagai pemenuhan kebutuhan tenaga kerja konstruksi yang kompeten sesuai dengan laju perkembangan dan pertumbuhan jasa konstruksi yang diindikasikan dengan peningkatan jumlah tenaga konstruksi. Dengan demikian, maka indikator Sasaran Kegiatan yang ditetapkan yaitu:

“Persentase kenaikan SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten”

Data indikator ini merupakan data tersedia yang bersumber dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) yang merupakan gabungan 2 (dua) data yaitu jumlah tenaga ahli bersertifikat dan jumlah tenaga terampil bersertifikat. Persentase kenaikan dihitung dari seluruh jumlah tenaga kerja yang kompeten sampai pada tahun ke-N dibagi dengan estimasi jumlah tenaga kerja yang kompeten selama 5 (lima) tahun ke depan (tahun 2019) sebanyak 2.754.160 orang.

5. Meningkatnya Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi

Pelaksanaan Kerjasama dan Pemberdayaan dilaksanakan dalam upaya meningkatkan tenaga kerja konstruksi yang kompeten dan bersertifikat melalui program kerjasama dan

pemberdayaan stakeholder-stakeholder yang ada di daerah. Dalam pelaksanaannya, upaya ini dijalankan oleh Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan dibantu oleh balai-balai wilayah melaksanakan kegiatan pelatihan dan pemberdayaan dengan tujuan dalam meningkatkan jumlah tenaga kerja konstruksi yang berkompeten. Dengan demikian indikator Sasaran Kegiatan yang diterapkan adalah:

“Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi”

Data indikator ini merupakan data capaian tenaga kerja konstruksi berkompeten dan bersertifikat melalui kegiatan kerjasama dan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Direktorat KSP dan Balai-Balai di lingkungan Jasa Konstruksi melalui kegiatan pelatihan percontohan dan strategis yang data capaiannya direkap melalui sistem aplikasi Dayanaker.

Selanjutnya untuk memenuhi harapan stekholders/customer pada 5 (lima) Sasaran Kegiatan tersebut diperlukan proses pelaksanaan kegiatan dan untuk melaksanakan *internal process* tersebut, maka diperlukan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di dalam perspektif *Learning and Growth*. Adapun peta strategi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi adalah sebagai berikut:

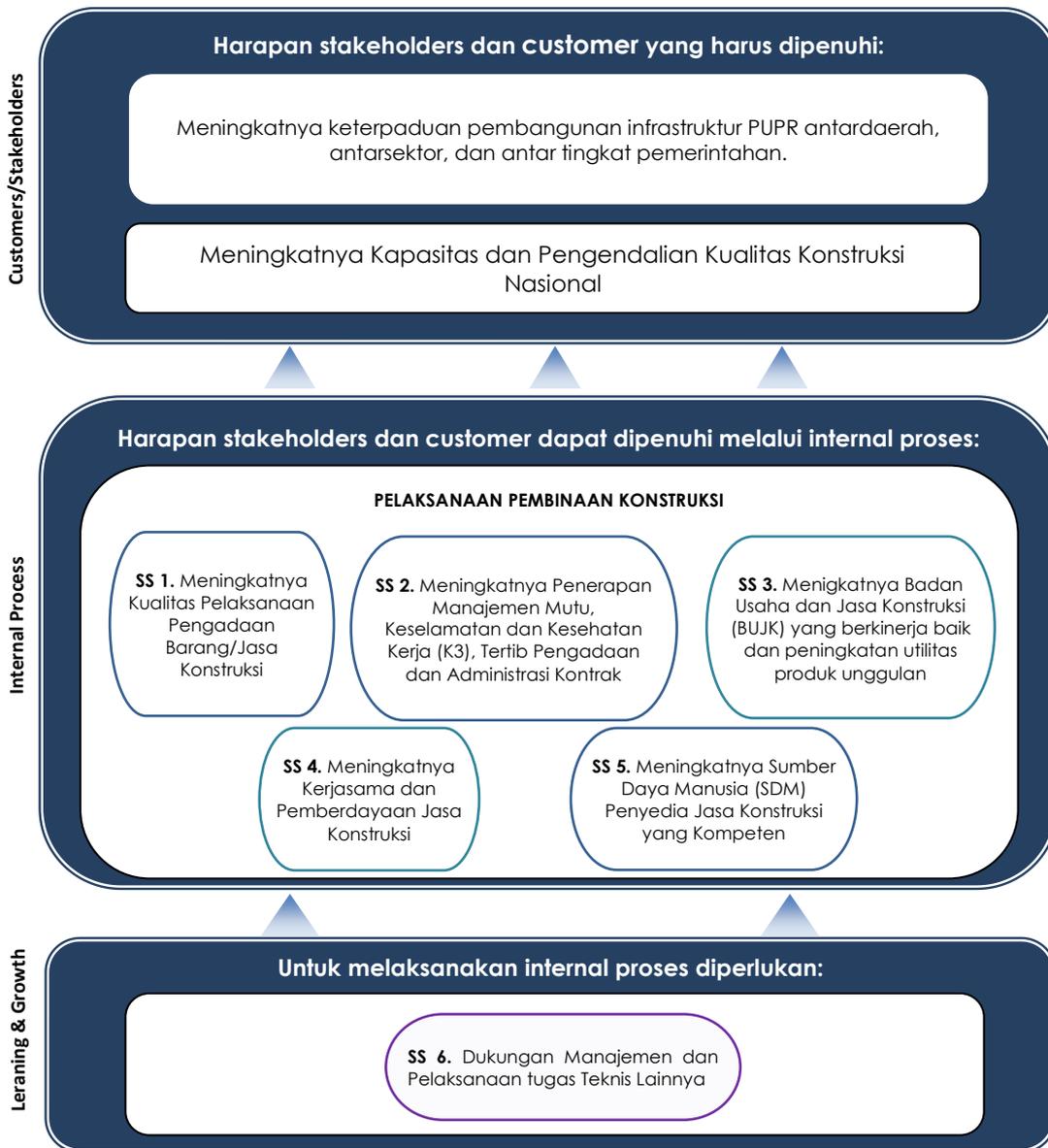


Diagram 3. Peta Strategis Ditjen Bina Konstruksi 2015-2019

Sumber: Revisi Renstra Ditjen Bina Konstruksi 2015-2019

2.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi

Kebijakan pembinaan konstruksi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang PUPR yang terpadu dan berkelanjutan, diarahkan bagi terwujudnya konstruksi yang berkualitas yang difokuskan pada pembinaan konstruksi terutama di kawasan/wilayah prioritas nasional serta program kegiatan percepatan pembangunan proyek strategis nasional serta dalam upaya mendukung pemerataan pembangunan dan kewilayahan, pembangunan perumahan dan permukiman, pembangunan kedaulatan pangan dan energi, dan peningkatan konektivitas nasional. Secara umum strategi yang akan ditempuh adalah memastikan pengembangan dan

peningkatan kualitas pengelolaan data dan informasi konstruksi, ketersediaan sumber daya konstruksi, penerapan teknologi konstruksi, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian mutu konstruksi, peningkatan kapasitas jasa konstruksi, serta pendayagunaan dan pengelolaan aset material dan peralatan konstruksi.

Adapun strategi operasional yang akan ditempuh terdiri dari:

1. Memastikan peningkatan kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian PUPR;
2. Memastikan mutu hasil konstruksi dan tertib penyelenggaraan konstruksi infrastruktur melalui peningkatan penerapan Sistem Manajemen Mutu, peningkatan penerapan K3 Konstruksi, peningkatan tertib pengadaan barang dan jasa dan peningkatan tertib administrasi kontrak konstruksi;
3. Memastikan peningkatan kinerja Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) dan utilitas produk unggulan dalam negeri melalui penataan regulasi dan perangkat kelembagaan jasa konstruksi di pusat dan daerah, peningkatan kapasitas rantai pasok material dan peralatan konstruksi, pengembangan penerapan teknologi dan produksi dalam negeri dan peningkatan kapasitas usaha jasa konstruksi dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur bidang PUPR;
4. Memastikan peningkatan jumlah dan kompetensi SDM penyedia jasa konstruksi dan produktifitas kerja konstruksi melalui penyediaan standar dan materi kompetensi, peningkatan penerapan kompetensi dan produktifitas, pengembangan profesi konstruksi berkelanjutan, serta peningkatan kerjasama strategis dengan lembaga pemerintah dan masyarakat dalam penyediaan SDM konstruksi.

Adapun strategi pencapaian sarannya terdiri dari:

1. Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa.
 - a. Perumusan kebijakan pengadaan barang dan jasa dan sistem pelaksanaan yang baik.
 - b. Pembinaan dan advokasi pengelolaan pengadaan jasa konstruksi.
 - c. Peningkatan kapasitas stakeholders dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
 - d. Peningkatan pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa.
2. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
 - a. Penyederhanaan dan peningkatan transparansi sistem pengadaan dan kontrak jasa konstruksi.

- b. Penguatan kapasitas stakeholders dalam pelaksanaan pengadaan dan kontrak jasa konstruksi.
 - c. Pembaharuan regulasi yang dibarengi dengan intensitas dan kualitas pemantauan dalam penerapan sistem manajemen mutu pada pelaksanaan proyek konstruksi.
 - d. Penguatan kapasitas stakeholders dalam penerapan sistem manajemen mutu pada pelaksanaan proyek konstruksi.
 - e. Peningkatan sosialisasi dan penyadaran publik terhadap pentingnya penerapan sistem konstruksi berkelanjutan pada penyelenggaraan infrastruktur.
 - f. Penguatan kapasitas stakeholders dalam penerapan sistem konstruksi berkelanjutan pada penyelenggaraan infrastruktur.
3. Peningkatan Kemudahan Berusaha dan Efisiensi Pengelolaan Sumber Daya Industri Konstruksi.
- a. Peningkatan pengelolaan, updating data dan integrasi pada Sistem Informasi Jasa Konstruksi di tingkat Pusat (Nasional), Provinsi, maupun Kabupaten/Kota sehingga dapat digunakan sebagai media pengambilan keputusan yang kredibel bagi stakeholders jasa konstruksi.
 - b. Peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan jasa konstruksi yang meliputi pengelolaan perijinan, sistem informasi, dan penguatan regulasi jasa konstruksi.
 - c. Penguatan peran bagi kelembagaan Jasa Konstruksi (LPJK), Asosiasi Industri Konstruksi, Asosiasi Profesi dan kelembagaan lainnya dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi.
 - d. Peningkatan fasilitasi bagi upaya peningkatan kinerja Badan Usaha Jasa Konstruksi.
 - e. Peningkatan fasilitasi dan penyebarluasan informasi bagi penyelenggaraan pemberian rekomendasi teknis Ijin Usaha Jas Konstruksi Asing (IUJKA).
 - f. Peningkatan fasilitasi dan pemantauan bagi terlaksananya kepatuhan prosedur dan mekanisme kerjasama Badan Usaha Konstruksi Asing (BUJK) pada pelaksanaan proyek konstruksi.
 - g. Membangun sistem informasi yang terintegrasi dan memadai bagi penyelenggaraan sistem rantai pasok material dan peralatan konstruksi, termasuk database dan sistem registasi.
 - h. Penyelenggaraan forum dan promosi penggunaan produk-produk unggulan industri konstruksi dalam negeri.

- i. Peningkatan pemantauan atas penggunaan produk dalam negeri (Tingkat Kandungan Dalam Negeri/TKDN) dalam pelaksanaan proyek konstruksi.
 - j. Peningkatan fasilitasi dan kerjasama dengan lembaga litbang dalam rangka pengembangan dan pemilihan teknologi terapan dan siap pakai dalam usaha jasa konstruksi.
 - k. Pengembangan pola penjaminan resiko pemanfaatan teknologi industri yang dikembangkan di dalam negeri.
4. Peningkatan Manajemen SDM Konstruksi.
- a. Pembaharuan secara berkelanjutan terhadap modul dan materi diklat konstruksi yang responsif terhadap dinamika dan perkembangan lingkungan strategis usaha jasa konstruksi.
 - b. Penataan ulang pembinaan penyelenggaraan diklat konstruksi serta peningkatan intensitas dan kualitas penyelenggaraan pelatihan konstruksi percontohan.
 - c. Peningkatan kapasitas dan profesionalitas penyelenggaraan diklat konstruksi, sertifikasi dan penyetaraan kompetensi tenaga kerja konstruksi, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun lembaga masyarakat lainnya.
 - d. Membangun sistem informasi yang terintegrasi dan memadai dalam pengelolaan tenaga kerja konstruksi.
 - e. Peningkatan fasilitasi dan pemantauan terhadap penerapan program pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi seluruh stakeholders jasa konstruksi.
 - f. Mendorong terbentuknya regulasi atas pengakuan dan perlindungan bagi tenaga kerja konstruksi.
 - g. Peningkatan kerjasama pengelolaan SDM jasa konstruksi dengan seluruh stakeholder.

2.1.4 Program dan Kegiatan

Sasaran Program (*outcome*) merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian sasaran strategis Kementerian yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*). Untuk menunjukkan keberhasilan pencapaian Sasaran Program, disusun Indikator Sasaran Program yang merupakan alat ukur yang mengindikasikan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program.

Sesuai program dan kegiatan yang dimotori oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan, masing-masing Unit Eselon I hanya memiliki dan bertanggungjawab atas satu program. Satu-

satunya program yang dikelola oleh Ditjen Bina Konstruksi adalah **Program Pembinaan Konstruksi**. Program tersebut menghasilkan **sasaran program** yaitu “**Meningkatnya Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur PUPR Antardaerah, Antarsektor, dan Antartingkat Pemerintahan**” dengan **indikator sasaran program** yang lebih terukur yaitu “**Tingkat Pengendalian Pelaksanaan Konstruksi Nasional**”.

Dalam rangka pencapaian sasaran program tersebut, Ditjen Bina Konstruksi 6 didukung oleh 6 (enam) kegiatan sesuai dengan jumlah Unit Eselon II di lingkungan Ditjen Bina Konstruksi, yaitu:

1. Pembinaan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi;
2. Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
3. Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi;
4. Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi
5. Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi; dan
6. Penyelenggaraan Pelayanan Teknis dan Administrasi Pembinaan Jasa Konstruksi

Masing-masing kegiatan tersebut memiliki **sasaran kegiatan** dengan **indikator sasaran kegiatan** yang ditetapkan berdasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang terorganisir. Indikator sasaran kegiatan tersebut dibuat dengan memperhatikan kaidah-kaidah **SMART**: (1) spesifik dan jelas (*Specific*), (2) dapat diukur secara obyektif (*Measurable*), (3) dapat dicapai (*Achievable*), (4) relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai (*Relevant*), dan (4) tidak bias (*Transparent*) sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3. Sasaran Kegiatan dan Indikator Sasaran Kegiatan Ditjen Bina Konstruksi

Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan
Kegiatan 1. Pembinaan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi	
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi	ISK1. Tingkat Kualitas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi
Kegiatan 2. Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	
Peningkatan Penerapan Manajemen Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Tertib Pengadaan dan Administrasi Kontrak	ISK2. Persentase Kenaikan Tingkat Tertib
Kegiatan 3. Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi	
Peningkatan Persentase Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) yang Berkinerja Baik dan Peningkatan Utilitas Produk Unggulan	ISK3.1 Persentase Kenaikan BUJK Berkinerja Baik
	ISK3.2 Persentase Kenaikan Tingkat Utilitas Produk Unggulan
Kegiatan 4. Kerja Sama dan Pemberdayaan Jas Konstruksi	
Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	ISK4. Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan

Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan
	Jasa Konstruksi
Kegiatan 5. Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	
Peningkatan Sumber Daya Manusia Penyedia Jasa Konstruksi yang Kompeten	ISK5. Persentase Kenaikan SDM Penyedia Jasa Konstruksi yang Kompeten
Kegiatan 6. Penyelenggaraan Pelayanan Teknis dan Administrasi	
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	ISK6. Jumlah Layanan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Sumber: Revisi Renstra Ditjen Bina Konstruksi 2015-2019

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja Ditjen Bina Konstruksi adalah Rencana Kinerja pada tahun bersangkutan yang berasal dari Dokumen DIPA (Dokumen Anggaran) dan Rencana Strategis Ditjen Bina Konstruksi TA 2015-2019 yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja output dan target kinerja sesuai dengan tujuan Ditjen Bina Konstruksi yang selaras dengan visi misi Presiden yaitu NAWACITA sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini:



Gambar 3. Piagam Perjanjian Kinerja Ditjen Bina Konstruksi TA 2019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	SASARAN PROGRAM	INDEKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1) PROGRAM PEMBINAAN KONSTRUKSI			
1	Peningkatan kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional	Tingkat pengendalian pelaksanaan konstruksi nasional	60%

Program :
1. Pembinaan Konstruksi

Anggaran
Rp. 558.164.790.000

JAKARTA, JANUARI 2019

**MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**



M. BASUKI HADIMULJOWO

**DIREKTUR JENDERAL
BINA KONSTRUKSI**



SYARIF BURHANUDDIN

Gambar 4. Lampiran Perjanjian Kinerja Ditjen Bina Konstruksi TA 2019

Sumber: Perjanjian Kinerja Ditjen Bina Konstruksi (2019)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pasal 16 ayat 1 bahwa PK dapat diubah atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi tertentu. Terkait hal tersebut, terjadi kondisi di lingkungan Ditjen Bina Konstruksi TA 2019 yang mengakibatkan unit organisasi harus melakukan perubahan/revisi PK TA 2019 yaitu terbitnya Peraturan Menteri PUPR Nomor 18/PRT/M/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PUPR Nomor 13.1/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 2015-2019. Selain itu terjadi revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2019 yang mengakibatkan terjadi perubahan alokasi anggaran tiap satuan kerja. Sehingga terjadi perubahan/revisi terhadap PK Ditjen Bina Konstruksi TA 2019 sebagai berikut:



Gambar 5. Piagam Perjanjian Kinerja Revisi Ditjen Bina Konstruksi TA 2019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1) PROGRAM PEMBINAAN KONSTRUKSI			
1	Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional	Tingkat pengendalian pelaksanaan konstruksi nasional	90%

Program :
1. Pembinaan Konstruksi

Anggaran Awal : Rp. 558.160.700.000
Anggaran Revisi : Rp. 594.305.997.000

JAKARTA, DESEMBER 2019

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
M. Basuki Hadimuljono
M. BASUKI HADIMULJONO

DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI
Syarif Burhanuddin
SYARIF BURHANUDDIN

Gambar 6. Lampiran Perjanjian Kinerja Revisi Ditjen Bina Konstruksi TA 2019

Pada dokumen Perjanjian Kinerja tersebut, tercantum sasaran program, indikator kinerja dan target. **Indikator Kinerja Utama** merupakan Indikator Kinerja yang telah disusun berdasarkan Renstra.

Dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai target PK, Ditjen Bina Konstruksi dibantu oleh beberapa Unit Eselon II yang terdiri dari 1 (satu) Sekretariat Direktorat Jenderal, dan 5 (lima) Direktorat. Unit Kerja Eselon II tersebut juga telah menetapkan perjanjian kinerja tahun 2019 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Bina Konstruksi dengan masing-masing Direktur.

A. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi bertanggungjawab atas kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Teknis dan Administrasi.



Gambar 7. Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

B. Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi bertanggungjawab atas kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi.



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

REVISI #1

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DIREKTORAT PENGADAAN JASA KONSTRUKSI
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sumito
Jabatan : Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Syarif Burhanuddin
Jabatan : Direktur Jenderal Bina Konstruksi

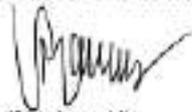
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2019

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Bina Konstruksi



Syarif Burhanuddin

Pihak Pertama
Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi



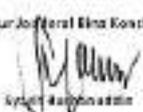
Sumito

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DIREKTORAT PENGADAAN JASA KONSTRUKSI

REVISI #1

NO.	SASARAN NEGATIF	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	MEMINGKATKAN KUALITAS PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA KONSTRUKSI	Tingkat Kualitas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi	70	%
REKAPITULASI			ANGGARAN	
- PEMBINAAN INVESTASI INFRASTRUKTUR				2.172.445.000
- PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA KONSTRUKSI				12.547.152.000
- PENYELenggaraAN PELAYANAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI				9.051.373.000
TOTAL				23.770.970.000

Direktur Jenderal Bina Konstruksi



Syarif Burhanuddin

Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi



Sumito

C. Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi bertanggungjawab atas kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DIREKTORAT BINA PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

REVISI #1

NO	SASARAN SIKUTAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
			(A)	(B)
1	PERINGKATAN JEMBATAN MANAJEMEN MUTU, KESELAMATAN DAN KESENYAMAN KOTA (K3), TERES PONDASAHAN DAN ADAPTASI KONTRAK	Persentase Pekerjaan Tingkat Tertinggi Penyelenggaraan Konstruksi	33	%
KETERANGAN			ANGGARAN	
- PENYALANGAN PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI			13.400.000,00	
- PENYALANGAN PELAKSIAN TERES DAN PONDASAHAN			1.100.000,00	
TOTAL			14.500.000,00	

Direktur Jenderal Bina Konstruksi: Syarif Burhanuddin
 Direktur Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi: Putut Marhayudi

Gambar 8. Perjanjian Kinerja Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

D. Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi bertanggungjawab atas kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Sistem Konstruksi.

REVISI #1

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DIREKTORAT BINA KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA JASA KONSTRUKSI
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dewi Chomistriona
Jabatan : Plt. Direktur Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Syarif Burhanuddin
Jabatan : Direktur Jenderal Bina Konstruksi

Sebagai atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. :

Jakarta, Desember 2019

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Bina Konstruksi

Pihak Pertama
Plt. Direktur Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi

Syarif Burhanuddin
Syarif Burhanuddin

Dewi Chomistriona
Dewi Chomistriona

REVISI #1

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DIREKTORAT BINA KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA JASA KONSTRUKSI

NO	KATEGORI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SASARAN	
			NO	SASARAN
1	PERINGKATAN PERANGKAP BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI (PUBUK) YANG BERKUALITAS DAN PENYOPAN JARAK JANGKA PANJANG	Peringkat Keahlian DUKK dan Berkualitas Baik Peringkat Keahlian Tingkat III dan Produk Unggulan	33	%
REKAPITULASI			RANGKAIAN	
- PEKERJAAN KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA KONSTRUKSI			21.775.000.000	
- PENYELenggaraAN PELAYANAN TEKNIK DAN ADMINISTRASI			10.000.000.000	
TOTAL			31.775.000.000	

Direktur Jenderal Bina Konstruksi

Plt. Direktur Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi

Syarif Burhanuddin
Syarif Burhanuddin

Dewi Chomistriona
Dewi Chomistriona

Gambar 9. Perjanjian Kinerja Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi

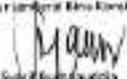
E. Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi bertanggungjawab atas kegiatan Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Sumber Daya Konstruksi.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DIREKTORAT BINA KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI

REVISI #1

NO	NOMOR GABUNG	REKAMAS/INDUKSA	TARGET	ACTUAL
			(A)	(B)
1	PERMENDIRIAN JENDERAL BINA AWALAH PERUSAHAAN DAN KONSTRUKSI YANG KOMPREHENSIF	Persentase Kontribusi SEM Persepsi Jasa Konstruksi yang Kompleks	4	3
KEGIATAN			ANGKARAN	
PEMBAKUN KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI			Rp 230.754.000	
PEMUNGKAPANAN PELAKSIANAN SEM & DANA ADI INSTRASI			12.897.000.000	
TOTAL			13.127.754.000	

Direktur Jenderal Bina Konstruksi:  Syarif Burhanuddin
 Direktur Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi:  Ober Gultom

Gambar 10. Perjanjian Kinerja Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi

F. Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi bertanggungjawab atas kegiatan Kerja Sama dan Pemberdayaan.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DIREKTORAT KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN

REVISI #1

NO.	NOMOR PROJEK	INDIKATOR KINERJA	TARIF	
			RUPIAH	SIKIP
1	PEWAKILAN KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN PIHAK USAHAWA KONSTRUKSI	Perwakilan kerjasama dan pemberdayaan usaha konstruksi	14	5
BAGIAN - KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN - DIREKTORAT KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN			ANGKARAN	
TOTAL			31.227.256.000	
			8.522.076.000	
			22.705.180.000	

Pihak Kedua: Syarif Burhanuddin (Direktur Jenderal Bina Konstruksi)
 Pihak Pertama: Kimron Manik (Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan)

Gambar 11. Perjanjian Kinerja Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan

Selain Perjanjian Kinerja Sekretariat dan masing-masing Direktorat, terdapat pula Perjanjian Kinerja balai yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang dapat dilihat pada Lampiran.

2.3 Metode Pengukuran

Metode pengukuran yang digunakan dalam perhitungan kinerja Ditjen Bina Konstruksi pada tahun tertentu adalah sebagai berikut:

Sasaran Program Ditjen Bina Konstruksi	Indikator Sasaran Kegiatan	Target Sasaran Kegiatan	Realisasi Sasaran Kegiatan	% Kinerja Sasaran Kegiatan	Bobot	% Realisasi Per Bobot	Target Sasaran Program	Realisasi Sasaran Program	Kinerja
a	b_x	c_x	d_x	$e_x = \frac{d_x}{c_x}$	f_x	$g_x = e_x * f_x$ (apabila nilai $g_x > f_x$, maka $g_x = f_x$)	h	$i = \sum g_x$	$j = \frac{i}{h}$

Diagram 4. Metode Pengukuran Sasaran Program Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

Sumber: Bagian Perencanaan dan Evaluasi (2019)

Kinerja (j) Ditjen Bina Konstruksi diperoleh dengan membandingkan realisasi sasaran program (i) dengan target (h) pada tahun 2019. Ditjen Bina Konstruksi pada tahun 2019 memiliki 1 (satu) sasaran program dengan 1 (satu) indikator sasaran program serta target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Ditjen Bina Konstruksi.

Di dalam organisasi Ditjen Bina Konstruksi, terdapat 6 (enam) komponen utama berupa indikator sasaran kegiatan (b_x) yang saling bersinergi dalam mewujudkan sasaran program Ditjen Bina Konstruksi. Keenam indikator sasaran kegiatan tersebut adalah:

1. Tingkat Kualitas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi (b_1)
2. Perentase Kenaikan Tingkat Tertib Penyelenggaraan Konstruksi (b_2)
3. Persentase Kenaikan BUJK Berkinerja Baik (b_3)
4. Persentase Kenaikan Tingkat Utilitas Produk Unggulan (b_4)
5. Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi (b_5)
6. Persentase Kenaikan SDM Penyedia Jasa Konstruksi yang Kompeten (b_6)

Adapun realisasi sasaran program diperoleh dengan menjumlahkan hasil realisasi per bobot keenam indikator sasaran kegiatan tersebut. Masing-masing indikator sasaran kegiatan dalam rumus realisasi sasaran program Ditjen Bina Konstruksi memiliki bobotnya masing-masing, dengan penjabaran sebagai berikut:

Tabel 4. Persentase Pembobotan Indikator Sasaran Kegiatan

No.	Indikator Sasaran Kegiatan	Bobot
1	Tingkat Kualitas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi	15%
2	Persentase Kenaikan Tingkat Tertib Penyelenggaraan Konstruksi	15%
3	Persentase Kenaikan BUJK Berkinerja Baik	15%
4	Persentase Kenaikan Tingkat Utilitas Produk Unggulan	10%
5	Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	15%
6	Persentase Kenaikan SDM Penyedia Jasa Konstruksi yang Kompeten	30%
TOTAL		100%

Sumber: Bagian Perencanaan dan Evaluasi (2019)

Indikator sasaran kegiatan “Persentase Kenaikan SDM Penyedia Jasa Konstruksi yang Kompeten” memiliki bobot paling besar dikarenakan fokus utama Direktorat Jenderal Bina Konstruksi adalah mencetak tenaga kerja konstruksi yang kompeten dan bersertifikat sedangkan untuk untuk indikator sasaran Tingkat Rasio Kapitalis Konstruksi, Persentase Kenaikan Tingkat Tertib Penyelenggaraan Konstruksi, Persentase Kenaikan BUJK Berkinerja Baik, dan Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi masing-masing memiliki bobot 15%. Indikator sasaran kegiatan yang paling kecil adalah Persentase Kenaikan Tingkat Utilitas Produk Unggulan yaitu hanya sebanyak 10%.

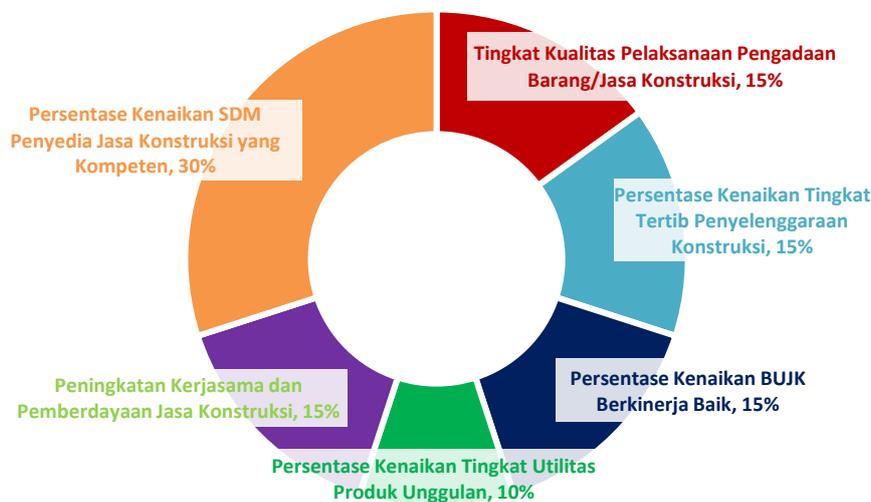


Diagram 5. Komposisi Agregat Sasaran Program Ditjen Bina Konstruksi TA 2019

Sumber: Bagian Perencanaan dan Evaluasi (2019)

Setiap indikator sasaran kegiatan memiliki target yang ditetapkan dalam Revisi Renstra Kementerian PUPR 2015-2019. Adapun perhitungan realisasi masing-masing indikator sasaran kegiatan tersebut terhadap target dijabarkan sebagai berikut:

1. Tingkat Kualitas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi (b_1)

“Tingkat Kualitas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi” merupakan indikator sasaran kegiatan dari sasaran kegiatan “Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi” berupa target yang akan diwujudkan dari kegiatan Pembinaan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi.

Indikator sasaran kegiatan ini merupakan indikator baru seiring dengan terbentuknya Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi sebagai unit Eselon II pengganti Direktorat Bina Investasi Infrastruktur. Realisasi indikator sasaran kegiatan 1 (b_1) merupakan hasil kinerja yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi.

Paket yang dijadikan dasar penilaian indikator adalah paket yang sudah selesai dan berada di tahap pengumuman pemenang. Kriteria layanan pengadaan barang/jasa yang berkualitas adalah memenuhi kualitas waktu penyelesaian pemilihan penyedia yaitu 125 hari per paket. Nilai dari pengerjaan paket yang memenuhi kriteria tersebut dijumlahkan dan dibandingkan dengan seluruh paket yang ada di kementerian PUPR dan sudah selesai. Hasil dari perbandingan tersebut adalah nilai dari indikator capaian sasaran program Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi

Tingkat kualitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa konstruksi diperoleh berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

$$b_1 = \frac{A_n}{Z} \times 100\%$$

Keterangan:

- b_1 : Tingkat kualitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa konstruksi (%)
 A_n : Jumlah paket yang memenuhi kualitas (paket)
 Z : Jumlah paket PUPR yang sudah selesai (paket)

2. Persentase Kenaikan Tingkat Tertib Penyelenggaraan Konstruksi (b_2)

“Persentase Kenaikan Tingkat Tertib Penyelenggaraan Konstruksi” merupakan indikator sasaran kegiatan dari sasaran kegiatan “Peningkatan Penerapan Manajemen Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Tertib Pengadaan dan Administrasi Kontrak” berupa target yang akan diwujudkan dari kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Realisasi indikator sasaran kegiatan 2 (b_2) merupakan hasil kinerja yang dilaksanakan oleh Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi melalui kegiatan Monitoring & Pendampingan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Kegiatan tersebut merupakan bagian kegiatan pengawasan untuk mendapatkan gambaran profil penerapan tertib penyelenggaraan konstruksi di Pihak Pengguna Jasa pada level Organisasi Teknis/Satuan Kerja (Satker) dengan target pembinaan satker unit organisasi fisik (Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Penyediaan Perumahan) Kementerian PUPR yaitu sebesar 782 Satker. Yang dimaksud tertib dalam hal ini adalah satker yang memiliki nilai >60 dalam pengumpulan data melalui daftar simak dalam aplikasi SPIM (Sistem Pengendalian Internal Mandiri). Kenaikan tertib penyelenggaraan konstruksi diukur melalui metode skoring MPP yang menggunakan indikator pada Daftar Simak dengan parameter substansinya antara lain: Pengadaan Barang Jasa, Kontrak Konstruksi, Konstruksi Berkelanjutan/SMK3, dan SMM dengan total 56 indikator MPP (171 sub-indikator).

Kenaikan tingkat tertib penyelenggaraan konstruksi diperoleh dalam bentuk persentase dengan cara membandingkan jumlah satker baru yang tertib penyelenggaraan pada tahun ini dengan jumlah target satker pembinaan yaitu satker unit organisasi fisik sebanyak 782 satker. Sehingga persentase kenaikan tingkat tertib penyelenggaraan konstruksi diperoleh berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

$$b_2 = \frac{B_n}{Z} \times 100\%$$

Keterangan:

- b_2 : Persentase Kenaikan tingkat tertib penyelenggaraan konstruksi (%)
 B_n : Jumlah Satker Baru Tertib Penyelenggaraan pada tahun ini
 Z : Jumlah Satker Fisik di Kementerian PUPR (782 Satker)

3. Persentase Kenaikan BUJK Berkinerja Baik (b_3)

“Persentase Kenaikan BUJK Berkinerja Baik” merupakan indikator sasaran kegiatan dari sasaran kegiatan “Peningkatan Persentase Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) yang Berkinerja Baik dan Peningkatan Utilitas Produk Unggulan” berupa target yang akan diwujudkan dari kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi.

Realisasi indikator sasaran kegiatan 3 (b_3) merupakan hasil kinerja yang dilaksanakan oleh Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi berupa persentase kenaikan BUJK menjadi berkualifikasi besar.

Kenaikan BUJK berkinerja baik diperoleh dalam bentuk persentase dengan cara membandingkan peningkatan jumlah BUJK berkualifikasi B2 pada tahun ini dari tahun sebelumnya dengan baseline jumlah BUJK berkualifikasi B2 di tahun 2014. Berdasarkan pada data LPJKN pada tahun 2014, terdapat 139 BUJK berkualifikasi B2. Sehingga persentase kenaikan BUJK berkinerja baik diperoleh berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

$$b_3 = \frac{C_n - C_{n-1}}{Z} \times 100\%$$

Keterangan:

- b_3 : Persentase Kenaikan BUJK Menjadi Berkualifikasi Besar (%)
 C_n : Jumlah BUJK Berkualifikasi B2 pada tahun ini
 C_{n-1} : Jumlah BUJK Berkualifikasi B2 pada tahun sebelumnya
 Z : Baseline Jumlah BUJK Berkualifikasi B2 tahun 2014 (139 BUJK)

4. Persentase Kenaikan Tingkat Utilitas Produk Unggulan (b_4)

“Persentase Kenaikan Tingkat Utilitas Produk Unggulan” merupakan indikator sasaran kegiatan dari sasaran kegiatan “Peningkatan Persentase Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) yang Berkinerja Baik dan Peningkatan Utilitas Produk Unggulan” berupa target yang akan diwujudkan dari kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi.

Realisasi indikator sasaran kegiatan 4 (b_4) merupakan hasil kinerja yang dilaksanakan oleh Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi berupa persentase kenaikan kapasitas produksi beton pracetak.

Kenaikan tingkat utilitas produk unggulan diperoleh dalam bentuk persentase dengan cara membandingkan peningkatan kapasitas produksi beton pracetak pada tahun ini dari tahun sebelumnya dengan jumlah total penggunaan beton pada tahun 2014 yaitu 136,97 juta ton (berdasarkan data AP3I (Asosiasi Perusahaan Pracetak dan Prategang Indonesia)). Sehingga persentase kenaikan tingkat utilitas produk unggulan diperoleh berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

$$b_4 = \frac{D_n - D_{n-1}}{Z} \times 100\%$$

Keterangan:

- b_4 : Persentase Kenaikan Tingkat Utilitas Produk Unggulan (%)
 D_n : Jumlah Kapasitas Produksi Beton Pracetak pada tahun ini (juta ton)
 D_{n-1} : Jumlah Kapasitas Produksi Beton Pracetak pada tahun sebelumnya (juta ton)
 Z : Jumlah Total Penggunaan Beton tahun 2014 (136,97 juta ton)

5. Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi (b_5)

“Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi” merupakan indikator sasaran kegiatan dari sasaran kegiatan “Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi” berupa target yang akan diwujudkan dari kegiatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi.

Realisasi indikator sasaran kegiatan 5 (b_5) merupakan hasil kinerja yang dilaksanakan oleh Direktorat Kerjasama dan Pemberdayaan melalui Balai Jasa konstruksi Wilayah, Balai Material dan Peralatan Konstruksi, dan Balai Penerapan Teknologi Konstruksi berupa persentase peningkatan jumlah angkatan fasilitasi pemberdayaan jasa konstruksi. Peningkatan kerjasama dan pemberdayaan jasa konstruksi ditandai dengan peningkatan jumlah angkatan yang terfasilitasi

pemberdayaan jasa konstruksi melalui kegiatan pelatihan dan uji sertifikasi yang diselenggarakan oleh Balai-Balai di lingkungan Ditjen Bina Konstruksi. Jumlah angkatan tersebut dapat dilihat melalui sistem aplikasi DAYANAKER berupa jumlah tenaga kerja yang mengikuti kegiatan pelatihan dan uji sertifikasi. Jumlah tenaga kerja terfasilitasi tersebut kemudian dikonversikan ke dalam satuan angkatan dengan asumsi 1 angkatan terdiri dari 20 tenaga kerja terfasilitasi.

Kenaikan kerjasama dan pemberdayaan jasa konstruksi diperoleh dalam bentuk persentase dengan cara membandingkan jumlah angkatan yang terfasilitasi pemberdayaan jasa konstruksi tahun ini dengan jumlah target angkatan berdasarkan renstra kementerian PUPR 2015-2019 yaitu sebanyak 7.662 angkatan. Sehingga persentase kenaikan kerjasama dan pemberdayaan konstruksi diperoleh berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

$$b_5 = \frac{E_n}{Z} \times 100\%$$

Keterangan:

- b_5 : Persentase Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi (%)
- E_n : Jumlah Fasilitas Pemberdayaan Jasa Konstruksi pada tahun ini (Angkatan)
- Z : Jumlah Target Total Fasilitas Pemberdayaan Jasa Konstruksi 2015-2019 (7.662 Angkatan)

6. Persentase Kenaikan SDM Penyedia Jasa Konstruksi yang Kompeten (b_6)

“Persentase Kenaikan SDM Penyedia Jasa Konstruksi yang Kompeten” merupakan indikator sasaran kegiatan dari sasaran kegiatan “Peningkatan Sumber Daya Manusia Penyedia Jasa Konstruksi yang Kompeten” berupa target yang akan diwujudkan dari kegiatan Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi.

Realisasi indikator sasaran kegiatan 6 (b_6) merupakan hasil kinerja yang dilaksanakan oleh Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi dan balai-balai pelatihan di lingkungan Ditjen Bina Konstruksi berupa persentase peningkatan penambahan SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten.

Kenaikan SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten diperoleh dalam bentuk persentase dengan membandingkan jumlah pemohon sertifikasi pada tahun ini dengan jumlah tenaga kerja konstruksi yang tidak kompeten/bersertifikat pada tahun 2014 sebanyak 2.754.160 orang (Berdasarkan data BPS). Sehingga persentase kenaikan kerjasama dan pemberdayaan konstruksi diperoleh berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

$$b_6 = \frac{F_n}{Z} \times 100\%$$

Keterangan:

- b_5 : Persentase kenaikan SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten (%)
 F_n : Jumlah penambahan TKK Kompeten/Bersertifikat pada tahun ini (orang)
 Z : Jumlah Ideal TKK Kompeten/Bersertifikat (2.754.160 orang)

Baseline untuk masing-masing sasaran kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Tabel dan Baseline Sasaran Kegiatan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	BASELINE TAHUN 2014	SUMBER
1	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi	Tingkat Kualitas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi	Merupakan sasaran kegiatan baru dengan baseline di Tahun 2014 adalah 0	Dit. Pengadaan Jasa Konstruksi
2	Peningkatan Penerapan Manajemen Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Tertib Pengadaan dan Administrasi Kontrak	Persentase Kenaikan Tingkat Tertib	Indikator tertib penyelenggaraan melalui penetapan lelang, administrasi kontrak, konstruksi berkelanjutan, dan manajemen mutu terdapat 218 proyek tertib penyelenggaraan	Dit. Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
3	Peningkatan Persentase Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) yang Berkinerja Baik dan Peningkatan Utilitas Produk Unggulan	Persentase Kenaikan BUJK Berkinerja Baik	Berdasarkan data LPJK tahun 2014, terdapat 139 BUJK kualifikasi B2	LPJKN
		Persentase Kenaikan Tingkat Utilitas Produk Unggulan	Volume penggunaan beton pracetak terhadap beton adalah sebesar 15%	AP3I
4	Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Merupakan sasaran kegiatan baru dengan baseline di Tahun 2014 adalah 0	Dit. Kerja Sama dan Pemberdayaan
5	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penyedia Jasa Konstruksi yang Kompeten	Persentase Kenaikan SDM Penyedia Jasa Konstruksi yang Kompeten	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah SDM konstruksi sebanyak 6.885.401 orang Rasio yang diharapkan adalah 40% Skilled Labour : 60% Unskilled Labour Jumlah SDM penyedia jasa konstruksi Skilled Labour adalah 166.247 orang (6,04%). 	LPJKN

Sumber: Revisi Renstra Ditjen Bina Konstruksi 2015-2019

2.4 Target Tahun Ini Menurut Renstra

Target Direktorat Jenderal Bina Konstruksi tahun 2019 ditetapkan pada Revisi Renstra 2015-2019. Ditjen Bina Konstruksi memiliki satu program utama yaitu Program Pembinaan Konstruksi. Target yang ditetapkan untuk dicapai pada Tahun 2019 berdasarkan Revisi Renstra Kementerian PUPR 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Target Sasaran Program Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Tahun 2015-2019

SASARAN KINERJA	SATUAN	HASIL REVISI RENSTRA				
		CAPAIAN				PERKIRAAN CAPAIAN
		2015	2016	2017	2018	2019
PROGRAM PEMBINAAN KONSTRUKSI						
1	SP1. Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional					
ISP1. Tingkat Pengendalian Pelaksanaan Konstruksi Nasional	%	80.87	90.44	90	90	90

Sumber: Revisi Renstra Kementerian PUPR 2015-2019

Berdasarkan tabel 5, target sasaran program pembinaan konstruksi di tahun 2019 adalah 90%. Pencapaian program pembinaan konstruksi didukung oleh pencapaian sasaran kegiatannya. Berikut merupakan target sasaran kegiatan sebagai pendukung program pembinaan konstruksi beserta dengan indikator kinerja kegiatan berdasarkan Revisi Renstra Kementerian PUPR 2015-2019:

Tabel 7. Target Sasaran Kegiatan Ditjen Bina Konstruksi Tahun 2015-2019

SASARAN KINERJA	SATUAN	HASIL REVISI RENSTRA					TOTAL CAPAIAN
		CAPAIAN				PERKIRAAN CAPAIAN	
		2015	2016	2017	2018	2019	
KEGIATAN							
1	SK1. Peningkatan Investasi Infrastruktur dan Pasar Konstruksi						
ISK1. Tingkat Rasio Kapitalisasi Konstruksi	%	12.77	12.18	29.27	33.99	0	88
OUTPUT KEGIATAN (SK 1)							
<i>1) Layanan Pembinaan Investasi Infrastruktur dan Pasar Konstruksi</i>							
a. Jumlah Draft NSPK Pembinaan Investasi Infrastruktur dan Pasar Konstruksi	Draft NSPK	4	4	5	5	0	18
b. Jumlah Profil Pembinaan Investasi Infrastruktur dan Pasar Konstruksi	Draft Profil	4	5	4	3	0	16
2	SK1. Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi						

SASARAN KINERJA	SATUAN	HASIL REVISI RENSTRA						TOTAL CAPAIAN
		CAPAIAN				PERKIRAAN CAPAIAN		
		2015	2016	2017	2018	2019		
ISK1. Tingkat Kualitas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi	%	0	0	0	0	70	70	
OUTPUT KEGIATAN (SK 1)								
<i>1) Pembinaan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi</i>								
a. Profil Kualitas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi	Profil	0	0	0	0	1	1	
<i>2) Pembinaan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi</i>								
a. Rata-rata Waktu Layanan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi	Hari	0	0	0	0	125	125	
3 SK2. Peningkatan Penerapan Manajemen Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Tertib Pengadaan dan Administrasi Kontrak								
ISK2. Persentase Kenaikan Tingkat Tertib Penyelenggaraan Konstruksi	%	4.13	5.94	8.31	11	11	40	
OUTPUT KEGIATAN (SK 2)								
<i>1) Layanan Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi</i>								
a. Jumlah Draft NSPK Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi	Draft NSPK	7	7	7	13	8	42	
b. Jumlah Profil Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi	Draft Profil	5	5	5	5	5	25	
4 SK3. Peningkatan Persentase Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) yang berkinerja baik dan Peningkatan Utilitas Produk Unggulan								
ISK3.1. Persentase Kenaikan BUJK yang Berkinerja Baik	%	32.37	25.18	115.83	64,75	11	184	
OUTPUT KEGIATAN (SK 3)								
<i>1) Layanan Pembinaan Kelembagaan dan Usaha Jasa Konstruksi</i>								
a. Jumlah Draft NSPK Pembinaan Kelembagaan dan Usaha Jasa Konstruksi	Draft NSPK	2	4	4	6	9	25	
b. Jumlah Profil Pembinaan Kelembagaan dan Usaha Jasa Konstruksi	Draft Profil	4	4	4	4	5	21	
ISK3.2. Persentase Kenaikan Tingkat Utilitas Produk Unggulan	%	1.06	1.86	4.69	1.88	5.55	15	
OUTPUT KEGIATAN (SK 3)								
<i>2) Layanan Pembinaan Rantai Pasok dan Produksi Produk Unggulan</i>								
a. Jumlah Draft NSPK Pembinaan Rantai Pasok dan Produksi Produk Unggulan	Draft NSPK	0	4	4	6	6	20	

SASARAN KINERJA	SATUAN	HASIL REVISI RENSTRA						TOTAL CAPAIAN
		CAPAIAN				PERKIRAAN CAPAIAN		
		2015	2016	2017	2018	2019		
b. Jumlah Profil Pembinaan Rantai Pasok dan Produksi Produk Unggulan	Draft Profil	4	4	4	4	4	20	
4 SK4. Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi								
ISK4. Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	%	16.11	28.48	24.64	66.21	24	159	
OUTPUT KEGIATAN (SK 4)								
<i>1) Fasilitasi Pemberdayaan Jasa Konstruksi</i>								
a. Jumlah Fasilitasi Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Angkatan	1,234	2,182	1,888	5,073	1,842	12,219	
<i>2) Layanan Kerja Sama Lembaga Pemerintah dan Masyarakat Serta Pemberdayaan Jasa Konstruksi</i>								
a. Jumlah Draft NSPK Kerja Sama Lembaga Pemerintah dan Masyarakat Serta Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Draft NSPK	3	1	2	2	1	9	
b. Jumlah Profil Kerja Sama Lembaga Pemerintah dan Masyarakat Serta Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Profil	3	4	4	4	4	19	
5 SK5. Peningkatan Sumber Daya Manusia Penyedia Jasa Konstruksi yang Kompeten								
ISK5. Persentase Kenaikan SDM Penyedia Jasa Konstruksi yang Kompeten	%	6.79	7.44	6.75	9,05	4	24.98	
OUTPUT KEGIATAN (SK 5)								
<i>1) Layanan Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi</i>								
a. Jumlah Draft NSPK Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	Draft NSPK	32	31	38	40	38	179	
b. Jumlah Profil Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	Draft Profil	4	3	4	4	6	21	
6 SK6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya								
ISK6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Layanan	5	4	5	5	6	25	
OUTPUT KEGIATAN (SK 6)								
<i>1) Layanan Dukungan Manajemen Eselon I</i>								
a. Jumlah Layanan Manajemen	Layanan	3	2	3	3	4	15	
<i>2) Layanan Internal (Overhead)</i>								
a. Jumlah Layanan Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5	
<i>3) Layanan Perkantoran</i>								

SASARAN KINERJA	SATUAN	HASIL REVISI RENSTRA					
		CAPAIAN				PERKIRAAN CAPAIAN	TOTAL CAPAIAN
		2015	2016	2017	2018	2019	
a. Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5
<i>4) Layanan Dukungan Manajemen Satker</i>							
a. Jumlah Layanan Kesatkeran	Layanan	0	0	0	0	1	1

Sumber: Revisi Renstra Kementerian PUPR 2015-2019

BAB 3 KAPASITAS ORGANISASI

3.1 Sumber Daya Manusia

Total Pegawai Negeri Sipil (PNS) Ditjen Bina Konstruksi pada akhir Tahun 2019 adalah 1.641 orang. Jumlah PNS mengalami peningkatan yang sangat signifikan sebanyak 655 orang dari tahun lalu karena terbentuknya 34 Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi. Sementara itu beban kerja Ditjen Bina Konstruksi terus bertambah dengan adanya tugas dan fungsi tambahan di Tahun 2019 serta jumlah anggaran yang meningkat. Untuk membantu menjalankan tugas sehari-hari, Ditjen Bina Konstruksi merekrut pegawai non pns sebanyak 360 orang yang terdiri dari 190 pegawai dengan jabatan administrasi dan 169 pegawai non substansi yang tersebar di 49 satuan kerja. Selain itu, Ditjen Bina Konstruksi merekrut 162 orang Tenaga Pendukung Individu. Tenaga Pendukung Individu adalah tenaga sub professional yang dikontrak secara individu melalui akun belanja jasa lainnya dengan tugas membantu administrasi pelaksanaan kegiatan. Selain itu terdapat sebanyak 87 CPNS yang ditempatkan di DJBK. Adapun detail pegawai pada setiap unit kerja adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Jumlah Pegawai Ditjen Bina Konstruksi per Unit Kerja

UNIT KERJA	PNS	NON PNS		TENAGA PENDUKUNG INDIVIDU	CPNS	JUMLAH
		JABATAN ADMINISTRASI	NON SUBSTANSI			
Setditjen Bina Konstruksi	52	8	16	24	15	99
Dit. Pengadaan Jasa Konstruksi	34	3	7	12	15	56
Dit. Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	40	4	8	26	9	78
Dit. Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi	33	13	9	12	9	68
Dit. Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	29	23	20	15	7	87
Dit. Kerja Sama dan Pemberdayaan	29	8	7	13	7	57
TOTAL PUSAT	216	59	67	102	62	444
Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Banda Aceh	9	10	2	4	-	25
Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang	7	8	5	14	-	34
Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta	9	17	4	5	5	35
Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya	25	9	18	-	-	52
Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin	8	14	11	3	-	36
Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar	11	8	17	6	-	42
Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura	11	3	10	9	-	33
Balai Material dan Peralatan Konstruksi	11	12	22	3	3	49
Balai Penerapan Teknologi Konstruksi	12	9	6	16	2	43
Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi	713	41	7	-	15	761
TOTAL BALAI	816	131	102	60	25	1.109
GRAND TOTAL	1.033	190	169	162	87	1.641

Sumber: Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (2019)

Total pegawai non PNS dan Tenaga Pendukung Individu hampir seimbang dengan jumlah PNS, bahkan di 10 Satuan Kerja yaitu Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, BJKW I Aceh, BJKW II Palembang, BJKW III Jakarta, BJKW IV Surabaya, BJKW V Banjarmasin, BJKW VI Makassar, BJKW VII Jayapura, Balai MPK, dan Balai PTK memiliki jumlah pegawai non PNS dan Tenaga Pendukung Individu yang lebih banyak dibanding dengan pegawai PNS. Adapun sebaran pegawai terbanyak adalah di Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi karena pegawai tersebut ditempatkan di Balai/Satuan Kerja di 34 provinsi di Indonesia untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa konstruksi Kementerian PUPR.

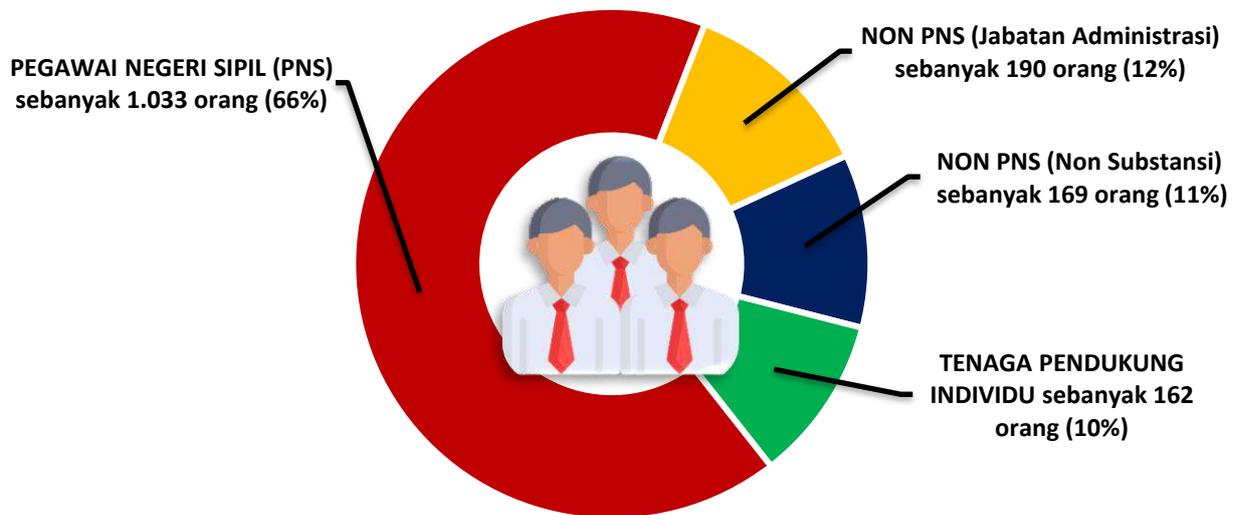


Diagram 6. Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Sumber: Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (2019)

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah pegawai Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Tahun 2019 didominasi oleh pegawai pria dengan selisih 738 pegawai antara pegawai pria dan wanita. Dari seluruh pegawai yang ada, terdapat 74% pegawai laki-laki atau sebanyak 1.146 orang dan 26% pegawai perempuan atau sebanyak 408 orang. Adapun komposisi perbandingan antara jumlah PNS pria dan wanita Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada diagram dibawah ini.

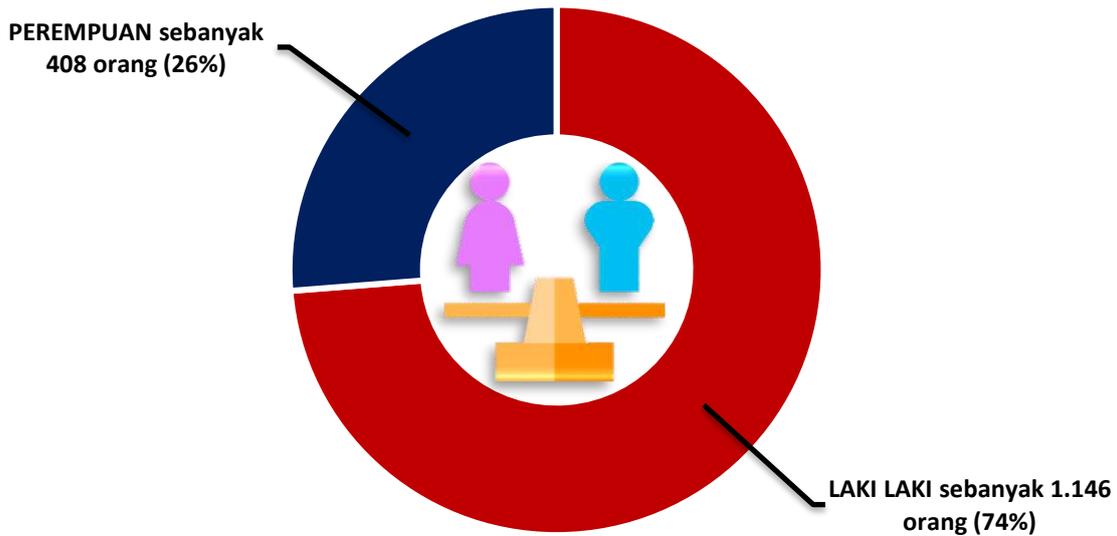


Diagram 7. Jumlah Pegawai Berdasarkan Gender

Sumber: Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (2019)

Pegawai Ditjen Bina Konstruksi didominasi oleh golongan III yaitu 811 orang, diikuti golongan IV yaitu 114 orang dan golongan II yaitu 108 orang. Hal tersebut menunjukkan bahwa Ditjen Bina Konstruksi mayoritas diisi oleh SDM muda yang berkualitas pendidikan tinggi karena minimal memiliki ijazah S1 untuk mencapai golongan III saat awal perekrutan. Pegawai senior atau yang berada pada golongan IV di lingkungan Ditjen Bina Konstruksi semakin berkurang jumlahnya karena banyak pegawai yang memasuki usia pensiun.

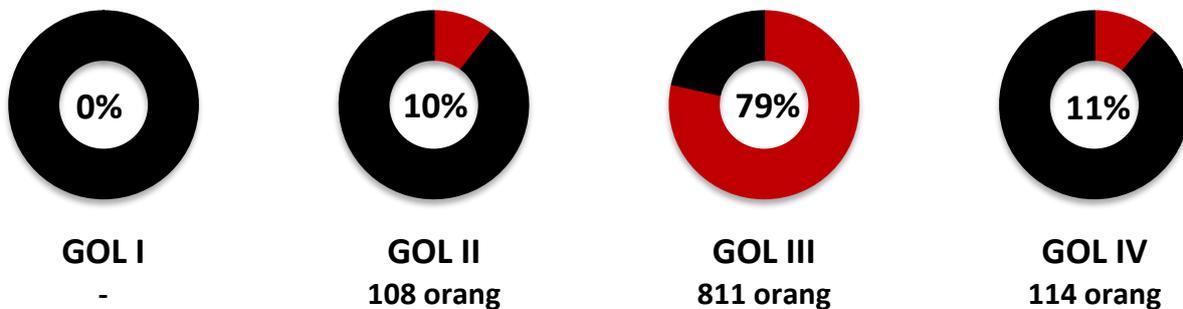


Diagram 8. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Sumber: Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (2019)

Pegawai Ditjen Bina Konstruksi jika dilihat dari segi jabatan maka untuk jabatan Eselon IV terdapat sebanyak 116 orang, sedangkan untuk golongan eselon III sebanyak 66 orang, dilanjutkan dengan eselon II sebanyak 5 orang dan eselon I 1 orang. Sedangkan untuk jabatan staff di lingkungan Ditjen Bina Konstruksi sebanyak 844 orang yang terdiri dari 76 Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) dan 769 orang Jabatan Fungsional Umum (JFU).



Diagram 9. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

Sumber: Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (2019)

Proporsi pegawai Ditjen Bina Konstruksi dengan tingkat pendidikan SLTA atau di bawahnya masih cukup tinggi yaitu 22% atau sebanyak 336 orang. Namun sudah menurun dibandingkan tahun lalu (40%). Guna meningkatkan kualitas SDM Ditjen Bina Konstruksi yang profesional dan kompeten, pendekatan rekrutmen pegawai telah diubah dengan menetapkan batas latar belakang pendidikan secara umum adalah D3, S1, dan S2. Hal tersebut terbukti dengan jumlah pegawai dengan kategori D1 s.d. S2 mencapai 78% atau lebih dari separuh pegawai Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Bahkan terdapat 9 pegawai yang telah bergelar doctor (S3).

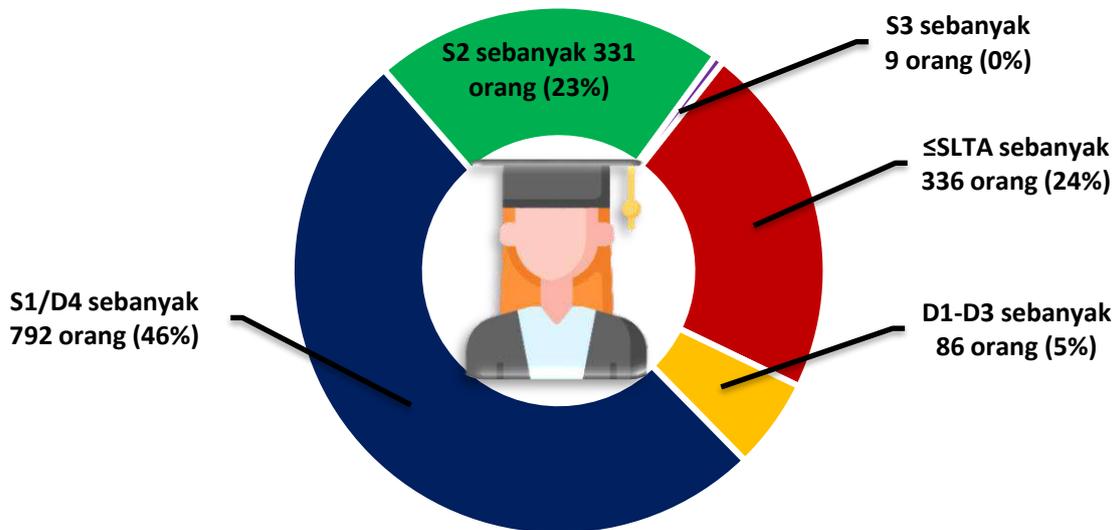


Diagram 10. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Sumber: Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (2019)

Ditjen Bina Konstruksi dikelola oleh SDM yang berada dalam usia produktif dan berpengalaman (usia 31-50 tahun) yaitu sebanyak 951 pegawai atau 68%. Sementara usia yang akan memasuki masa pensiun (≥ 50 tahun) yaitu sebanyak 251 pegawai atau 18%. Adapun pegawai muda (20-30 tahun) sebanyak 190 pegawai atau 14%, yang tentunya masih membutuhkan banyak pengalaman serta peningkatan kompetensi bidang PUPR. Berikut merupakan sebaran pegawai Ditjen Bina Konstruksi berdasarkan usia:

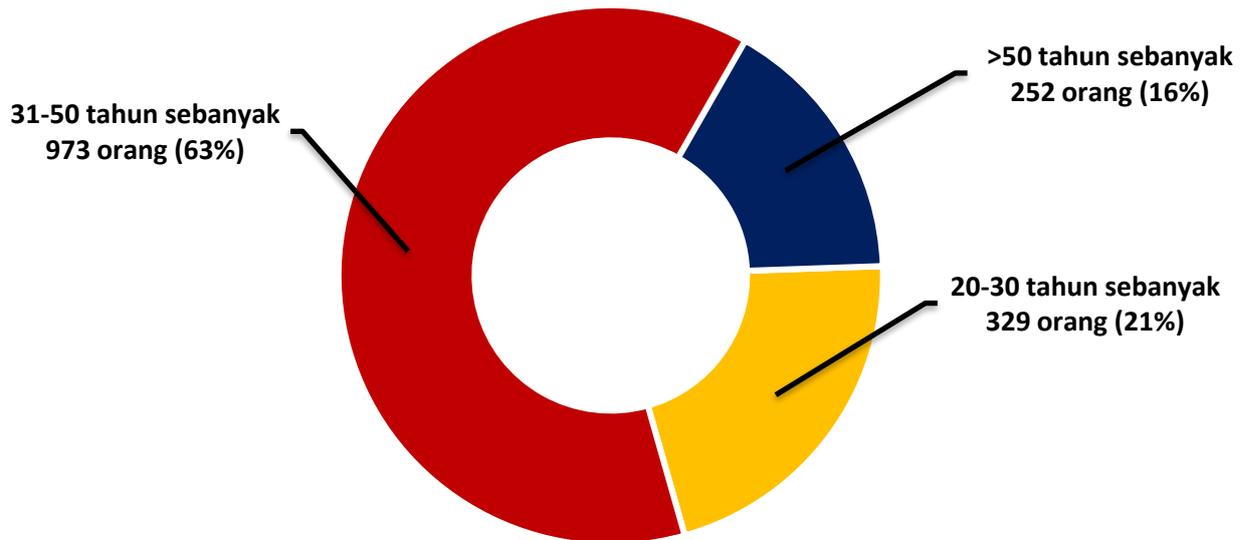


Diagram 11. Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia

Sumber: Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (2019)

Dalam memanfaatkan sumber daya tersebut, penyusunan **indikator kinerja individu telah diselaraskan dengan indikator kinerja organisasi** sehingga dapat terciptanya pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien. Hal ini dikarenakan pengukuran outcome saja tanpa pengendalian kinerja tidak akan mengkomunikasikan bagaimana outcome tersebut dapat dicapai atau diperoleh. Salah satu metode pengukuran kinerja terintegrasi adalah metode *Balanced Scorecard*. *Balanced Scorecard* adalah sekumpulan ukuran kinerja yang mencakup 4 perspektif yaitu: perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses internal dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Keempat perspektif tersebut berkaitan antara satu dengan yang lain. Hubungan antara keempat perspektif digambarkan sebagai suatu kesatuan sebagaimana digambarkan pada gambar sebagai berikut:

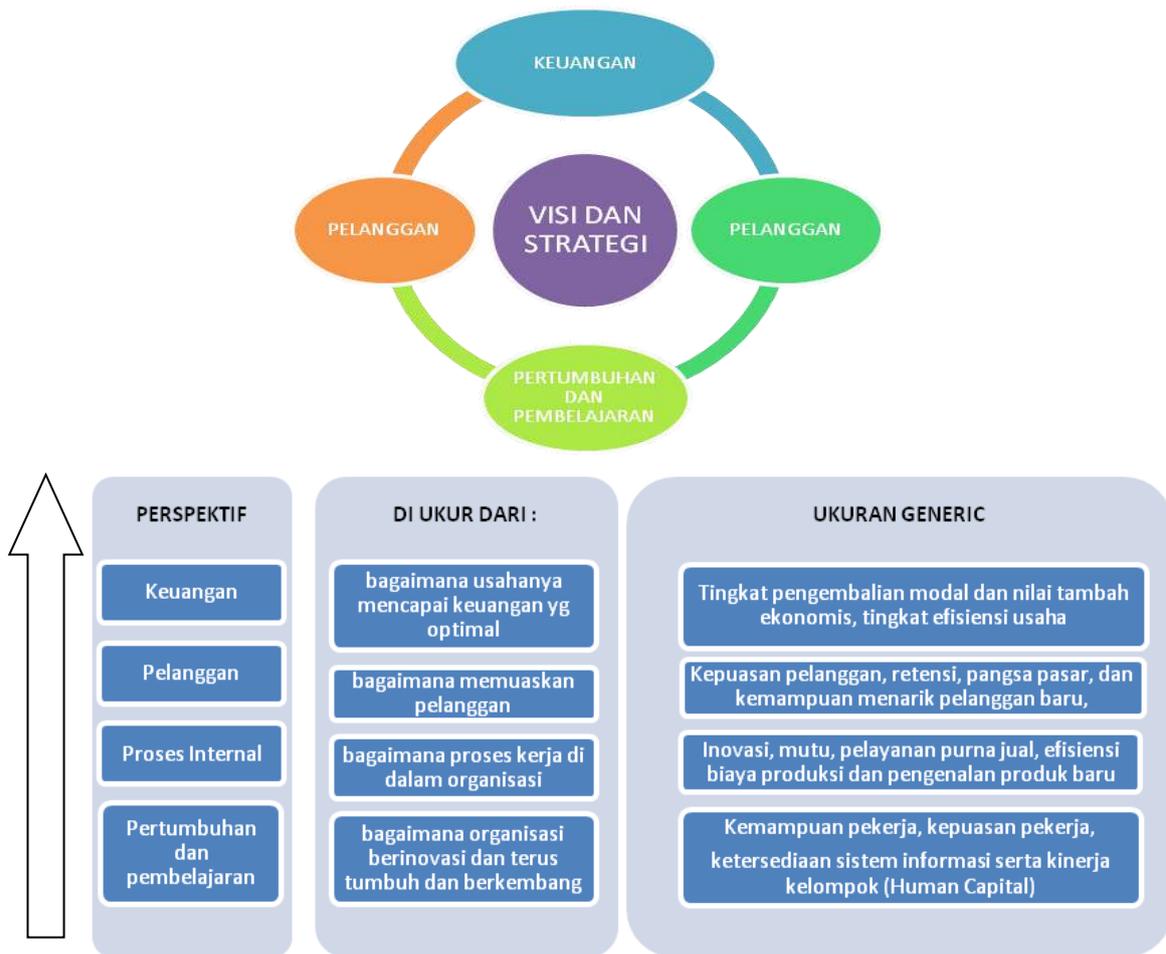


Diagram 12. Hubungan Empat Perspektif *Balanced Scorecard*

Sumber: Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (2019)

3.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan fasilitasi pendukung dalam pelaksanaan kegiatan di organisasi, Instansi atau perkantoran dalam meningkatkan produktivitas kerja suatu organisasi. Pengertian sarana dan prasarana dalam suatu organisasi dan instansi perkantoran merupakan proses pendukung aktivitas yang dilaksanakan dalam kegiatan organisasi dan instansi perkantoran.

Sarana dan prasarana merupakan pendorong untuk meningkatkan kinerja pegawai, agar terorganisir sehingga bisa tercapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan kegiatan yang baik perlu ditunjang fasilitas yang memadai sebagai bagian dari proses meningkatkan kinerja dan mengerjakan seluruh kegiatan dengan tepat.

Sarana dan Prasarana Ditjen Bina Konstruksi meliputi semua Barang Milik Negara (BMN) yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Yang dimaksud dengan perolehan lainnya yang sah antara lain:

- Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau
- Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap.

Klasifikasi BMN berdasarkan KepMenKeu No. 532/KM.6/2015 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

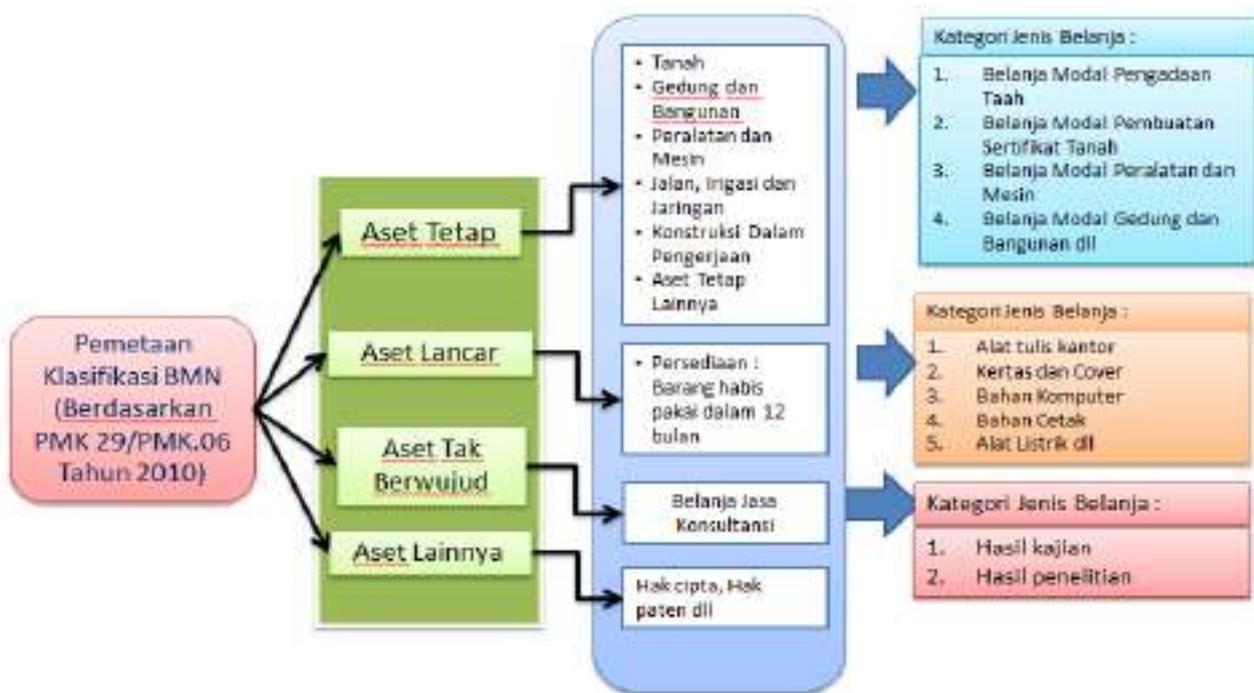


Diagram 13. Pemetaan Klasifikasi Barang Milik Negara

Sumber: Bagian Keuangan dan Umum (2019)

Salah satu aset sarana yang dimiliki oleh Ditjen Bina Konstruksi adalah bangunan kantor yang digunakan selama ini. Adapun luasan bangunan dan tanah keseluruhan aset Ditjen Bina Konstruksi tertera pada tabel di bawah ini:

Tabel 9. Luas Tanah Bangunan Kantor Ditjen Bina Konstruksi

NO	UNIT KERJA	LUAS TANAH (m ²)	LUAS BANGUNAN (m ²)	KETERANGAN
1	Sekretariat Ditjen Bina Konstruksi	1.428	939,8	Gedung Utama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2	Dit Bina Investasi Infrastruktur	1.428	814,7	
3	Dit Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	1.428	814,7	
4	Dit Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi	1.428	675	
5	Dit Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	-	1.400	Tanah milik BPSDM dan Bangunan milik DBKPK
6	Dit. Kerja Sama dan Pemberdayaan	802	802	Tanah dan Bangunan milik Ditjen Bina Marga
7	Balai PTK	-	240	Tanah milik BPSDM dan Bangunan milik DBKPK
8	Balai MPK	73.345	2.304	Tanah dan Bangunan milik BMPK
9	BJKW I Banda Aceh	8.000	756	Tanah milik Univ. Syiah Kuala dan Bangunan milik BJKW I Banda Aceh
10	BJKW II Palembang	5.345	682	Tanah milik Pemkot Palembang dan Bangunan milik BJKW II Palembang
11	BJKW III Jakarta	-	-	Tanah dan Bangunan milik BMPK
12	BJKW IV Surabaya	23.879	2.250	Tanah dan Bangunan milik BJKW IV Surabaya
13	BJKW V Banjarmasin	2.100	625	Tanah milik Ditjen SDA (Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Kalimantan II) dan Bangunan milik BJKW V Banjarmasin
14	BJKW VI Makassar	15.000	1.520	Tanah milik Pemprov Sulawesi Selatan dan Bangunan milik BJKW VI Makassar
15	BJKW VII Jayapura	6.054	3.070	Tanah milik Ditjen Bina Marga (Satuan Kerja Balai BPJN X) dan Bangunan milik BJKW VII Jayapura

Sumber: Bagian Keuangan dan Umum (2019)

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa aset tanah yang merupakan milik Ditjen Bina Konstruksi adalah yang saat ini ditempati oleh Balai Material dan Peralatan Konstruksi Balai Pembinaan Konstruksi Wilayah IV Surabaya dengan luas total 97.224 m². Adapun luas bangunan dan tanah milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan diurus oleh Biro Umum dan ditempati oleh Satker Pusat (Setditjen BK, Dit 1, Dit 2 dan Dit 3) masing-masing seluas 3.244,2 m² dan 5.712 m². Sebagian besar unit kerja di lingkungan Ditjen Bina Konstruksi terutama yang berdomisili di daerah, masih meminjam-pakai tanah dan bangunan milik unit kerja lain seperti milik Ditjen Bina Marga, Ditjen SDA, Universitas Syahkuala, Pemkot Palembang dan Pemprov Sulsel dengan total luas bangunan 5.160 m² dan luas tanah 36.449 m². Dapat disimpulkan bahwa lebih dari 50% luas bangunan yang ditempati unit kerja Ditjen Bina Konstruksi masih dalam status pinjam-pakai.

Adapun secara detail aset-aset Tanah dan Bangunan Ditjen Bina Konstruksi yang mendukung tugas dan fungsi organisasi sebagai pembina jasa konstruksi khususnya dalam hal pelatihan tenaga kerja konstruksi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 10. Detail Aset Bangunan Milik Ditjen Bina Konstruksi

ASET	LUAS (m²)	KETERANGAN
Dit. Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi		
Mess/Wisma	1.128	8 Mess masing-masing seluas 141 m ²
Penunjang	1.190	Garasi 720 m ² Garasi 450 m ² Rumah Genset 20 m ²
BJKW I Banda Aceh		
Bengkel/Hanggar	1.964	Workshop Carpentry 756 m ² Workshop Concrete & Plumbing 756 m ²
Penunjang	715	Penampungan / tower air 9m ² Tempat Parkir 56m ² Tempat Parkir 100m ² Taman 400m ² Gudang Material 150m ²
BJKW III Jakarta		
Bengkel/Hanggar	4.289	Workshop Plumbing 204m ² Workshop Batu 700m ² Workshop Plumbing 1.400m ² Workshop Batu 200m ² Workshop Las 985m ² Workshop Kayu 800m ²
Penunjang	364	Dapur
BJKW IV Surabaya		
Gedung Pendidikan & Lab	13.389	Workshop Las (698m ²) Workshop Kayu (535m ²) Workshop Batu (535m ²) Workshop Plumbing (9.858m ²) Workshop Rekayasa Gambar (1.763m ²)
Mess/Wisma	3.161	Mess 1.773m ² Mess 1.388m ²
Rumah Negara	2.588	Gol. I Tipe A 669m ² Gol. I Tipe A 669m ² Gol. II Tipe B 250m ²
Penunjang	1.525	Pos Jaga 36m ² Garasi 36m ² Tempat Parkir 840m ² Tempat Kerja Lainnya 43m ² Tempat Kerja Lainnya 43m ² Tempat Kerja Lainnya 43m ² Tempat Kerja Lainnya 43m ² Tempat Kerja Lainnya 371m ² Tempat Kerja Lainnya 16m ² Tempat Kerja Lainnya 54m ²
BJKW VI Makassar		
Bengkel/Hanggar	1.350	Workshop Batu, Kayu, Las dan Plumbing

ASET	LUAS (m ²)	KETERANGAN
Mess/Wisma	980	Mess
Penunjang	34	Rumah Genset
BJKW VII Jayapura		
Bengkel/Hanggar	648	Workshop Batu, Kayu, Las dan Plumbing
Mess/Wisma	728	Kantor & Mess
Penunjang	80	Rumah Genset
Balai MPK		
Bengkel/Hanggar	3.264	Workshop Mekanik (1.632m ²) Workshop Alat Berat (1.632m ²)
Gedung Pendidikan & Lab	2.620	Indor Training Ground 830m ² Indor Training Ground 830m ² Workshop AMP/CBP 800m ² Laboratorium Metalurgi 160m ²
Mess/Wisma	218	Mess Peserta 142m ² Mess Instruktur 76m ²
Penunjang	2.064	Gudang Seng 108m ² Bangunan Genset AMP 90m ² Stock Pile AMP 40m ² Masjid 60m ² Aula 500m ² Pos Satpam 8m ² Kolam Penampung 308m ² Tower Air 50m ² Lobby Mess 264m ²

3.3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Pagu awal Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2019 sebesar Rp558.160.700.000,-. Kemudian Ditjen Bina Konstruksi mendapat pagu tambahan untuk menutup kekurangan belanja pegawai dan mendapat pagu tambahan (insentif) sebesar Rp15.200.000.000,- yang diperuntukan belanja modal sarana dan prasarana Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) di 34 Provinsi, penyelenggaraan pendidikan vokasional sebanyak 5.000 orang serta pemeliharaan Gedung Citeureup. Sehingga pagu akhir Ditjen Bina Konstruksi adalah sebesar Rp594.305.997.000,-.

Tabel 11. Alokasi Pagu Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2019

NO	NAMA SATUAN KERJA	PAGU (RP RIBU)
1	BALAI MPK	103,903,717
2	BALAI PTK	16,873,178
3	BJKW I BANDA ACEH	29,564,216
4	BJKW II PALEMBANG	27,026,985
5	BJKW III JAKARTA	40,504,038
6	BJKW IV SURABAYA	45,456,826
7	BJKW V BANJARMASIN	28,837,107
8	BJKW VI MAKASSAR	33,475,200
9	BJKW VII JAYAPURA	30,000,391
10	BP2JK WILAYAH ACEH	1,072,680

NO	NAMA SATUAN KERJA	PAGU (RP RIBU)
11	BP2JK WILAYAH BALI	1,055,320
12	BP2JK WILAYAH BANGKA BELITUNG	1,202,812
13	BP2JK WILAYAH BANTEN	1,185,330
14	BP2JK WILAYAH BENGKULU	1,151,418
15	BP2JK WILAYAH DI YOGYAKARTA	1,029,700
16	BP2JK WILAYAH DKI JAKARTA	1,104,010
17	BP2JK WILAYAH GORONTALO	1,050,850
18	BP2JK WILAYAH JAMBI	1,050,280
19	BP2JK WILAYAH JAWA BARAT	1,082,710
20	BP2JK WILAYAH JAWA TENGAH	1,030,050
21	BP2JK WILAYAH JAWA TIMUR	1,093,730
22	BP2JK WILAYAH KALIMANTAN BARAT	1,043,800
23	BP2JK WILAYAH KALIMANTAN SELATAN	1,058,870
24	BP2JK WILAYAH KALIMANTAN TENGAH	1,181,784
25	BP2JK WILAYAH KALIMANTAN TIMUR	1,191,888
26	BP2JK WILAYAH KALIMANTAN UTARA	1,191,958
27	BP2JK WILAYAH KEPULAUAN RIAU	1,195,706
28	BP2JK WILAYAH LAMPUNG	1,161,708
29	BP2JK WILAYAH MALUKU	1,181,770
30	BP2JK WILAYAH MALUKU UTARA	1,187,580
31	BP2JK WILAYAH NTB	1,036,070
32	BP2JK WILAYAH NTT	1,034,010
33	BP2JK WILAYAH PAPUA	1,221,600
34	BP2JK WILAYAH PAPUA BARAT	1,207,050
35	BP2JK WILAYAH RIAU	1,070,600
36	BP2JK WILAYAH SULAWESI BARAT	1,169,686
37	BP2JK WILAYAH SULAWESI SELATAN	1,071,920
38	BP2JK WILAYAH SULAWESI TENGAH	1,153,896
39	BP2JK WILAYAH SULAWESI TENGGARA	1,169,860
40	BP2JK WILAYAH SULAWESI UTARA	1,078,020
41	BP2JK WILAYAH SUMATERA BARAT	1,047,780
42	BP2JK WILAYAH SUMATERA SELATAN	1,065,170
43	BP2JK WILAYAH SUMATERA UTARA	1,166,386
44	DIREKTORAT PENGADAAN JASA KONSTRUKSI	23,419,579
45	DIREKTORAT BINA PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI	30,062,150
46	DIREKTORAT BINA KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA JASA KONSTRUKSI	31,556,314
47	DIREKTORAT BINA KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI	31,000,813
48	DIREKTORAT KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN	20,181,232
49	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI	64,448,249
Total		594,305,997

Sumber: e-Monitoring PUPR (2019)

Pagu Direktorat Jenderal Bina Konstruksi sebagian besar adalah untuk belanja barang (73%) sebesar Rp433.862.440.000,- yaitu untuk dukungan kegiatan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi dan layanan pengadaan jasa konstruksi. Sementara persentase belanja pegawai sangat kecil yaitu 12%.

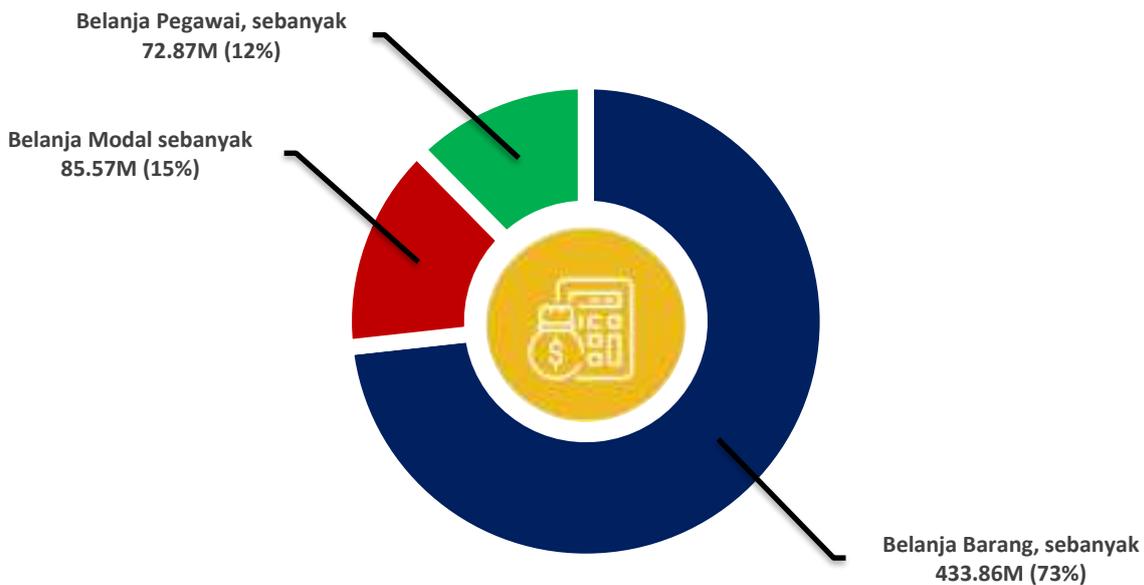


Diagram 14. Komposisi Pagu Berdasarkan Jenis Belanja

Sumber: e-Monitoring PUPR (2019)

Kronologis revisi anggaran Direktorat Jenderal Bina Konstruksi selama TA 2019 adalah sebagai berikut:

DIPA AWAL	REVISI 1	REVISI 2	REVISI 3	REVISI 4
Rp558,16M 5 Desember 2018	Rp558,16M 29 Mei 2019	Rp573,36M 27 Agustus 2019	Rp594,32M 1 November 2019	Rp594,30M 20 Desember 2019

Diagram 15. Kronologis Revisi Anggaran Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2019

Sumber: Bagian Perencanaan dan Evaluasi (2019)

Kronologis revisi anggaran pada Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2019 terdapat pada:

1. P2JK

Sehubungan dengan pembentukan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (P2JK) di 34 Provinsi di Indonesia yang bertugas melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa konstruksi, dilakukan revisi DIPA Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2019 yang pertama dengan melakukan realokasi anggaran dari satker Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi sebesar Rp33,99M pada tanggal 29 Mei 2019.

2. Penambahan Dana Insentif

Berdasarkan kinerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi pada tahun 2018, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mendapat pagu tambahan (insentif) sebesar Rp 15,2M untuk TA 2019 dengan peruntukan sebagai berikut:

- a. Rp4M diperuntukan belanja modal sarana dan prasarana Balai P2JK di 34 Provinsi

- b. Rp10M diperuntukan penyelenggaraan pendidikan vokasional sebanyak 5.000 orang oleh 7 Balai Jasa Konstruksi
- c. Rp1,2M diperuntukan pemeliharaan Gedung Citeureup.

3. Pemenuhan Belanja Pegawai

Sehubungan dengan adanya Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang ditempatkan di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dan beberapa karyawan yang belum teralokasikan pada pagu Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2019, terjadi kekurangan belanja pegawai untuk hampir seluruh satker. Sehingga Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melakukan kembali revisi yang ketiga yang diperuntukan pemenuhan kekurangan belanja pegawai TA 2019 sebesar Rp20,96M

4. Pemanfaatan PNBP

Pada bulan Desember terdapat penerimaan pemasukan dalam negara berupa Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan pada 2 satker yaitu Balai MPK dan BJKW IV Surabaya sehingga dilakukan kembali revisi untuk 2 satker tersebut dengan total nilai PNBP sebesar Rp17Juta

BAB 4 AKUNTABILITAS KINERJA

4.1 Capaian Kinerja Organisasi

4.1.1 Capaian Kinerja Sasaran Program

Komponen tingkat akuntabilitas kinerja merupakan komponen proses yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. Tahun 2019 merupakan tahun terakhir dalam pelaksanaan Renstra Kementerian PUPR 2015-2019. Sebagai unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melaksanakan Program Pembinaan Konstruksi sesuai dengan yang telah diperjanjikan oleh Bapak Direktur Jenderal Bina Konstruksi di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 untuk mendukung Sasaran Strategis (SS.1) Kementerian PUPR yaitu Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antar daerah, antar sektor, dan antar tingkat pemerintahan. Selain didukung oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Sasaran Strategis ini didukung pula oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

Sasaran program Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang termuat dalam Perjanjian Kinerja TA 2019 yaitu “Meningkatnya Kapasitas dan Pengendalian Kualitas Konstruksi Nasional” dengan target 90%. Kinerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Tahun 2019 adalah 106,26% dengan capaian senilai 95,63% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 12. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2019

Sasaran Program DJBK (Revisi Renstra Kementerian PUPR)	Indikator Sasaran Program / Indikator Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi	% Kinerja Sasaran Kegiatan	Bobot	% Realisasi Per Bobot	Target Renstra Kemen PUPR	Realisasi Renstra Kemen PUPR	Kinerja DJBK	
Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional	Tingkat Pengendalian Pelaksanaan Konstruksi Nasional							90.00%	95.63%	106.26%
	1	Tingkat Kualitas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi	70.00%	97.23%	138.90%	15%	15.00%			
	2	Persentase Kenaikan Tingkat Tertib Penyelenggaraan Konstruksi	11.00%	14.19%	129.00%	15%	15.00%			
	3	Persentase Kenaikan BUJK Berkinerja Baik	11.00%	18.71%	170.05%	15%	15.00%			
	4	Persentase Kenaikan Tingkat Utilitas Produk Unggulan	5.55%	3.12%	56.30%	10%	5.63%			
	5	Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	24.00%	169.36%	705.65%	15%	15.00%			
	6	Persentase Kenaikan SDM Penyedia Jasa Konstruksi yang Kompeten	3.00%	12.05%	401.67%	30%	30.00%			

Sumber: Hasil Analisis (2019)

Capaian sasaran program Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menunjukkan hasil kerja keras seluruh personil di 5 Direktorat, Sekretariat, 7 Balai Jasa Konstruksi, Balai Material dan

Peralatan Konstruksi, Balai Penerapan Teknologi Konstruksi, dan 34 Balai Pelaksana Pemilihan Konstruksi.

Dapat dilihat berdasarkan tabel bahwa bobot tertinggi berada pada indikator Persentase SDM konstruksi yang kompeten. Hal ini dikarenakan banyaknya sumber daya manusia pada bidang konstruksi yang kompeten merupakan bekal utama dari program pembinaan konstruksi. Selain itu, jumlah unit kerja di lingkungan Ditjen Bina Konstruksi yang melaksanakan pencapaian target peningkatan SDM konstruksi yang kompeten juga lebih banyak jika dibandingkan dengan indikator sasaran kegiatan lainnya.

Berdasarkan tabel diatas target sasaran program yang tertera pada Revisi Renstra Kementerian PUPR untuk Program Pembinaan Konstruksi adalah 90%. Pada tahun 2019, realisasi capaian sasaran program Direktorat Jenderal Bina Konstruksi adalah **95,63%**. Hal tersebut menunjukkan bahwa target Ditjen Bina Konstruksi tidak tercapai. Dengan membandingkan ketercapaian terhadap target sasaran program Ditjen Bina Konstruksi diperoleh kinerja Ditjen Bina Konstruksi TA 2019 adalah 106,26%.

4.1.2 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan

Realisasi sasaran program diperoleh dengan menjumlahkan hasil realisasi per bobot keenam indikator sasaran kegiatan yang saling bersinergi dalam mewujudkan sasaran program Ditjen Bina Konstruksi. Setiap indikator sasaran kegiatan memiliki target yang ditetapkan dalam Renstra Kementerian PUPR 2015-2019.

Indikator sasaran kegiatan merupakan bentuk dukungan dari setiap Direktorat sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada dibawahnya, antara lain Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi, dan Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi. Selain itu, terdapat pula kegiatan-kegiatan yang tersebar di seluruh balai di lingkungan Ditjen Bina Konstruksi yang mendukung pencapaian sasaran program. Adapun perhitungan realisasi masing-masing indikator sasaran kegiatan tersebut terhadap target dirinci sebagai berikut:

1. Tingkat Kualitas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi (b_1)

Pembentukan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) di 34 provinsi menggantikan Unit Layanan Pengadaan (ULP) merupakan upaya meningkatkan kualitas dan profesionalisme Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Dengan pembentukan 34 balai tersebut dengan

sumber daya manusia yang independen dan proses bisnis lebih baik diharapkan proses dan hasil pengadaan barang dan jasa konstruksi lebih efektif, efisien, transparan, berkualitas dan akuntabel.

Data capaian indikator sasaran kegiatan tingkat kualitas pengadaan barang/jasa konstruksi diperoleh dari layanan pelelangan paket dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Konstruksi yang tercatat pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Pelaksanaan pengadaan barang/jasa konstruksi ini direncanakan sebesar 70% berkualitas di tahun 2019. Perhitungan capaian indikator sasaran ini menggunakan rumus sebagai berikut:

$$b_1 = \frac{A_n}{Z} \times 100\%$$

Pada TA 2019, terdapat 6.068 paket yang dilelangkan oleh Balai P2JK di 34 Provinsi yang dikategorikan sebagai pelaksanaan pengadaan barang/jasa konstruksi yang berkualitas berdasarkan pemenuhan layanan waktu penetapan pemenang maksimal (125 hari). Sedangkan total paket yang selesai sampai dengan penetapan pemenang sebesar 6.241 paket. Oleh karena itu, didapatkan nilai tingkat kualitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa konstruksi sebagai berikut:

**Tingkat Kualitas Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa
Konstruksi**

Target : 70 %

Realisasi : 97,23 %

$$b_1 = \frac{6.068 \text{ paket}}{6.241 \text{ paket}} \times 100\% = 97,23\%$$

Tabel 13. Komponen Indikator Sasaran Kegiatan 1 Ditjen Bina Konstruksi

Indikator Sasaran Kegiatan	Target TA 2019 (%)	Paket Selesai sampai Penetapan Pemenang	Paket Berkualitas	Realisasi TA 2019 (%)	Kinerja (%)
	t_1	A_{n-1}	A_n	b_1	$K = b_1/t_1$
Tingkat Kualitas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi	70	6.241	6.068	97,23	138,98

Sumber: Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi (2019)

Dengan membandingkan realisasi dengan target TA 2019 berdasarkan Revisi Renstra Kementerian PUPR 2015-2019, dapat dikatakan bahwa target TA 2019 untuk Indikator Sasaran Kegiatan 1 tercapai 97,23% dengan kinerja sebesar 138,98%.

Kegiatan Pembinaan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi pada tahun ini ditargetkan dapat menyusun 1 Profil. Pada akhir bulan Desember 2019 tercatat bahwa capaian output kegiatan ini melebihi target yang ditentukan di awal yakni 20 Draft NSPK dan 5 profil sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 14. Capaian Produk Draft NSPK dan Profil Pembinaan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi

	PRODUK	CAPAIAN	SATUAN
NSPK	Keputusan Menteri tentang Pembentukan UKPBJ dan UPTBJ Kementerian PUPR	1	Draft NSPK
	Rekomendasi Standar Renumerasi Bagi Personil PBJ	1	Draft NSPK
	SOP Pendampingan Perencanaan PBJ	1	Draft NSPK
	SOP Pendampingan Persiapan PBJ	1	Draft NSPK
	SOP Penetapan dan Penugasan Pokja Pemilihan	1	Draft NSPK
	SOP Reviu Pendampingan Persiapan PBJ	1	Draft NSPK
	SOP Reviu Dokumen Pemilihan	1	Draft NSPK
	SOP Penelitian Hasil Penetapan Pemenang oleh Pokja Pemilihan, Penetapan Pemenang Tender PB/PK/Jasa Lainnya dengan nilai pagu <Rp100M, dan seleksi Jasa Konstruksi <Rp 100M	1	Draft NSPK
	SOP Penelitian Hasil Pemenang oleh PA, Penetapan Pemenang Tender PB/PK/Jasa Lainnya dengan Nilai Pagu >Rp 100M dan Seleksi jasa Konsultan >Rp 10M	1	Draft NSPK
	SOP Reviu Usulan penetapan Pemenang Tender PB/PK/Jasa Lainnya dengan Pagu <Rp100M dan Seleksi Jasa Konsultasi <Rp10M	1	Draft NSPK
	SOP Pemilihan Panitia pada Paket Pekerjaan Dana PHLN	1	Draft NSPK
	SOP Reviu Usulan Penetapan Hasil Prakuifikasi	1	Draft NSPK
	SOP Penelitian Penelitian Penetapan Hasil Prakuifikasi	1	Draft NSPK
	Draft SOP Penanganan Pengaduan	1	Draft NSPK
	Draft SOP sanggah dan Sanggah Banding	1	Draft NSPK
	Draft SOP Menerima Pemanggilan oleh Aparat Penegak Hukum	1	Draft NSPK
	Draft SOP Permintaan Pendampingan Hukum	1	Draft NSPK
	Draft SOP Pengelolaan Pemberitaan Media	1	Draft NSPK
	SOP Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi	1	Draft NSPK
	SOP Manajemen Kinerja UKPBJ dan UPTBJ	1	Draft NSPK
PROFIL	Profil Tingkat Kematangan UKPBJ Kementerian PUPR	1	Profil
	Profil Data dan Informasi Kontrak Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian PUPR	1	Profil
	Profil Pelayanan Advokasi Pendampingan dan Konsultasi Publik	1	Profil
	Profil Kualitas Pelaksanaan PBJ	1	Profil
	Profil Kinerja UKPBJ dan UPTBJ di Kementerian PUPR	1	Profil

2. Persentase Kenaikan Tingkat Tertib Penyelenggaraan Konstruksi (b_2)

Penerapan standar manajemen K3 Konstruksi pada pekerjaan konstruksi ditandai dengan persentase pekerjaan konstruksi yang menerapkan K3. Hal ini selaras dengan sasaran kegiatan Ditjen Bina Konstruksi berupa Peningkatan Penerapan Manajemen Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Tertib Pengadaan dan Administrasi Kontrak. Dalam hal ini, penerapan K3 dilihat melalui tingkat tertib penyelenggaraan konstruksi. Peningkatan tersebut didukung oleh peningkatan tertib penyelenggaraan pada saat lelang, administrasi kontrak, dokumen RK3K dan dokumen RMP dan RMK.

Pencapaian sasaran ini didukung oleh kegiatan yang dilaksanakan di Unit Eselon II Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yaitu melalui:

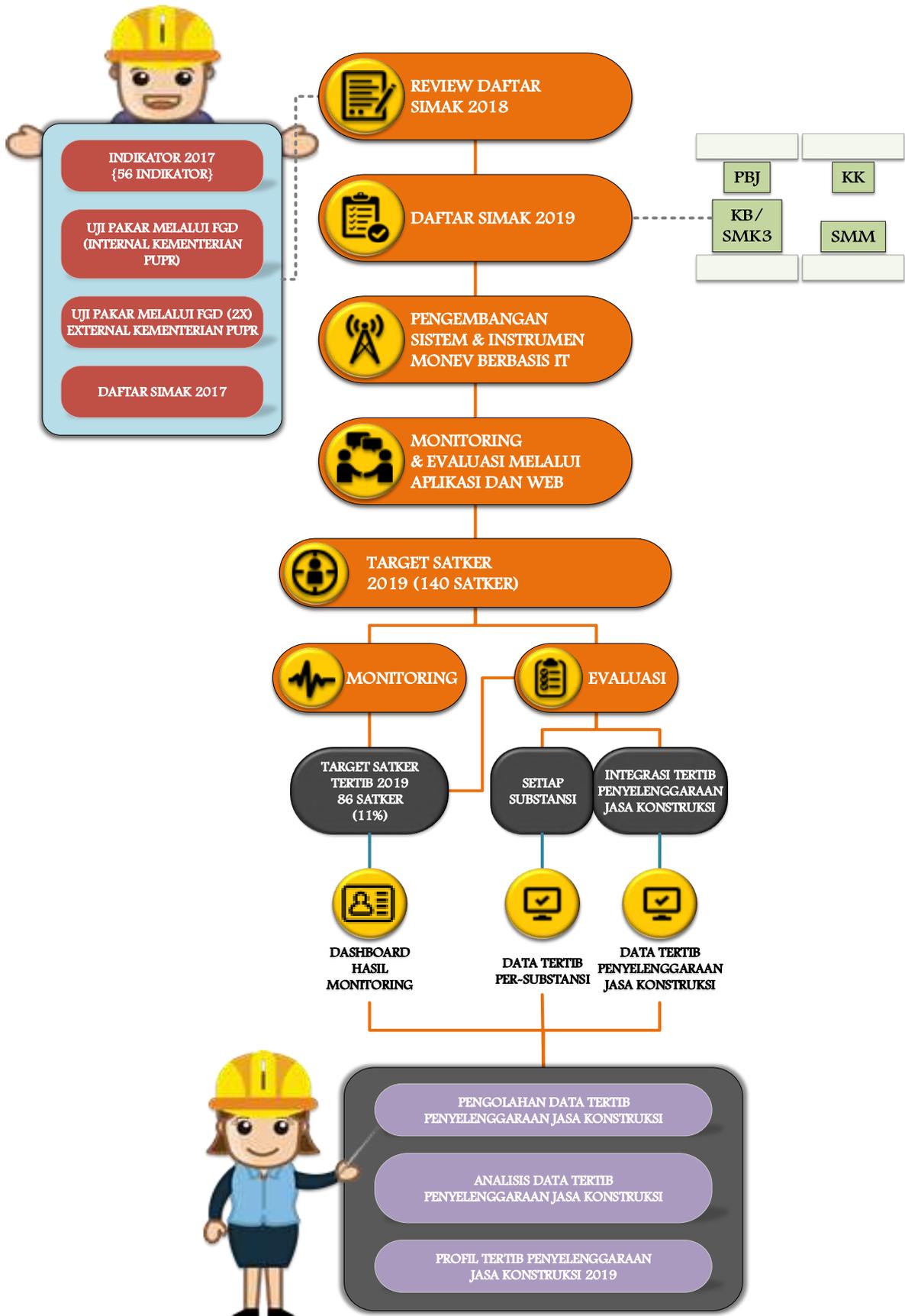
- a. Tercapainya tertib penyelenggaraan dalam bidang Sistem Penyelenggaraan;
- b. Tercapainya tertib penyelenggaraan dalam bidang Kontrak Konstruksi;
- c. Tercapainya tertib penyelenggaraan dalam bidang SMK3;
- d. Tercapainya tertib penyelenggaraan dalam bidang Manajemen Mutu.

Untuk mencapai target sasaran kegiatan peningkatan tertib penyelenggaraan konstruksi, maka melalui Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilakukan Kegiatan Monitoring & Pendampingan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, yang merupakan bagian kegiatan pengawasan untuk mendapatkan gambaran profil penerapan tertib penyelenggaraan konstruksi, di Pihak Pengguna Jasa pada level Organisasi Teknis/Satuan Kerja (Satker).

Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi memiliki strategi pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai tertib penyelenggaraan dengan metode pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan. Pada Tahun 2019 ini, Dit Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi melaksanakan penyusunan system dan instrument monev berbasis web dan *mobile application* melalui pekerjaan MPP konstruksi. Proses penyusunan system dan instrument monev ini mengacu pada proses PDCA yang meliputi:

- a. Proses Perencanaan (*plan*)
- b. Proses Pelaksanaan (*Do*)
- c. Proses Pemeriksaan (*Check*)
- d. Proses Tindak Lanjut (*Act*)

Gambar 12. Alur Proses Kegiatan Pengukuran dan Pendampingan Penerapan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi



Sumber: Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi TA 2019

Berdasarkan proses PDCA selanjutnya dijabarkan dalam lingkup kegiatan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data pembinaan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019, meliputi:
 - 1) Data rencana pembinaan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi,
 - 2) Data indikator dan instrumen monitoring dan evaluasi yang akan digunakan pada TA 2019,
 - 3) Profil pembinaan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi,
 - 4) Data kinerja pencapaian target;
- b. Melakukan review indikator dan instrumen monev TA 2019;
- c. Mengembangkan sistem dan instrumen monev TA 2019 berbasis Web dan Mobile Application;
- d. Melakukan uji coba: Prototype sistem dan instrumen monev berbasis Web dan Mobile Application;
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi berbasis Web dan Mobile Application bekerja sama dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah melalui kegiatan konkuren Pengumpulan Data Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang terdiri dari 2 (dua) *batch*, yaitu:
 - 1) Pengumpulan Data Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, dan
 - 2) Validasi Data Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- f. Melakukan pengolahan data Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang diperoleh dari aplikasi;
- g. Menyusun profil Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Dengan target pembinaan berdasarkan satker unit organisasi fisik (Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Penyediaan Perumahan) Kementerian PUPR yaitu sebesar 782 Satker, maka di tahun 2019 target satker tertib penyelenggaraan jasa konstruksi sebanyak 111 Satker. Dari hasil pengumpulan data satker unit organisasi teknis (Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Penyediaan Perumahan) yang dijadikan sampel untuk pengukuran data tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, diperoleh hasil bahwa terdapat 111 satker yang termasuk ke dalam kategori tertib dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dengan rincian sebagai berikut:

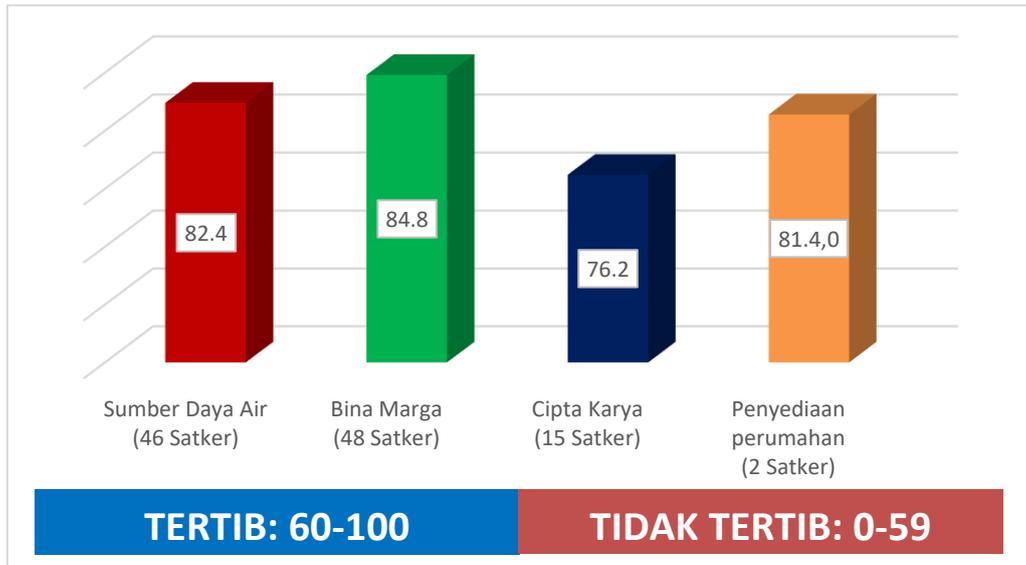


Diagram 16. Skoring Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Per Unit Organisasi TA 2019

Sumber: Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi TA 2018

Persentase Kenaikan Tingkat Tertib Penyelenggaraan Konstruksi

Target : 11 %
Realisasi : 14,19 %

Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa terdapat 111 satker yang termasuk ke dalam kategori tertib (memiliki nilai di atas 60) dengan rincian 46 satker dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, 48 satker dari Direktorat Jenderal Bina Marga, 15 satker dari Direktorat Jenderal Cipta

Karya dan 2 Satker dari Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan.

Perhitungan capaian indikator sasaran ini menggunakan rumus sebagai berikut:

$$b_2 = \frac{B_n}{Z} \times 100\%$$

Pada TA 2019, terdapat 111 satker yang memenuhi syarat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi (nilai 60-100). Oleh karena itu, didapatkan nilai peningkatan tingkat tertib penyelenggaraan konstruksi sebagai berikut:

$$b_2 = \frac{111 \text{ satker}}{782 \text{ satker}} \times 100\% = 14,19\%$$

Tabel 15. Komponen Indikator Sasaran Kegiatan 2 Ditjen Bina Konstruksi

Indikator Sasaran Kegiatan	Target TA 2019 (%)	Jumlah Satker Fisik (Baseline)	Jumlah satker baru tertib penyelenggaraan Tahun 2019	Realisasi TA 2019 (%)	Kinerja (%)
	t_2	Z	B_n	b_2	$K = b_2/t_2$
Persentase	11,00	782	111 satker	14,19	129,0

Kenaikan Tingkat Tertib Penyelenggaraan Konstruksi					
--	--	--	--	--	--

Sumber: Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (2019)

Dengan membandingkan realisasi dengan target TA 2019 berdasarkan Revisi Renstra Kementerian PUPR 2015-2019, dapat dikatakan bahwa target TA 2019 untuk Indikator Sasaran Kegiatan 2 tercapai 14,19% dengan kinerja sebesar 129%.

Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi pada tahun ini ditargetkan dapat menyusun 7 Draft NSPK dan 5 Profil. Pada akhir bulan Desember 2019 tercatat bahwa capaian output kegiatan ini melebihi target yang ditentukan di awal yakni 9 NSPK dan 6 profil sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 16. Capaian Produk Draft NSPK dan Profil Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

	PRODUK	CAPAIAN	SATUAN
NSPK	Peraturan Menteri PUPR tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia	1	Draft NSPK
	Draft Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun	1	Draft NSPK
	Peraturan Menteri PUPR tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Langsung Jasa Konstruksi Melalui Penyedia	1	Draft NSPK
	Draft Pedoman Penentuan Jenis Kontrak Berdasarkan Kebutuhan Pekerjaan	1	Draft NSPK
	Draft Revisi Rancangan Kontrak Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun	1	Draft NSPK
	Draft Pedoman Pemutusan dan Penghentian Kontrak	1	Draft NSPK
	Pedoman Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi	1	Draft NSPK
	Draft Standar Pedoman tentang Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMK2)	1	Draft NSPK
	Draft Peraturan Menteri tentang Pedoman Penilai Ahli	1	Draft NSPK
PROFIL	Data Tertib Pengadaan Barang/Jasa	1	Profil
	Data Tertib Kontrak Konstruksi	1	Profil
	Data Tertib Penerapan Manajemen Mutu	1	Profil
	Buku "Pemeriksaan Keamanan dan Keselamatan Bangunan Gedung"	1	Profil
	Buku "Menumbuhkan Budaya Berkeselamatan untuk Kemajuan Konstruksi Indonesia"	1	Profil
	Data Tertib Penerapan K3	1	Profil

3. Persentase Kenaikan BUJK Berkinerja Baik (b_3)

Badan usaha Jasa Konstruksi berkualifikasi besar sebagaimana dimaksud dalam UU No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Pasal 20 ayat (1) huruf c merupakan BUJK yang hanya dapat menyelenggarakan Jasa Konstruksi pada segmen pasar yang berisiko besar, berteknologi tinggi dan/atau berbiaya besar.

Realisasi indikator sasaran kegiatan 3 merupakan hasil kinerja yang dilaksanakan oleh Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi melalui pelaksanaan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Sosialisasi Undang-Undang Jasa Konstruksi;
2. Fasilitasi Penyusunan PP tentang Usaha Jasa Konstruksi;
3. Penyusunan Profil Monitoring dan Evaluasi Lembaga Pemerintah dan Masyarakat;
4. Penyusunan Profil Penilaian Kinerja BUJK;
5. Penyusunan Rapermen Penilaian Kinerja BUJK;
6. Penyusunan Buku Direktori BUJK PMA dan Perwakilan;
7. Menyusun Rapermen Teknologi Konstruksi Dalam Negeri;
8. Menyusun Juknis Perhitungan Teknologi Konstruksi Dalam Negeri;
9. Penyusunan Katalog Produksi Dalam Negeri;
10. Pelaksanaan FGD Perizinan Asing;
11. Penyusunan Pedoman Tugas Dewan Pengawas LPJK;
12. Penyusunan Usulan PNBPN Layanan Lembaga;
13. Pembentukan Pengurus Lembaga Provinsi;
14. Penyusunan Rapermen terkait Kelembagaan Jasa Konstruksi.

Terbinanya badan usaha jasa konstruksi ditandai dengan jumlah badan usaha jasa konstruksi yang berkualifikasi besar. Ditjen Bina Konstruksi menargetkan kinerja BUJK dengan berkinerja baik berupa jumlah BUJK kualifikasi B2 meningkat selama tahun 2015-2019. Adapun kinerja BUJK ditetapkan berdasarkan beberapa indikator keuangan dan proyek yang telah disepakati. Meningkatnya persentase BUJK yang berkualifikasi besar didapat melalui persentase kenaikan BUJK menjadi berkualifikasi besar. Dari total BUJK Pelaksana (kontraktor) berkualifikasi menengah sebanyak 12.929, telah dipilih sekitar 250 perusahaan yang dibina oleh Ditjen Bina Konstruksi selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga akan terdapat 125 perusahaan selama 5 (lima) tahun pelaksanaan atau terdapat 25 perusahaan dalam 1 (satu) tahun yang meningkat kinerjanya yang dilihat dari peningkatan nilai konstruksi yang diselesaikan selama satu tahun. Berdasarkan data LPJKN pada tahun 2014, terdapat 139 BUJK berkualifikasi B2. Pada tahun 2015, terdapat 45 BUJK dengan subkualifikasi B1 telah menjadi subkualifikasi B2, pada tahun 2016 terdapat 35 BUJK baru B2, dan pada tahun 2017 peningkatan BUJK baru B2 adalah sebesar 161

Persentase Kenaikan BUJK Berkinerja Baik	
Target	: 11 %
Realisasi	: 18,71 %

BUJK baru B2. Pada tahun 2018 peningkatan BUJK baru B2 adalah sebesar 90 BUJK baru B2. Pada tahun 2019, total BUJK berkualifikasi B2 mengalami peningkatan menjadi 496 BUJK.

Perhitungan realisasi indikator sasaran ini menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$b_3 = \frac{C_n - C_{n-1}}{Z} \times 100\%$$

Oleh karena itu, dapat diketahui peningkatan persentase tingkat BUJK berkinerja baik pada tahun 2019 sebagai berikut:

$$b_4 = \frac{(496 - 470) \text{ BUJK}}{139 \text{ BUJK}} \times 100\% = 18,71\%$$

Sehingga diperoleh data capaian untuk indikator sasaran kegiatan ini 18,71% dan menghasilkan kinerja sebesar 170,05%.

Tabel 17. Komponen Indikator Sasaran Kegiatan 3 Ditjen Bina Konstruksi

Indikator Sasaran Kegiatan	Target TA 2019 (%)	Jumlah BUJK Berkualifikasi B2			Realisasi TA 2019 (%)	Kinerja (%)
		2014 (Baseline)	2018	2019		
	t_3	Z	C_{n-1}	C_n	b_3	$K = b_3/t_3$
Persentase Kenaikan BUJK Berkinerja Baik	11,00	139	470	496	18,71	170,05

Sumber: Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi (2019)

Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi untuk Layanan Pembinaan Kelembagaan dan Usaha Jasa Konstruksi pada tahun ini ditargetkan dapat menyusun 8 Draft NSPK dan 5 Profil. Pada akhir bulan Desember 2019 tercatat bahwa capaian output kegiatan ini melebihi target yang ditentukan di awal yakni 9 NSPK dan 5 profil sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 18. Capaian Produk Draft NSPK dan Profil Layanan Pembinaan Kelembagaan dan Usaha Jasa Konstruksi

	PRODUK	CAPAIAN	SATUAN
NSPK	Permen Tata Kelola Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	1	Draft NSPK
	Usulan Calon Pengurus LPJK	1	Draft NSPK
	Revisi Permen Tentang Forum Jasa Konstruksi	1	Draft NSPK
	Permen Tentang Akreditasi Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional	1	Draft NSPK
	Harmonisasi Peraturan Menteri terkait Usaha Jasa Konstruksi	1	Draft NSPK
	Permen tentang Pelayanan Perizinan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing	1	Draft NSPK
	Permen tentang Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional	1	Draft NSPK
	Permen tentang Sub Kualifikasi, Kualifikasi, Sertifikasi dan Registrasi BUJK	1	Draft NSPK

	PRODUK	CAPAIAN	SATUAN
PROFIL	Daftar Inventarisasi Masalah Pembinaan Daerah	1	Profil
	Profil Tertib Usaha BUJKA Kantor Perwakilan dan Kerjasama Modal	1	Profil
	Profil Kinerja BUJK Nasional Kualifikasi Besar dan Menengah	1	Profil
	Rekomendasi Penyelesaian Permasalahan Pembentukan OPD	1	Profil
	Profil Kapasitas LPJK Periode 2015-2020	1	Profil

Selain itu Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melalui Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap BUJKA Kantor Perwakilan dan BUJK PMA. Selama tahun 2019 sebanyak 119 BUJKA Kantor Perwakilan telah mengajukan pengefektifan Izin Usaha Jasa Konstruksi, 72 diantaranya telah efektif. Sedangkan untuk BUJK PMA, sebanyak 61 BUJK mengajukan pengefektifan Izin Usaha Jasa Konstruksi, 26 diantaranya telah efektif.

4. Persentase Kenaikan Tingkat Utilitas Produk Unggulan (b_4)

Peningkatan tingkat utilitas produk unggulan dilihat dari jumlah penggunaan beton pracetak untuk konstruksi di Indonesia. Angka 3% pertahun dijadikan target yang harus tercapai sehingga dalam 5 tahun mendatang penambahan persentase penggunaan beton pracetak pada proyek konstruksi di Indonesia mencapai 15%.

Realisasi indikator sasaran kegiatan ini merupakan hasil kinerja yang dilaksanakan Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi melalui pelaksanaan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Fasilitasi Penerapan Penggunaan Katalog Beton Pracetak dan Prategang yang didalamnya memuat pelaksanaan beberapa FGD;
2. Penyusunan Buku Katalog Teknologi Konstruksi; dan
3. Fasilitasi Teknologi Asing.

Peningkatan Utilitas Produk Unggulan

Target : 5,55 %
Realisasi : 3,12 %

Meningkatnya utilitas produk unggulan dapat dilihat melalui persentase kenaikan tingkat utilitas produk unggulan. Berdasarkan data AP3I (Asosiasi Perusahaan Pracetak dan Prategang Indonesia), pada tahun 2014 penggunaan beton pracetak adalah 24 juta ton atau sekitar 15% dari penggunaan

beton keseluruhan pada proyek infrastruktur di Indonesia yaitu sebesar 136,97 juta ton. Pada tahun 2015 penggunaan produk beton pracetak naik menjadi 25,45 juta ton. Pada tahun 2016, penggunaan produk beton pracetak naik menjadi 28 juta ton. Pada tahun 2017, angka tersebut kembali naik menjadi 34,42 juta ton. Tahun 2017 awal, AP3I merilis bahwa angka penggunaan

beton keseluruhan adalah 136,97 juta ton yang merupakan perhitungan berdasar kepada persentase penggunaan semen pada proyek infrastruktur di Indonesia yang diestimasi sebanyak 25% dari total penggunaan semen keseluruhan. Pada tahun 2018, angka penggunaan produk beton pracetak mengalami peningkatan menjadi 37,00 juta ton. Berdasarkan data AP3I, kapasitas produksi beton pracetak dan prategang nasional pada tahun 2019 diperoleh dari produksi 83 pabrik sebesar 36,63 juta ton, produksi untuk rumah RISHA oleh 11 pabrik sebesar 462 ton, produksi untuk fasad gedung (fasad, balok, kolom, dan plat) oleh 5 pabrik sebesar 1,87 juta ton serta tambahan data produksi dari Direktorat Penyediaan Perumahan, Perumnas, dan BNPB dengan total sebesar 2,31 juta ton. Sehingga total kapasitas produksi beton pracetak pada tahun 2019 adalah 41,28 juta ton.

Perhitungan realisasi indikator sasaran ini menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$b_4 = \frac{D_n - D_{n-1}}{Z} \times 100\%$$

Oleh karena itu, dapat diketahui peningkatan persentase tingkat utilitas produk unggulan pada tahun 2019 sebagai berikut:

$$b_4 = \frac{(41,28 - 37,00) \text{ juta ton}}{136,97 \text{ juta ton}} \times 100\% = 3,12\%$$

Tabel 19. Komponen Indikator Sasaran Kegiatan 4 Ditjen Bina Konstruksi

Indikator Sasaran Kegiatan	Target TA 2019 (%)	Total Penggunaan Beton tahun 2014 (juta ton)	Kapasitas Produksi Beton Pracetak (juta ton)		Realisasi TA 2019 (%)	Kinerja (%)
			2018	2019		
	t_4	Z	D_{n-1}	D_n	b_4	$K = b_4/t_4$
Persentase Kenaikan Tingkat Utilitas Produk Unggulan	4,00	136,97	37,00	41,28	3,12	78,12

Sumber: Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi (2019)

Pada tahun renstra 2019, diharapkan sebanyak 5,55% utilitas produk unggulan meningkat dari tahun sebelumnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa target capaian Renstra 2019 untuk Indikator Sasaran Kegiatan 4 belum tercapai karena hanya mencapai 3,12% dengan kinerja sebesar 78,12%.

Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi untuk Layanan Pembinaan Rantai Pasok dan Produksi Produk Unggulan pada tahun ini ditargetkan dapat menyusun 5 Draft NSPK dan 4 Profil. Pada akhir bulan Desember 2019 tercatat bahwa capaian output kegiatan ini melebihi target yang ditentukan di awal yakni 5 NSPK dan 4 profil sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 20. Capaian Produk Draft NSPK dan Profil Layanan Pembinaan Rantai Pasok dan Produksi Produk Unggulan

	PRODUK	CAPAIAN	SATUAN
NSPK	Permen Terkait Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri	1	Draft NSPK
	Pedoman Tentang Alih Teknologi	1	Draft NSPK
	Pedoman tentang Kriteria Teknologi dan Kriteria Resiko	1	Draft NSPK
	Pedoman Peningkatan Pemanfaatan Produk Beton Pracetak dan Prategang	1	Draft NSPK
	Draft Permen tentang Pelaksanaan Registrasi Peralatan Konstruksi	1	Draft NSPK
PROFIL	Profil TKDN Proyek Konstruksi	1	Profil
	Profil Quarry Material Konstruksi	1	Profil
	Data Penggunaan Beton Pracetak dan Prategang 2019	1	Profil
	Profil Teknologi Rumah Tahan Gempa	1	Profil

5. Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi

Realisasi indikator sasaran kegiatan ini merupakan hasil kinerja yang dilaksanakan Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan melalui pelaksanaan beberapa kegiatan pelatihan dan uji sertifikasi yang diselenggarakan oleh Balai-Balai di lingkungan Ditjen Bina Konstruksi dan melalui pelaksanaan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Pengembangan Skema Sertifikasi Program Kerja Sama Link and Match dan Dukungan Pencetakan Asesor dan Siswa Bersertifikat
2. Sinkronisasi dan Fasilitasi Kerjasama Pembinaan Jasa Konstruksi
3. Penyusunan Pedoman Program Pemagangan Dalam Rangka Kerjasama dengan BUJK
4. Bimbingan Teknis NSPK Jasa Konstruksi terhadap Implementasi Kerja Sama
5. Pendampingan Pemberdayaan Jasa Konstruksi Wilayah
6. Penjaminan Mutu Skema Sertifikasi Tenaga Kerja Terampil dan Ahli
7. Melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan Pemberdayaan Jasa Konstruksi

Terselenggaranya kerjasama pelatihan dengan penyelenggara pelatihan ditandai dengan jumlah penyelenggara pelatihan. Penyelenggaraan pelatihan di lingkungan Ditjen Bina Konstruksi dikoordinasikan oleh Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan bersama dengan balai-balai di lingkungan Ditjen Bina Konstruksi.

Pada tahun 2019 ditargetkan sebanyak 1.842 angkatan mengikuti kegiatan pelatihan dan uji sertifikasi yang diselenggarakan oleh balai-balai di lingkungan Ditjen Bina Konstruksi atau terlaksanakannya peningkatan kerja sama dan pemberdayaan jasa konstruksi sebesar 24%. Dari kegiatan pelatihan dan uji sertifikasi yang diselenggarakan oleh balai-balai di lingkungan Ditjen Bina Konstruksi untuk tahun 2019 tercapai 12.976 angkatan tenaga kerja konstruksi mengikuti kegiatan pelatihan dan uji sertifikasi. Nilai ini diperoleh melalui sistem aplikasi DAYANAKER berupa tenaga kerja yang mengikuti kegiatan pelatihan dan uji sertifikasi yang berjumlah 259.539 orang. Jumlah tenaga kerja terfasilitasi tersebut kemudian dikonversikan ke dalam satuan angkatan dengan asumsi 1 angkatan terdiri dari 20 tenaga kerja terfasilitasi, sehingga diperoleh sebanyak 12.976 angkatan terfasilitasi.

Perhitungan realisasi indikator sasaran ini menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$b_5 = \frac{E_n}{Z} \times 100\%$$

Oleh karena itu, dapat diketahui peningkatan kerjasama dan pemberdayaan jasa konstruksi pada tahun 2019 sebagai berikut:

$$b_5 = \frac{12.976 \text{ Angkatan}}{7.662 \text{ Angkatan}} \times 100\% = 169,36\%$$

Tabel 21. Komponen Indikator Sasaran Kegiatan 5 Ditjen Bina Konstruksi

Indikator Sasaran Kegiatan	Target TA 2019 (%)	Target Total Fasilitasi (Angkatan)	Fasilitasi Tahun 2019 (Angkatan)	Realisasi TA 2019 (%)	Kinerja (%)
	t_5	Z	E_n	b_5	$K = b_5/t_5$
Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	24,00	7.662	12.976	169,36	705,6

Sumber: Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan (2019)

Pada tahun renstra 2019, diharapkan sebanyak 24% terlaksana kerja sama dan pemberdayaan konstruksi melalui kegiatan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi. Sehingga dapat dikatakan bahwa target capaian Renstra 2019 untuk Indikator Sasaran Kegiatan 5 tercapai 169,36% dengan kinerja sebesar 705,6%.

Untuk capaian indikator sasaran kegiatan ini didukung oleh 7 Balai Jasa Konstruksi Wilayah, Balai Material dan Peralatan Konstruksi, dan Balai Penerapan Teknologi Konstruksi

dengan melaksanakan kegiatan pelatihan dan sertifikasi dengan target pada tahun 2019 sebesar 217.000 orang dengan rincian 26.000 orang terlatih dan 170.000 orang tersertifikasi dan 21.000 SDM vokasional tersertifikasi. Hingga akhir tahun 2019, secara keseluruhan target pelatihan dan sertifikasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2019 sudah tercapai sebanyak 259.539 orang (119,6%). Secara rinci, diperoleh capaian pelatihan sebesar 86.232 orang (331,7%) dan sertifikasi sebesar 152.004 orang (89,4%), dan SDM vokasional sebesar 21.303 orang (101,4%).

Tabel 22. Capaian Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi TA 2019

NO	BALAI	PELATIHAN			SERTIFIKASI			VOKASI			TOTAL		
		TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%
1	BJKW I BANDA ACEH	1.197	2,757	230.3	16.107	18,716	116.2	2.920	3,223	110.4	20.224	24,696	122.1
2	BJKW II PALEMBANG	1.650	7,806	473.1	22.050	19,063	86.5	1.800	1,800	100.0	25.500	28,669	112.4
3	BJKW III JAKARTA	3.412	16,706	489.6	37.911	27,989	73.8	4.400	4,400	100.0	45.723	49,095	107.4
4	BJKW IV SURABAYA	2.906	9,966	342.9	32.689	38,860	118.9	5.600	5,600	100.0	41.195	54,426	132.1
5	BJKW V BANJARMASIN	1.512	7,980	527.8	20.347	14,739	72.4	2.600	2,600	100.0	24.459	25,319	103.5
6	BJKW VI MAKASSAR	1.500	6,798	453.2	20.360	21,625	106.2	2.400	2,400	100.0	24.260	30,823	127.1
7	BJKW VII JAYAPURA	1.260	3,649	289.6	16.956	7,160	42.2	1.280	1,280	100.0	19.496	12,089	62.0
8	BALAI PTK	12000	29,745	247.9	-	-	-	-	-	-	12.000	29,745	247.9
9	BALAI MPK	563	825	146.5	3.580	3,852	107.6	-	-	-	4.143	4,677	112.9
JUMLAH		26.000	86.232	331,7	170.000	152.004	89,4	21.000	21.303	101,4	217.000	259.539	119,6

Sumber: Dayanaker (Desember 2019)

Untuk target sertifikasi tenaga kerja konstruksi pada tahun ini tidak tercapai disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- Kurangnya tenaga asesor dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi di beberapa provinsi untuk melaksanakan penilaian kompetensi tenaga kerja konstruksi, baik tenaga ahli maupun terampil;
- Kurangnya respon positif dari beberapa balai Unit Organisasi untuk mengirimkan peserta tenaga kerja konstruksi untuk dilatih dan disertifikasi; dan
- Mobilisasi peserta yang sulit dikarenakan beberapa lokasi kegiatan pelatihan maupun sertifikasi yang jauh, khususnya untuk di Kalimantan dan Papua.

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah melakukan berbagai upaya untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan sertifikasi agar sesuai target yang diperjanjikan, antara lain:

- Pendampingan oleh Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi ke Balai Jasa Konstruksi yang mengalami kendala terkait respon Balai-Balai Unor yang minim terhadap program sertifikasi;

- b. Fasilitasi kerja sama dengan stakeholder untuk mendukung program sertifikasi tenaga kerja konstruksi, khususnya di wilayah Timur; dan
- c. Untuk mengatasi permasalahan kurangnya asesor di beberapa wilayah, Balai Jasa Konstruksi di targetkan untuk melakukan pelatihan dan *upgrading* instruktur dan asesor pada tahun 2020.

Kegiatan Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi untuk Layanan Kerja Sama Lembaga Pemerintah dan Masyarakat serta Pemberdayaan Jasa Konstruksi pada tahun ini ditargetkan dapat menyusun 1 Draft NSPK dan 4 Profil. Pada akhir bulan Desember 2019 tercatat bahwa capaian output kegiatan ini melebihi target yang ditentukan di awal yakni 3 NSPK dan 4 profil sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 23. Capaian Produk Draft NSPK dan Profil Layanan Kerja Sama Lembaga Pemerintah dan Masyarakat

	PRODUK	CAPAIAN	SATUAN
NSPK	Pedoman Penyelenggaraan Program Link and Match bidang Jasa Konstruksi;	1	Draft NSPK
	Petunjuk Teknis Praktek Kerja Lapangan dalam rangka Program Link and Match;	1	Draft NSPK
	Petunjuk Pelaksanaan Uji Kompetensi Bagi Pendidikan Vokasi	1	Draft NSPK
PROFIL	Profil Kinerja Kerja Sama Pembinaan Konstruksi	1	Profil
	Profil Kinerja Pemberdayaan Jasa Konstruksi oleh Mitra Kerja Wilayah I	1	Profil
	Profil Kinerja Pemberdayaan Jasa Konstruksi oleh Mitra Kerja Wilayah II	1	Profil
	Profil Kinerja Pemberdayaan Jasa Konstruksi oleh Mitra Kerja Wilayah III	1	Profil

6. Persentase Kenaikan SDM Penyedia Jasa Konstruksi yang Kompeten

Realisasi indikator sasaran kegiatan ini merupakan hasil kinerja yang dilaksanakan Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi. Meningkatnya SDM Penyedia jasa Konstruksi ditandai dengan jumlah penambahan sertifikasi ahli dan terampil yang diperoleh dari LPJK. Berdasarkan data dari LPJKN, penambahan sertifikasi ahli dan terampil yang bersertifikat pada tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 24. Penambahan Sertifikasi Ahli dan Terampil Tahun 2014-2019

Jenis SDM Konstruksi	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Tenaga Ahli	60.523	58.873	68.538	74.501	69.168
Tenaga Terampil	126.423	145.899	117.414	174.810	262.669
Jumlah	186.946	204.772	185.952	249.311	331.837

Sumber: LPJKN (2019)

Pada tahun 2019, total penambahan *skilled labour* adalah sebesar 331.837 orang yang terdiri dari 69.168 pemohon tenaga ahli dan 262.669 pemohon tenaga

**Persentase Kenaikan SDM
Penyedia Jasa Konstruksi
yang Kompeten**

Target : 4 %
Realisasi : 12,05%

terampil bersertifikat. Perhitungan realisasi indikator sasaran ini menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$b_6 = \frac{F_n}{Z} \times 100\%$$

Oleh karena itu, dapat diketahui peningkatan persentase SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten pada tahun 2019 sebagai berikut:

$$b_6 = \frac{331.837 \text{ orang}}{2.754.160 \text{ orang}} \times 100\% = 12,05\%$$

Tabel 25. Komponen Indikator Sasaran Kegiatan 6 Ditjen Bina Konstruksi

Indikator Sasaran Kegiatan	Target TA 2019 (%)	Jumlah Ideal TTK Kompeten (orang)	Jumlah Penambahan TTK Kompeten tahun 2019 (orang)	Realisasi TA 2019 (%)	Kinerja (%)
	t_4	Z	F_n	b_4	$K = b_4/t_4$
Persentase Kenaikan SDM Penyedia Jasa Konstruksi yang Kompeten	3,00	2.754.160	331.837	12,05	401,67

Sumber: LPJKN (2019)

Pada tahun renstra 2019, diharapkan terjadi peningkatan jumlah SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten sebesar 4%, atau sekitar 110.000 SDM kompeten. Sehingga dapat dikatakan bahwa target capaian Renstra Tahun 2019 untuk Indikator Sasaran Kegiatan 6 tercapai 12,05% dengan kinerja sebesar 401,67%.

Kegiatan Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi pada tahun ini ditargetkan dapat menyusun 42 Draft NSPK dan 8 Profil. Pada akhir bulan Desember 2019 tercatat bahwa capaian output kegiatan ini sesuai target yang ditentukan di awal yakni 42 NSPK dan 8 profil sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 26. Capaian Produk Draft NSPK dan Profil Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi

	PRODUK	CAPAIAN	SATUAN
NSPK	Penyusunan RSKKNI 8 jabatan kerja: 1. Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi 2. Ahli Muda Perencanaan Beton Pracetak untuk Struktur Bangunan Gedung 3. Ahli Pemeriksa Kelaikan Fungsi Mekanikal Bangunan Gedung 4. Ahli Material Jalan 5. Geodesi Bangunan Gedung 6. Teknisi Fire Alarm	8	Draft NSPK

	PRODUK	CAPAIAN	SATUAN
	7. Ahli Pemeriksa Kelaikan Struktur Bangunan Gedung 8. Ahli Perencana Terowongan Jalan		
	Penyusunan RSKKNI 5 jabatan kerja: 1. Lifting Engineer 2. Lifting Supervisor 3. Rigger and Signalman 4. Ahli Hidrometri 5. Ahli Lingkungan Keairan	5	Draft NSPK
	Materi pelatihan bidang jalan dan jembatan 5 jabatan kerja: 1. Ahli Rehabilitasi Jembatan 2. Ahli Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 3. Ahli Perencanaan Jembatan Rangka Baja 4. Ahli Perencanaan Terowongan Jalan 5. Teknisi Prestressing Equipment	5	Draft NSPK
	Materi pelatihan bidang SDA 5 jabatan kerja: 1. Inspektur Bendungan Urukan 2. Ahli Teknik Perencana Irigasi Rawa 3. Ahli Operasi dan Pemeliharaan Bendungan Tipe Urukan 4. Ahli Perencanaan Jaringan Drainase 5. Ahli Perencanaan Pengaman Pantai	5	Draft NSPK
	Materi Pelatihan Konstruksi 8 Jabatan Kerja: 1. Quality Engineer 2. Quantity Surveyor 3. Quality Assurance 4. Arsitek Interior 5. Mandor Perkerasan Jalan 6. Pelaksana Pekerjaan Jalan 7. Pelaksana Lapangan Drainase Perkotaan 8. Ahli Managemen Konstruksi	8	Draft NSPK
	Revisi Permen 9/2013 tentang Persyaratan Kompetensi untuk Subkualifikasi Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil Bidang Jasa Konstruksi	1	Draft NSPK
	Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelatihan dan Uji Sertifikasi	1	Draft NSPK
	Pedoman Pelaksanaan Percepatan Uji Kompetensi dan Registrasi Tenaga Konstruksi	1	Draft NSPK
	Pedoman Assessment Kesesuaian Kompetensi Tenaga Ahli Bersertifikat Pada Proyek Konstruksi	1	Draft NSPK
	Draft Revisi Permen No 45 Tahun 2015 tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan	1	Draft NSPK
	Draft Permen Akreditasi Asosiasi	1	Draft NSPK
	Draft Pedoman Penyetaraan Kompetensi Tenaga Konstruksi Asing	1	Draft NSPK
	Draft Standar Insentif Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi Terampil	1	Draft NSPK
	Draft NSPK Penyusunan standar susunan tenaga ahli pada tim supervisi pekerjaan konstruksi	1	Draft NSPK
	Draft NSPK Penyusunan standar susunan tenaga ahli pada tim perancangan pekerjaan konstruksi	1	Draft NSPK
	Draft Standar dan Indeks Produktivitas Konstruksi Indonesia	1	Draft NSPK
PROFIL	Profil Kesesuaian Peta Kompetensi dengan Kebutuhan Sektor Ke-PU-an Tahun 2019	1	Profil
	Profil Relevansi Substansi Materi Pelatihan dengan Kebutuhan Sektor Ke-PU-an Tahun 2019	1	Profil
	Profil Capaian Pembinaan Kompetensi Balai Jasa Konstruksi 2019	1	Profil
	Profil Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi	1	Profil
	Profil Uji Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi	1	Profil
	Profil Kiprah Pemegang ACPE dan AA 10 Tahun Terakhir	1	Profil

	PRODUK	CAPAIAN	SATUAN
	Profil Pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan oleh asosiasi profesi	1	Profil
	Peta Gap Komponen Produktivitas Konstruksi Tahun 2019	1	Profil

7. Jumlah Layanan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Dukungan indikator sasaran kegiatan ini terhadap pencapaian target sasaran program dilakukan oleh Setditjen Bina Konstruksi berupa dukungan pelayanan teknis dan administrasi pembinaan jasa konstruksi. Indikator sasaran kegiatan ini tidak berpengaruh langsung dalam pengukuran sasaran proram, peran indikator sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan target outcome untuk 5 tahun kedepan;
2. Mengawal penganggaran dalam rangka pencapaian target outcome;
3. Mengembangkan SDM Ditjen Bina Konstruksi sebagai internalisasi konsep REVOLUSI MENTAL;
4. Memberikan advokasi kepada setiap direktorat dan balai dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja; dan
5. Melaksanakan publikasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Ditjen Bina Konstruksi.

Pencapaian indikator sasaran kinerja ini dirangkum dalam Laporan Kinerja Ditjen Bina Konstruksi. Laporan Kinerja berisikan rencana dan capaian organisasi selama 1 tahun yang kemudian dinilai oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR berdasar kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan penilaian komponen sebagaimana dinyatakan dalam hasil evaluasi tersebut, maka Akuntabilitas Kinerja Ditjen Bina Konstruksi dari tahun 2014 hingga 2018 masing-masing dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 27. Hasil Evaluasi SAKIP Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2014-2018

No	Komponen	Bobot/ Nilai Maks	Nilai Hasil Evaluasi				
			TA 2014	TA 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018
1.	Perencanaan Kinerja	30 %	29,89 %	24,42 %	26,44 %	26,69 %	28,80 %
2.	Pengukuran Kinerja	25 %	14,56 %	17,59 %	17,54 %	18,13 %	18,59 %
3.	Pelaporan Kinerja	15 %	12,22 %	11,29 %	10,22 %	11,02 %	10,60 %
4.	Evaluasi Kinerja	10 %	4,23 %	(tidak dilakukan penilaian untuk unit Eselon I, hanya untuk tingkat Kementrian)		5,10 %	6,58%
5.	Capaian Kinerja	20 %	15,42 %	17,69 %	17,71 %	17,92 %	13,96 %

No	Komponen	Bobot/ Nilai Maks	Nilai Hasil Evaluasi				
			TA 2014	TA 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018
	Jumlah	100 %	76,32 %	78,80 %	79,90 %	78,85 %	78,54 %

Sumber: Bagian Perencanaan dan Evaluasi (2019)

Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Ditjen Bina Konstruksi mengalami kenaikan dari tahun 2014 hingga 2016 yang mencapai 79,90% dan merupakan nilai tertinggi akuntabilitas kinerja unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR. Pada Tahun 2017, nilai akuntabilitas kinerja unit organisasi Dirjen Bina Konstruksi memperoleh nilai tertinggi kembali di lingkungan Kementerian PUPR yaitu mencapai 78,85%, namun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Di tahun 2018, nilai akuntabilitas kinerja unit organisasi Dirjen Bina Konstruksi mengalami penurunan kembali dengan nilai 78,58% dan merupakan peringkat ketiga dari seluruh unit organisasi di Kementerian PUPR.

Nilai evaluasi akuntabilitas Ditjen Bina Konstruksi pada TA 2018 mengalami penurunan yang disebabkan oleh dilakukannya penilaian kembali untuk komponen Evaluasi Kinerja sejak TA 2017, sistem penilaian yang lebih ketat dengan berubahnya beberapa kriteria indikator penilaian. Walaupun nilai akhir mengalami penurunan, hampir seluruh komponen penilaian mengalami peningkatan dengan peningkatan tertinggi adalah dari komponen perencanaan kinerja yaitu sebesar 2,1%. Hal ini merupakan kontribusi Setditjen Bina Konstruksi dalam perencanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Beberapa komponen penilaian yang mengalami penurunan adalah komponen pelaporan kinerja dan capaian kinerja. Hal ini disebabkan oleh ketidaktercapaiannya 1 sasaran kegiatan yaitu Persentase Kenaikan Tingkat Utilitas Produk Unggulan pada tahun 2018.

Satuan indikator sasaran kinerja ini berupa layanan dengan target pada tahun 2019 adalah 5 layanan yang terdiri dari 3 layanan dukungan manajemen eselon 1, 1 layanan internal (overhead), dan 1 layanan perkantoran. Realisasi di tahun 2019 untuk indikator sasaran kegiatan ini adalah 100% artinya seluruh target yang ditetapkan dalam Revisi Renstra Kementerian PUPR 2015-2019 tercapai.

Layanan dukungan manajemen eselon 1 yang telah dicapai pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Layanan Perencanaan, Program dan Anggaran, dan Laporan Evaluasi Kinerja
2. Layanan Mutasi Pegawai, Pengembangan Pegawai dan Penyelenggaraan ORTALA
3. Layanan Akuntansi Keuangan, Pengelolaan BMN, Umum Rumah Tangga dan Perlengkapan

4. Layanan Hukum, Informasi dan Komunikasi Publik

Karena kondisi eksisting saat ini integrasi di level data melalui pengembangan DWH lebih tepat untuk dilakukan dahulu pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk Balai P2JK di 34 provinsi. Dengan dibentuknya UPT PBJ atau Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) maka diperlukan personil yang berintegritas serta memahami serta berpengalaman menangani substansi pengadaan barang/jasa pemerintah agar organisasi tersebut dapat beroperasi. Setelah pelantikan Kepala Balai dan Kepala Subbagian Tata Usaha BP2JK pada 1 Maret 2019, pemenuhan dan uji kompetensi personil terus diupayakan dengan strategi (1) permohonan pindah/alih tugas pegawai dari Unit Organisasi Kementerian PUPR secara bertahap, (2) mutasi PNS pemerintah daerah secara bertahap, (3) penempatan PNS 2017, (4) rekrutmen tenaga kontrak untuk tenaga pendukung dan (5) asesmen bagi calon personil BP2JK sebelum terbit SK Alih Tugas. Adapun jumlah kebutuhan personil BP2JK yakni 1432 orang. Hingga 15 Januari 2020, progres pemenuhan personil di BP2JK sudah mencapai 63% dengan presentase tertinggi yakni BP2JK Wilayah Sulawesi Tenggara, D.I Yogyakarta dan Aceh, sedangkan yang terendah yakni BP2JK Papua Barat, DKI Jakarta dan Papua.

Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melalui Bagian Perencanaan dan Evaluasi melakukan Revisi DIPA seluruh Satker di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Pada tahun anggaran 2019 telah dilakukan beberapa revisi anggaran yang menjadi kewenangan internal maupun pihak eksternal Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Dalam rangka pembentukan satker baru yang mempunyai tugas dan fungsi utama untuk Pembinaan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi, maka Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melakukan revisi DIPA dengan mekanisme realokasi anggaran yang bersumber dari satker Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi sebesar Rp33.996.002.000,- untuk 34 satker baru Balai P2JK. Selain itu, pada TA 2019 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mengalami kekurangan belanja pegawai sebesar Rp20.963.147.000,- sehingga kekurangan tersebut dipenuhi dari Program Pembinaan dan Pengembangan Penataan Bangunan dan Lingkungan.

Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melalui Bagian Hukum, Data, dan Komunikasi Publik melakukan inventarisasi dari Peraturan Menteri agar mengutamakan pelayanan dan tidak memberikan pengaturan kepada pihak eksternal sebagai tindak lanjut Omnibus Law dan pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIJK). Melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi nomor 404/KPTS/DK/2019 telah dibentuk Tim Perumus Peraturan Perundang-Undangan Omnibus Law Bidang Jasa Konstruksi. Tim tersebut telah mengidentifikasi Peraturan

Menteri di Bidang Jasa Konstruksi, sesuai dengan pembagian klaster dan sub klaster yang telah dibahas dalam Rapat bersama Staf Ahli Menteri PUPR. Ketentuan-ketentuan di dalam UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang tidak terdampak Omnibus Law akan tetap berlaku. Setelah Draft Final UU Omnibus Law selesai disusun, maka Kementerian/Lembaga perlu melakukan Konsultasi Publik kepada para stakeholder di masing-masing sektornya.

Setelah memiliki peta proses bisnis awal yang cukup dapat digunakan sebagai acuan, tahap selanjutnya dalam pengembangan SIJK adalah pemetaan terhadap data pada aplikasi-aplikasi di DJBK. Kebutuhan pemetaan data ini adalah untuk melakukan standarisasi format data yang digunakan, dan untuk menyusun tabel master data yang akan digunakan sebagai acuan untuk aplikasi eksisting maupun pengembangan aplikasi baru ke depan. Terdapat 2 pendekatan yang dapat dipakai sebagai konsep SIJK. Pertama adalah integrasi di level aplikasi dengan memanfaatkan webservice sebagai middleware, dan kedua adalah integrasi di level data dengan pengembangan datawarehouse (DWH). Karena kondisi eksisting di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi saat ini integrasi di level data melalui pengembangan DWH lebih tepat untuk dilakukan dahulu.

Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melalui Bagian Keuangan dan Umum melakukan pemenuhan aset untuk Balai P2JK di 34 provinsi.

4.1.3 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Selama pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian output dan outcome, terdapat beberapa kendala sebagai berikut:

1. Rendahnya pengawasan konstruksi di lapangan terutama K3 dan
2. Kurangnya pengawas K3 di daerah;
3. Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan jakon di daerah karena masih belum optimalnya kinerja OPD Jakon daerah dan masa transisi LPJK berdasarkan UUK 2/2017;
4. Perubahan struktur organisasi dengan pembentukan Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi dan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi di 34 Provinsi sehingga menyebabkan penurunan progres penyerapan anggaran;
5. Target pelatihan dan sertifikasi yang besar yaitu sebanyak 26.000 pelatihan, 170.000 sertifikasi dan 21.000 sertifikasi vokasional jika dibandingkan dengan target tahun sebelumnya yaitu hanya menargetkan tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi sebesar 36.383 orang;

6. Kebijakan Omnibuslaw membuat beberapa NSPK seperti RPP UU Jasa Konstruksi dan Permen terkait Lembaga direviu ulang;
7. Beberapa hal yang menyebabkan pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi kurang optimal adalah sebagai berikut:
 - a. Kurangnya jumlah asesor dari LPJKP di beberapa Provinsi;
 - b. Minimnya respon dari unit organisasi lain terkait program sertifikasi tenaga kerja;
 - c. Mobilisasi peserta yang sulit dikarenakan lokasi kegiatan yang cukup jauh;
 - d. Terdapat permasalahan penolakan sebagian asosiasi profesi untuk bergabung dalam program percepatan sertifikasi dikarenakan biaya sertifikasi yang murah;
8. Kurangnya kapasitas dan jumlah SDM sehingga merekrut tenaga kontrak individual secara tahunan;
9. Kurang terkelolanya data dan informasi dikarenakan pengumpulan data masih belum kontinu dan terintegrasi;
10. Keterbatasan penggunaan sistem informasi dan teknologi (Sistem Pengendalian Mandiri/SPiM) yang terkendala pada gangguan jaringan internet di daerah.

Namun, kinerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi berhasil melebihi target karena dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan demi mencapai target, antara lain:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian target, baik Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, maupun Output secara periodik;
2. Dukungan Komite K2 dalam melakukan monitoring dan evaluasi ke 30 proyek strategis yang berada di beberapa daerah di Indonesia antara lain Pekerjaan Konstruksi Risiko Tinggi Jalan Tol Ujung Pandang Seksi 3 (Jalan Tol Layang A.P. Pettarani) Pada Tanggal 26 Juli 2019, Pekerjaan Proyek Pembangunan Flyover Teluk Lamong Pada Tanggal 5 Agustus 2019, dan Proyek Pekerjaan LRT Jabodebek (Seksi Mampang_Kuningan) Pada Tanggal 13 Agustus 2019;
3. Melaksanakan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi dengan jabatan kerja petugas K3 di berbagai macam proyek PUPR;
4. Melakukan kegiatan bimbingan teknis OPD kepada Pemerintah Daerah;
5. Melakukan bimbingan teknis kepada beberapa SDM di 34 Balai P2JK, seperti bimbingan teknis e-monitoring, RKAKL, BMN, dan lain-lain;
6. Melaksanakan kegiatan pelatihan dan sertifikasi dengan memanfaatkan sertifikasi masal dan kerja sama *cost sharing* dengan beberapa stakeholder seperti BUJK dan SMK;

7. Pembentukan Tim Perumus Peraturan Perundang-Undangan Omnibus Law Bidang Jasa Konstruksi, tanggal 11 Desember 2019 dengan personil gabungan dari masing-masing direktorat untuk melakukan inventarisasi dari Peraturan Menteri agar mengutamakan pelayanan dan tidak memberikan pengaturan kepada pihak eksternal.
8. Beberapa upaya dalam memenuhi target kegiatan pelatihan dan sertifikasi adalah:
 - a. Untuk mengatasi permasalahan kurangnya asesor di beberapa wilayah, Balai Jasa Konstruksi di targetkan untuk melakukan pelatihan dan upgrading instruktur dan asesor pada tahun 2020;
 - b. Fasilitasi kerja sama dengan stakeholder untuk mendukung program sertifikasi tenaga kerja konstruksi, khususnya di wilayah Timur; dan
 - c. Pendampingan oleh Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi ke Balai Jasa Konstruksi yang mengalami kendala terkait respon Balai-Balai Unor yang minim terhadap program sertifikasi;
9. Melakukan upaya dalam pemenuhan SDM di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dengan merekrut tenaga kontrak individual. Khusus untuk Balai P2JK pemenuhan SDM dilakukan dengan pemindahan SDM dari Unor dan Pemda; dan
10. Terkait pengisian data SPIM, telah dilakukan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dengan melibatkan Balai Jasa Konstruksi Wilayah sebagai unit pelaksana teknis di daerah, yang memiliki peranan dalam melakukan sosialisasi/pembekalan, pendampingan, pemantauan terhadap pengisian SPIM tersebut. Sedangkan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melakukan upaya penyusunan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi untuk pengelolaan data dan informasi yang akurat, real time dan terintegrasi.

4.1.4 Kegiatan Yang Menunjang

1. Workshop Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian PUPR

Kegiatan Workshop Pengadaan Barang dan Jasa bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa oleh Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Tahun 2019, mempersiapkan pelaksanaan



Tender/Seleksi Dini tahun anggaran 2020, dan menyepakati hasil pra-workshop terkait upaya perbaikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kementerian PUPR. Selain itu, dilakukan juga pembahasan mengenai 9 Strategi Nasional Pencegahan Fraud dalam Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian PUPR.

2. Penyusunan Draft Revisi Rancangan Kontrak Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun

Salah satu produk pengaturan kontrak konstruksi yang akan diselesaikan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi adalah Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Kontrak *Design and Build*. Hal ini didorong oleh adanya beberapa permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kontrak *Design and Build* yang dirasa sangat perlu untuk segera diatasi. Permasalahan dalam pelaksanaan kontrak *Design and Build* tersebut, yaitu sulitnya melakukan perubahan kontrak dan menentukan kriteria penerimaan output dari pekerjaan, serta pengendalian kontrak *Design and Build* yang masih sulit dilakukan oleh Pengguna Jasa dan Direktorat Teknis.

Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Kontrak *Design and Build* ini salah satunya mengacu kepada Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Menurut Pasal 52 ayat (1) dalam Perpres tersebut, pelaksanaan kontrak terdiri atas: penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ), penandatanganan kontrak, pemberian uang muka, pembayaran prestasi pekerjaan, perubahan kontrak, penyesuaian harga, penghentian kontrak atau berakhirnya kontrak, pemutusan kontrak, serah terima hasil pekerjaan, dan atau penanganan keadaan kahar.

Dengan demikian, Pedoman Pelaksanaan Kontrak *Design and Build* ini diharapkan dapat mengatasi masalah yang terjadi dalam pelaksanaan kontrak sekaligus sebagai standar yang dapat dijadikan acuan dan membantu memudahkan pengguna jasa dalam pelaksanaan kontrak *design and build*.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat beberapa kendala yakni banyaknya stakeholder yang harus dilibatkan karena perubahan standar dokumen pengadaan pekerjaan DB selain mengikuti perubahan pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018, juga harus mengakomodir hasil evaluasi pelaksanaan di lapangan, mulai dari sisi perencanaan sampai dengan pasca-pelaksanaan, selain itu substansi perubahan yang sangat ekstrim dan ketergantungan pada pihak eksternal yang tinggi menyulitkan untuk mencari kasus pembanding pada best practice internasional dan nasional.

3. Harmonisasi Penyusunan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



Kegiatan Harmonisasi Penyusunan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bertujuan untuk mewujudkan suatu system peraturan perundang-undangan yang harmonis sebagaimana perlunya penyesuaian peraturan perundang-undangan dengan

peraturan perundangan yang lain dalam

suatu negara. Pengharmonisasian dilakukan untuk menyusun Rancangan Peraturan berdasarkan Prolegnas. Pengharmonisasian dilakukan dengan cara:

- a. Memastikan bahwa rancangan peraturan mencantumkan nilai-nilai filosofi Pancasila dan pasal-pasal reancangan undang-undang yang bersangkutan tidak bertentangan dengan nilai-nilai tersebut
- b. Memastikan bahwa pasal-pasal Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memerintahkan penentukannya telah dicantumkan dengan benar dan telah selaras dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara menurut Undang-undang
- c. Menggunakan istilah hukum atau pengertian hukum secara konsisten
- d. Materi Rancangan Peraturan telah serasi/selaras dengan Undang-undang lain terkait
- e. Memastikan pedoman Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan telah dipatuhi secara konsisten

Metodologi pelaksanaan kegiatan adalah dengan *Focus Group Discussion* (FGD) dan Audiensi/Konsultasi Publik, dengan output yang dihasilkan berupa laporan Harmonisasi terkait Usaha Jasa Konstruksi

4. Penyusunan Draft Revisi Permen No 45 Tahun 2015 tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

Maksud kegiatan ini adalah dalam rangka penyusunan Draft Revisi Permen Nomor 45 Tahun 2015 tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia.

Tujuan dari kegiatan ini adalah tersedianya Revisi Peraturan Menteri Nomor 45 Tahun 2015 tentang



Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia

5. Kerja Sama Mitra Kerja

Keterlibatan aktif mitra kerja dalam pembinaan konstruksi menjadi kunci dari penciptaan jasa konstruksi nasional yang andal dan berkualitas. Dalam kerangka ini, dikembangkan strategi kerja sama dan pemberdayaan untuk mendorong peran aktif dari seluruh pemangku kepentingan sektor jasa konstruksi dalam tugas pembinaan konstruksi. Kerja sama dikembangkan dalam rangka menggalang kekuatan bersama antara Kementerian PUPR dengan seluruh mitra kerja. Adapun kerjasama yang telah dilakukan pada tahun 2019 ini sebanyak 3 kerja sama dengan mitra kerja baik Badan Usaha, Universitas, maupun Kementerian/Lembaga. Kerja sama ini dilakukan dalam rangka Pelatihan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi.

Kerja sama yang telah dibuat pada tahun 2019 adalah kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kemenristekdikti (MoU dan PKS), dan BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan kerja sama luar negeri adalah Perundingan dengan jepang yang tertuang dalam dua bentuk kerjasama yakni IJ-CEPA yang difasilitasi oleh Kementerian Perdagangan Direktorat Perundingan Jasa dan kerjasama antara Kementerian PUPR dan MILT-Jepang yang dituangkan dalam MoC (Memorandum of Cooperation). MoC ditandatangani oleh Menteri PUPR dan Menteri MILT pada tanggal 26 Desember 2019. Pada ruang lingkup MoC, bidang jasa konstruksi (*construction services*) menjadi bidang baru yang dibahas sebagai usulan dari pihak jepang yang sebelumnya menginginkan industri konstruksi (*construction industry*).

Sementara dalam IJ-CEPA, kementerian PUPR mendapatkan imbal balik berupa *capacity building* di bidang *real esatet*, sebagai bagian dari *trade off* untuk pembukaan pasar (*market*

access) bidang unresidential. Adapun *capacity building* yang menjadi tawaran Jepang bagi Indonesia adalah dalam bentuk seminar, training dan *short course*.

6. Pengembangan Skema Sertifikasi Program Kerja Sama *Link and Match* dan Dukungan Pencetakan Asesor dan Siswa Bersertifikat



Pengembangan Jabatan Kerja Program *Link and Match* dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada pihak terkait agar dapat melaksanakan program *link and match* jalur PBK di Bidang Jasa Konstruksi secara efektif dan efisien serta meningkatkan

persentase tenaga kerja konstruksi sesuai kompetensi dan bersertifikat. Ruang lingkup kegiatan ini meliputi Kementerian PUPR, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi. Produk dari kegiatan ini adalah laporan kegiatan dan jabatan kerja yang telah disesuaikan.

Selain itu, dilaksanakan juga Penyusunan Kurikulum Jabatan Kerja Program *Link and Match* SMK yang bertujuan untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pengembangan sektor jasa konstruksi melalui lembaga pendidikan. Sasaran dari kegiatan ini yaitu Kementerian PUPR, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi, Perwakilan dari Badan Usaha Jasa Konstruksi dan Kepala Sekolah SMK N 1 Jakarta

4.2 Perbandingan Kinerja

4.2.1 Perbandingan Dengan Tahun Lalu

Pada tahun 2019, Kinerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mengalami peningkatan menjadi 106,26% dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 105,23% dengan dukungan 6 Sasaran Kegiatan.

KINERJA SASARAN PROGRAM

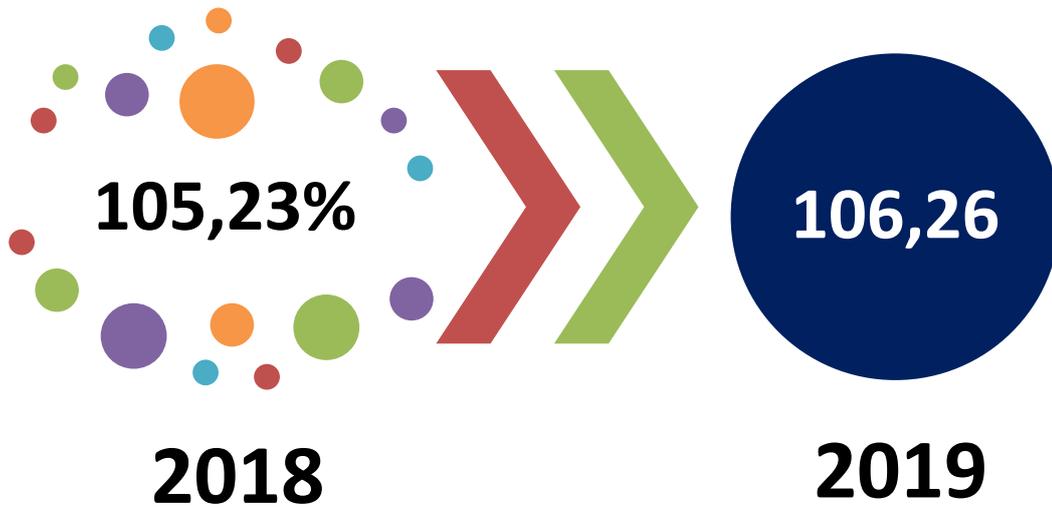


Diagram 17. Perbandingan Kinerja Sasaran Program 2018 dan 2019

KINERJA SASARAN KEGIATAN

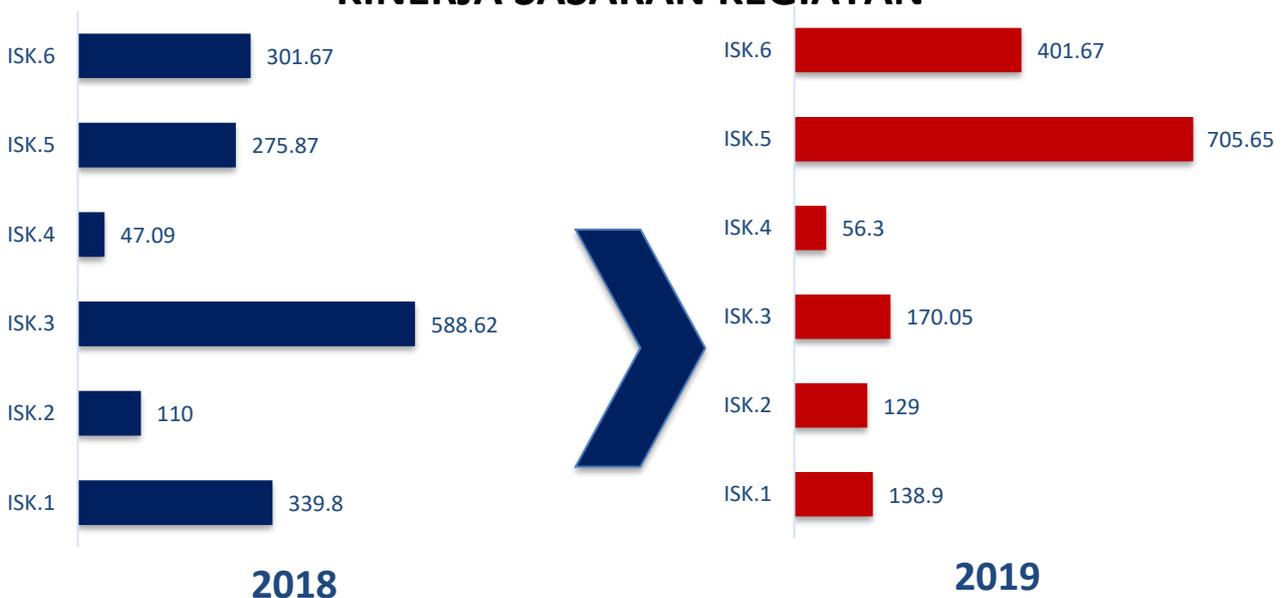


Diagram 18. Perbandingan Kinerja Sasaran Kegiatan 2018 dan 2019

Seluruh kinerja indikator sasaran kegiatan mengalami peningkatan kecuali indikator Persentase Kenaikan BUJK Berkinerja Baik walaupun masih mencapai target. Hal ini disebabkan oleh beberapa BUJK masih dalam proses perpanjangan SBU, memilih menurunkan klasifikasi menjadi menengah dan B1, dan tidak bekerja lagi di sektor konstruksi.

Untuk Indikator Sasaran Kegiatan Tingkat Kualitas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena merupakan kegiatan baru di tahun 2019. Indikator sasaran kegiatan yang mengalami peningkatan sangat signifikan adalah Indikator

Sasaran Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi. Hal ini seiring dengan program Pemerintah yaitu program percepatan sertifikasi bagi tenaga kerja konstruksi karena penyiapan sumber daya manusia konstruksi nasional merupakan bagian dari pembangunan nasional yang dapat pendorong pertumbuhan ekonomi baik lokal, regional maupun nasional. Hal ini sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 70 yang mengatur bahwa setiap Pekerja Konstruksi yang bekerja di sektor Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja.

4.2.2 Perbandingan Kinerja terhadap Renstra

Pada tahun 2019, capaian Sasaran Program Direktorat Jenderal Bina Konstruksi sebesar 95,63% dari target 90%. Capaian tersebut menghasilkan kinerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi sebesar 106,26%.

Tabel 28. Perbandingan Kinerja Sasaran Program terhadap Renstra

SASARAN KINERJA		SATUAN	TA 2019		
			TARGET	CAPAIAN	KINERJA
PROGRAM PEMBINAAN KONSTRUKSI					
1	SP1. Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional				
	ISP1. Tingkat Pengendalian Pelaksanaan Konstruksi Nasional	%	90	95,63	106,26

Sedangkan capaian Sasaran Kegiatan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dibandingkan dengan target Renstra di tahun 2019 secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

Tabel 29. Perbandingan Kinerja Sasaran Kegiatan terhadap Renstra

SASARAN KINERJA		SATUAN	TA 2019	
			TARGET	CAPAIAN
KEGIATAN				
1	SK1. Peningkatan Investasi Infrastruktur dan Pasar Konstruksi			
	ISK1. Tingkat Rasio Kapitalisasi Konstruksi	%	0	0
2	SK1. Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi			
	ISK1. Tingkat Kualitas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi	%	70	97,40
3	SK2. Peningkatan Penerapan Manajemen Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Tertib Pengadaan dan Administrasi Kontrak			
	ISK2. Persentase Kenaikan Tingkat Tertib Penyelenggaraan Konstruksi	%	11	14,19
4	SK3. Peningkatan Persentase Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) yang berkinerja baik dan Peningkatan Utilitas Produk Unggulan			
	ISK3.1. Persentase Kenaikan BUJK yang Berkinerja Baik	%	11	18,71
	ISK3.2. Persentase Kenaikan Tingkat Utilitas Produk Unggulan	%	5,55	3,12
4	SK4. Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi			

SASARAN KINERJA		SATUAN	TA 2019	
			TARGET	CAPAIAN
	ISK4. Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	%	24	169,4
5	SK5. Peningkatan Sumber Daya Manusia Penyedia Jasa Konstruksi yang Kompeten			
	ISK5. Persentase Kenaikan SDM Penyedia Jasa Konstruksi yang Kompeten	%	4	12,05
6	SK6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya			
	ISK6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Layanan	6	6

Jika dibandingkan dengan target Revisi Renstra pada tahun 2019, Sasaran Program Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melebihi target yang diperjanjikan dalam Renstra yaitu Meningkatnya Kapasitas dan Pengendalian Kualitas Konstruksi Nasional dengan realisasi 95,63% dari target 90%. Namun, terdapat satu Indikator Sasaran Kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran Program tidak mencapai target yaitu Persentase Kenaikan Tingkat Utilitas Produk Unggulan.

Untuk Persentase Kenaikan Tingkat Utilitas Produk Unggulan tercapai 3,12% kurang dari target yaitu 5,55%. Hal ini disebabkan oleh capaian pada tahun 2015 hingga 2018 kurang dari target sehingga target pada tahun 2019 adalah 5,55% yang terlampau besar agar mengejar ketertinggalan dari target total renstra 2015-2019 yaitu 15%. Selain itu capaian indikator sasaran kegiatan ini disebabkan oleh beberapa proyek yang menggunakan beton pracetak dan prategang pada tahun 2019 telah mencapai tahap akhir serta beberapa proyek berhenti sementara dimana penggunaan beton pracetak dan prategang berkurang.

Berdasarkan Revisi Renstra 2015-2019 capaian dalam 5 tahun adalah sebagai berikut:

SASARAN KINERJA	SATUAN	TARGET 2015-2019	HASIL REVISI RENSTRA					
			CAPAIAN					
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
PROGRAM PEMBINAAN KONSTRUKSI								
1 SP1. Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional								
ISP1. Tingkat Pengendalian Pelaksanaan Konstruksi Nasional	%	90	80.87	90.44	90	94.71	95.63	95.63
KEGIATAN								
1 SK1. Peningkatan Investasi Infrastruktur dan Pasar Konstruksi								
ISK1. Tingkat Rasio Kapitalisasi Konstruksi	%	88	12.77	12.18	29.27	33.99	0	88.21
OUTPUT KEGIATAN (SK 1)								
<i>1) Layanan Pembinaan Investasi Infrastruktur dan Pasar Konstruksi</i>								
a. Jumlah Draft NSPK Pembinaan Investasi Infrastruktur dan Pasar Konstruksi	Draft NSPK	17	4	4	5	5	0	18
b. Jumlah Profil Pembinaan Investasi Infrastruktur dan Pasar Konstruksi	Draft Profil	16	4	5	4	3	0	16
2 SK1. Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi								
ISK1. Tingkat Kualitas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi	%	70	0	0	0	0	97.23	97.23
OUTPUT KEGIATAN (SK 1)								
<i>1) Pembinaan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi</i>								
a. Profil Kualitas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi	Profil	1	0	0	0	0	5	5
<i>2) Pembinaan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi</i>								
a. Rata-rata Waktu Layanan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi	Hari	125	0	0	0	0	60	60
3 SK2. Peningkatan Penerapan Manajemen Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Tertib Pengadaan dan Administrasi Kontrak								
ISK2. Persentase Kenaikan Tingkat Tertib Penyelenggaraan Konstruksi	%	40	4.13	5.94	8.31	11.00	14.19	43.57
OUTPUT KEGIATAN (SK 2)								
<i>1) Layanan Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi</i>								
a. Jumlah Draft NSPK Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi	Draft NSPK	35	7	7	7	13	9	43
b. Jumlah Profil Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi	Draft Profil	25	5	5	5	5	6	26
4 SK3. Peningkatan Persentase Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) yang berkinerja baik dan Peningkatan Utilitas Produk Unggulan								
ISK3.1. Persentase Kenaikan BUJK yang Berkinerja Baik	%	184	32.37	25.18	115.83	64.75	18.71	256.84
OUTPUT KEGIATAN (SK 3)								

SASARAN KINERJA	SATUAN	TARGET 2015-2019	HASIL REVISI RENSTRA						
			CAPAIAN						
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	
<i>1) Layanan Pembinaan Kelembagaan dan Usaha Jasa Konstruksi</i>									
a. Jumlah Draft NSPK Pembinaan Kelembagaan dan Usaha Jasa Konstruksi	Draft NSPK	24	2	4	4	6	9	25	
b. Jumlah Profil Pembinaan Kelembagaan dan Usaha Jasa Konstruksi	Draft Profil	21	4	4	4	4	5	21	
ISK3.2. Persentase Kenaikan Tingkat Utilitas Produk Unggulan	%	15	1.06	1.86	4.69	1.88	3.12	12.62	
OUTPUT KEGIATAN (SK 3)									
<i>2) Layanan Pembinaan Rantai Pasok dan Produksi Produk Unggulan</i>									
a. Jumlah Draft NSPK Pembinaan Rantai Pasok dan Produksi Produk Unggulan	Draft NSPK	19	0	4	4	6	5	19	
b. Jumlah Profil Pembinaan Rantai Pasok dan Produksi Produk Unggulan	Draft Profil	20	4	4	4	4	4	20	
4 SK4. Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi									
ISK4. Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	%	159	16.11	28.48	24.64	66.21	169.36	304.8	
OUTPUT KEGIATAN (SK 4)									
<i>1) Fasilitasi Pemberdayaan Jasa Konstruksi</i>									
a. Jumlah Fasilitasi Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Angkatan	12.219	1,234	2,182	1,888	5,073	12,976	23.353	
<i>2) Layanan Kerja Sama Lembaga Pemerintah dan Masyarakat Serta Pemberdayaan Jasa Konstruksi</i>									
a. Jumlah Draft NSPK Kerja Sama Lembaga Pemerintah dan Masyarakat Serta Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Draft NSPK	9	3	1	2	2	3	11	
b. Jumlah Profil Kerja Sama Lembaga Pemerintah dan Masyarakat Serta Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Profil	19	3	4	4	4	4	19	
5 SK5. Peningkatan Sumber Daya Manusia Penyedia Jasa Konstruksi yang Kompeten									
ISK5. Persentase Kenaikan SDM Penyedia Jasa Konstruksi yang Kompeten	%	24.98	6.79	7.44	6.75	9.05	12.05	42.08	
OUTPUT KEGIATAN (SK 5)									
<i>1) Layanan Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi</i>									
a. Jumlah Draft NSPK Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	Draft NSPK	159	32	31	38	40	42	183	
b. Jumlah Profil Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	Draft Profil	23	4	3	4	4	8	23	
6 SK6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya									
ISK6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Layanan	25	5	4	5	5	6	25	
OUTPUT KEGIATAN (SK 6)									
<i>1) Layanan Dukungan Manajemen Eselon I</i>									

SASARAN KINERJA	SATUAN	TARGET 2015-2019	HASIL REVISI RENSTRA						
			CAPAIAN						
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	
a. Jumlah Layanan Manajemen	Layanan	15	3	2	3	3	4	15	
<i>2) Layanan Internal (Overhead)</i>									
a. Jumlah Layanan Internal	Layanan	5	1	1	1	1	1	5	
<i>3) Layanan Perkantoran</i>									
a. Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	5	1	1	1	1	1	5	
<i>4) Layanan Dukungan Manajemen Satker</i>									
a. Jumlah Layanan Kesatkeran	Layanan	1	0	0	0	0	1	1	

Dalam kurun waktu 2015-2019, seluruh target yang diperjanjikan dalam Revisi Renstra Kementerian PUPR 2015-2019 tercapai kecuali Indikator Sasaran Kegiatan Persentase Kenaikan Tingkat Utilitas Produk Unggulan yang hanya mencapai 12,62% dari target 15%.

4.2.3 Perbandingan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

RPJMN 2015-2019 merupakan turunan dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan melalui Perpres No. 2 Tahun 2015. RPJMN 2015-2019 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga dalam menyusun Rencana Strategis kementerian/lembaga (Renstra-KL) dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional. Untuk pelaksanaan lebih lanjut, RPJMN akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

Sasaran program Direktorat Jenderal Bina Konstruksi tersebut sudah selaras dengan sasaran pada RPJMN 2015-2019. Adapun realisasi target RPJMN pada tahun 2019 terkait bidang Bina Konstruksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 30. Perbandingan Capaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019

No	Sasaran Pokok	Total Target	Evaluasi Akhir RPJMN 2015-2019						Keterangan
			2015	2016	2017	2018	2019	Total	
A	Meningkatkan kualitas dan keterampilan pekerja								
1	Pelatihan tenaga kerja konstruksi	153.000	24.669	43.634	37.747	101.457	86.232	293.739	Tercapai
2	Sertifikasi tenaga kerja konstruksi	750.000	186.946	204.772	185.952	249.311	173.307	1.000.288	Terapai

Sedangkan untuk capaian RKP tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 31. Perbandingan Capaian dengan Target RKP 2019

PRIORITAS NASIONAL 3 : PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN											
No		Sasaran 2019 (tercantum pada RKP 2019)	Target 2019 (tercantum pada RKP 2019)*1)	Pagu 2019 berdasarkan DIPA (miliar rupiah)	Target 2019 (Revisi DIPA)	Pagu 2019 (Revisi DIPA) (miliar rupiah)	Capaian	Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (miliar rupiah)	Program/Kegiatan/ Komponen pada K/L Pelaksana	Keterangan
1		3	4	5	4a.	5a.	9	10	11	13	14
Prioritas Nasional: Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya											
Program Prioritas 4: Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja											
4.2 Kegiatan Prioritas: Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi											
	1	Meningkatnya tenaga kerja keluaran lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi yang mampu langsung bekerja									
	a	Jumlah pelatihan sebanyak 1.400.000 orang	16.000 orang	32.00	21.000 orang	42.00	21.303 orang	101.44%	38.87	Program Pembinaan Konstruksi/Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasional	SMK, Politeknik, dan Universitas
4.3 Kegiatan Prioritas: Pemantapan Sistem Sertifikasi Kompetensi											
	1	Meningkatnya tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi									
	a	Jumlah tenaga kerja yang mendapat sertifikat kompetensi sebanyak 1.000.000 orang	170.000 orang	134.15			152.004 orang	89.41%	159.82	Program Pembinaan Konstruksi/Kegiatan Fasilitas Pemberdayaan Jasa Konstruksi	

4.3 Realisasi Anggaran

4.3.1 Analisis Efisiensi Sumber Daya

Penyerapan anggaran Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menunjukkan hasil yang baik yaitu 89,23%, namun penyerapan tersebut menurun dibandingkan dengan tahun lalu yaitu 98,94%. Capaian penyerapan anggaran terbaik di tahun 2019 dihasilkan dari kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi (98,69%) sedangkan penyerapan terendah dihasilkan dari kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi (75,70%).

Jika berdasarkan jenis belanjanya, belanja pegawai berhasil terserap 89,97% atau sebesar Rp66M, belanja barang 94,34% atau sebesar Rp409M, dan belanja modal 63,22% atau sebesar Rp55M. Penyerapan belanja barang merupakan penyerapan tertinggi karena banyaknya pelaksanaan kegiatan pelatihan dan sertifikasi yang membutuhkan jenis belanja barang untuk mencapai target tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikat. Belanja modal merupakan jenis belanja dengan penyerapan terendah karena adanya paket kontraktual yang gagal lelang. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memiliki nilai efisiensi anggaran sebesar 112%. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan realisasi anggaran yang berkurang dibandingkan rencana, output-output prioritas yang ditargetkan tetap dapat terpenuhi.

Efektif dan efisiennya kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dipengaruhi oleh jumlah sumber daya manusia yang ada. Dengan jumlah sumber daya manusia yang cukup dan didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai akan mampu mendukung tercapainya target kinerja kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk dapat menjalankan efisiensi dan efektivitas kinerja sumber daya manusia di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi ini adalah dengan mempekerjakan tenaga pendukung individual yang bertugas membantu kegiatan substansi dan mengejar target capaian program di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Dengan langkah tersebut efisiensi, efektivitas dan stabilitas kinerja kegiatan dapat terjaga sehingga dapat mendukung pencapaian program pembinaan konstruksi.

4.4 Penghargaan

Pada tahun 2019, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mendapat beberapa penghargaan sebagai wujud apresiasi atas tercapainya kinerja yang baik, antara lain:

1. Dari hasil review BPKP 2018, tingkat capaian TKDN Kementerian PUPR mencapai 85,86% (Rp 47,08 triliun), sehingga di bulan Desember 2019 Kementerian PUPR mendapatkan

penghargaan Apresiasi Tertinggi P3DN Tahun 2019 pada Forum Bisnis dan Apresiasi P3DN (Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri) dari Kementerian Perindustrian.

2. Sistem Informasi Belajar Intensif Mandiri Bidang Konstruksi (Sibima) mendapatkan penghargaan TOP 99 Sistem Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) untuk Kategori Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 18 Juli 2019.
3. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melalui Balai Penerapan Teknologi Konstruksi menerima penghargaan Peringkat VI terbaik penilaian PPID Kementerian PUPR tahun 2019 kategori pelaksana PPID Daerah tipe II dalam acara Malam Penganugerahan Penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pelaksana PPID Kementerian PUPR Tahun 2019, di Hotel Grand Kemang Jakarta

BAB 5 PENUTUP

5.1 Permasalahan

Permasalahan secara umum yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan di Tahun 2018 ini antara lain:

1. Rendahnya pengawasan konstruksi di lapangan terutama K3;
2. Kurangnya pengawas K3 di daerah;
3. Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan jakon di daerah karena masih belum optimalnya kinerja OPD Jakon daerah dan masa transisi LPJK berdasarkan UUK 2/2017;
4. Perubahan struktur organisasi dengan pembentukan Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi dan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi di 34 Provinsi sehingga menyebabkan penurunan progres penyerapan anggaran;
5. Target pelatihan dan sertifikasi yang besar yaitu sebanyak 26.000 pelatihan, 170.000 sertifikasi dan 21.000 sertifikasi vokasional jika dibandingkan dengan target tahun sebelumnya yaitu hanya menargetkan tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi sebesar 36.383 orang;
6. Beberapa hal yang menyebabkan pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi kurang optimal adalah sebagai berikut:
 - a. Kurangnya jumlah asesor dari LPJKP di beberapa Provinsi;
 - b. Minimnya respon dari unit organisasi lain terkait program sertifikasi tenaga kerja;
 - c. Mobilisasi peserta yang sulit dikarenakan lokasi kegiatan yang cukup jauh;
 - d. Terdapat permasalahan penolakan sebagian asosiasi profesi untuk bergabung dalam program percepatan sertifikasi dikarenakan biaya;
 - e. Utilisasi Mobile Training Unit (M TU) yang tidak optimal untuk sertifikasi tenaga terampil di daerah yang sulit dijangkau;
7. Kebijakan Omnibuslaw membuat beberapa NSPK seperti RPP UU Jasa Konstruksi dan Permen terkait Lembaga direviu ulang;
8. Kurangnya kapasitas dan jumlah SDM sehingga merekrut tenaga kontrak individual secara tahunan;
9. Kurang terkelolanya data dan informasi dikarenakan pengumpulan data masih belum kontinu dan terintegrasi.

5.2 Rekomendasi

Adapun langkah tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk perbaikan ditahun depan antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan program yang mendukung pengawasan konstruksi di lapangan dan pemberdayaan SDM konstruksi daerah bidang K3;
2. Melakukan bimtek OPD dalam rangka pembinaan daerah bidang jasa konstruksi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
3. Pemenuhan kekurangan SDM kompeten untuk internal Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, khususnya untuk Balai P2JK (satker baru). Hal tersebut dilakukan diantaranya dengan penyusunan rencana pengembangan kapasitas staf melalui keikutsertaan pada training terkait dan *transfer of knowledge* secara berkala;
4. Untuk strategi peningkatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi, akan dilakukan pemetaan pola kerjasama di setiap daerah berdasarkan input dari BJKW;
5. Terkait pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi, beberapa hal yang perlu ditindak lanjuti adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan penyusunan SOP Quality Assurance untuk menjaga mutu kegiatan pelatihan dan sertifikasi di lapangan;
 - b. Pencetakan instruktur dan asesor pelatihan dan sertifikasi;
 - c. Balai Jasa Konstruksi melaksanakan fungsi pengaturan, bimbingan, dan pengawasan LPPK dan LSP di daerah;
 - d. Melakukan kerja sama dengan stakeholder dalam pengadaan alat uji;
 - e. Mengidentifikasi standar alat uji minimal jabatan kerja dasar;
 - f. Melakukan modernisasi dan digitalisasi modul;
 - g. Melakukan ratifikasi modul-modul dari stakeholder;
 - h. Menyusun pedoman inpassing Master Asesor untuk mencetak asesor-asesor yang kompeten;
 - i. Melakukan pengkajian ulang sistem pinjam pakai Mobile Training Unit (MTU) di Pemerintah Provinsi terkait pemanfaatan dan masa akhir pinjam MTU
 - j. Pemindehan biaya operasional dan pengelolaan MTU dari Balai MPK ke Balai Jasa Konstruksi;
 - k. Menyusun SOP mengenai tata kelola MTU;

6. Melakukan review kembali terhadap peraturan perundang-undangan bidang Jasa Konstruksi dan rancangan peraturan yang sedang disusun agar dapat selaras dengan substansi UU Omnibus Law;
7. Mengembangkan sistem data dan informasi eksisting agar data yang sudah terkumpul dapat terintegrasi dan terolah serta dijadikan informasi dalam pengambilan kebijakan.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI – KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Syarif Burhanuddin
 Jabatan : Direktur Jenderal Bina Konstruksi

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : M. Basuki Hadimuljono
 Jabatan : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

M. BASUKI HADIMULJONO

Jakarta, Januari 2019

Pihak Pertama

SYARIF BURHANUDDIN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1) PROGRAM PEMBINAAN KONSTRUKSI			
1	Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional	1 Tingkat pengendalian pelaksanaan konstruksi nasional	90%

Program :

- 1 Pembinaan Konstruksi

Anggaran
Rp. 558.160.700.000

JAKARTA, JANUARI 2019

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT



M. BASUKI HADIMULJONO

DIREKTUR JENDERAL
BINA KONSTRUKSI



SYARIF BURHANUDDIN



REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI – KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Syarif Burhanuddin
 Jabatan : Direktur Jenderal Bina Konstruksi

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : M. Basuki Hadimuljono
 Jabatan : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2019

Pihak Kedua

M. BASUKI HADIMULJONO

Pihak Pertama

SYARIF BURHANUDDIN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1) PROGRAM PEMBINAAN KONSTRUKSI			
1	Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional	1. Tingkat pengendalian pelaksanaan konstruksi nasional	90%

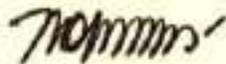
Program :

1. Pembinaan Konstruksi

Anggaran Awal	Anggaran Revisi
Rp. 558.160.700.000	Rp. 594.305.997.000

JAKARTA, DESEMBER 2019

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT



M. BASUKI HADIMULJONO

DIREKTUR JENDERAL
BINA KONSTRUKSI



SYARIF BURHANUDDIN

RENCANA AKSI DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

A. Rencana Aksi Keuangan

Berikut adalah rencana aksi keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi pada TA 2019:

No	Kode	Program/Kegiatan/Output	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
1	06	Program Pembinaan Konstruksi	3,08	8,69	15,26	22,57	30,11	37,76	45,80	53,86	63,64	76,08	86,02	100,00
1	2435	Penyelenggaraan Pelayanan Teknis dan Administrasi	3,80	8,11	13,46	19,69	26,55	34,71	42,77	50,81	62,17	72,47	82,01	100,00
2	2436	Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi	2,56	7,22	11,00	14,50	20,72	23,83	30,36	39,50	44,59	51,42	55,63	100,00
3	2437	Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi	0,00	2,26	9,70	19,33	33,78	48,09	53,64	65,34	76,07	88,81	94,40	100,00
4	2438	Pembinaan Investasi Infrastruktur	2,74	8,21	17,62	29,37	40,68	54,37	68,06	77,19	86,31	95,44	98,17	100,00
5	2439	Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	2,42	6,00	17,59	20,39	36,29	42,73	58,49	63,99	69,86	75,42	83,56	100,00
6	2523	Penyelenggaraan Pendidikan Vokasional	3,02	11,83	20,59	31,77	38,27	46,24	51,01	55,63	62,81	83,27	89,55	100,00
7	4201	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi	0,00	0,00	0,08	0,11	2,62	10,49	23,25	36,05	52,46	68,40	82,43	100,00
8	5590	Kerjasama dan Pemberdayaan	2,97	10,75	18,78	27,95	35,74	42,46	50,15	58,18	66,59	80,91	93,08	100,00
	TOTAL		3,08	8,69	15,26	22,57	30,11	37,76	45,80	53,86	63,64	76,08	86,02	100,00

B. Rencana Aksi Fisik

Berikut adalah rencana aksi fisik di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi pada TA 2019:

No	Kode	Program/Kegiatan/Output	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
1	06	Program Pembinaan Konstruksi	2,77	7,73	13,87	20,63	27,62	36,95	46,61	56,59	67,59	79,49	88,80	100,00
1	2435	Penyelenggaraan Pelayanan Teknis dan Administrasi	3,24	6,88	11,45	16,69	22,28	32,58	42,73	52,83	64,95	76,15	86,59	100,00
2	2436	Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi	2,56	7,22	11,00	14,50	20,72	23,83	30,36	39,50	44,59	51,42	55,63	100,00
3	2437	Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi	0,00	2,26	9,70	19,33	33,61	48,09	53,64	65,34	77,11	88,81	94,40	100,00
4	2438	Pembinaan Investasi Infrastruktur	4,56	9,13	19,45	32,11	42,51	57,11	70,80	79,92	89,05	97,26	99,09	100,00
5	2439	Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	2,42	6,00	17,59	20,39	36,29	42,73	58,49	63,99	69,86	75,42	83,56	100,00
6	2523	Penyelenggaraan Pendidikan Vokasional	3,22	12,49	21,19	31,32	37,30	45,58	50,80	56,27	67,00	83,52	89,97	100,00
7	4201	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi	0,00	0,00	0,03	0,04	1,12	12,96	27,81	46,75	62,33	77,12	93,12	100,00
8	5590	Kerjasama dan Pemberdayaan	2,98	10,81	20,01	30,49	39,94	47,64	56,10	64,76	73,96	86,45	94,01	100,00
	TOTAL		2,77	7,73	13,87	20,63	27,62	36,95	46,61	56,59	67,59	79,49	88,80	100,00

Lampiran 3. Capaian Bulanan

1. JANUARI

NO	Kode	Program/Kegiatan/Output	Target	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Bulan Januari				
						Keuangan		Fisik		
						RN	RL	RN	RL	Kinerja
1	06	Program Pembinaan Konstruksi		594.305.997	530.985.950	3,08	1,53	2,77	1,80	64,96
1	2435	Penyelenggaraan Pelayanan Teknis dan Administrasi		272.124.869	229.519.904	3,80	2,00	3,24	2,49	76,76
1	950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	12 Layanan	19.319.952	19.144.621	7,27	1,10	7,27	0,86	11,87
2	951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	47,00 Layanan	87.428.517	55.195.013	1,19	0,04	1,42	0,05	3,66
3	970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	12 Layanan	31.593.507	31.270.772	1,30	0,24	0,95	0,27	28,57
4	994	Layanan Perkantoran	12 Layanan	133.782.893	123.909.497	5,10	3,81	4,06	4,61	113,44
2	2436	Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi		21.475.820	16.257.104	2,56	0,79	2,56	1,85	72,55
5	001	Layanan Pembinaan Kelembagaan dan Usaha Jasa Konstruksi	3,00 Layanan	10.749.000	9.750.832	3,62	1,58	3,62	2,78	76,85
6	002	Layanan Pembinaan Rantai Pasok dan Produksi Produk Unggulan	3,00 Layanan	10.726.820	6.506.272	1,49	0,00	1,49	0,92	62,08
3	2437	Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi		18.400.000	18.312.880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	001	Layanan Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi	4,00 Layanan	18.400.000	18.312.880	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4	2438	Pembinaan Investasi Infrastruktur		2.172.448	2.172.445	2,74	10,57	4,56	12,16	266,60
8	001	Layanan Pembinaan Investasi Infrastruktur dan Pasar Konstruksi	4,00 Layanan	2.172.448	2.172.445	2,74	10,57	4,56	12,16	266,60
5	2439	Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi		18.200.784	17.901.845	2,42	2,48	2,42	2,51	103,83
9	001	Layanan Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	4,00 Layanan	18.200.784	17.901.845	2,42	2,48	2,42	2,51	103,83
6	2523	Penyelenggaraan Pendidikan Vokasional		42.000.000	38.879.512	3,02	0,55	3,22	1,31	40,77
10	001	Pelatihan SDM Vokasional Bidang Konstruksi	21.000,00 Orang	42.000.000	38.879.512	3,02	0,55	3,22	1,31	40,77
7	4201	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi		25.361.672	24.433.371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	001	Pembinaan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi	3,00 Profil	12.147.152	12.134.217	0,00	0,00	0,00	0,00	-
12	002	Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi	4.250,00 Hari	13.214.520	12.299.154	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8	5590	Kerjasama dan Pemberdayaan		194.570.404	183.508.889	2,97	1,32	2,98	1,20	40,32
13	001	Layanan Kerja Sama Lembaga Pemerintah dan Masyarakat serta Pemberdayaan Jasa Konstruksi	6,00 Layanan	11.227.256	10.770.356	3,18	2,10	3,18	2,10	66,25
14	002	Fasilitasi Pemberdayaan Jasa Konstruksi	1.300,00 Angkatan	183.343.148	172.738.534	2,95	1,27	2,97	1,15	38,62
	TOTAL			594.305.997	530.985.950	3,08	1,53	2,77	1,80	64,96

Lampiran 3. Capaian Bulanan

2. FEBRUARI

NO	Kode	Program/Kegiatan/Output	Target	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Bulan Februari				
						Keuangan		Fisik		
						RN	RL	RN	RL	Kinerja
1	06	Program Pembinaan Konstruksi		594.305.997	530.985.950	8,69	5,68	7,73	6,08	78,65
1	2435	Penyelenggaraan Pelayanan Teknis dan Administrasi		272.124.869	229.519.904	8,11	5,36	6,88	5,97	86,74
1	950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	12 Layanan	19.319.952	19.144.621	13,64	7,32	13,64	7,64	56,02
2	951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	47,00 Layanan	87.428.517	55.195.013	2,08	0,12	2,42	0,14	5,98
3	970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	12 Layanan	31.593.507	31.270.772	2,96	1,68	2,09	1,68	80,59
4	994	Layanan Perkantoran	12 Layanan	133.782.893	123.909.497	11,31	9,37	9,03	10,01	110,85
2	2436	Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi		21.475.820	16.257.104	7,22	5,81	7,22	6,52	90,30
5	001	Layanan Pembinaan Kelembagaan dan Usaha Jasa Konstruksi	3,00 Layanan	10.749.000	9.750.832	11,74	10,29	11,74	10,83	92,27
6	002	Layanan Pembinaan Rantai Pasok dan Produksi Produk Unggulan	3,00 Layanan	10.726.820	6.506.272	2,69	1,32	2,69	2,20	81,72
3	2437	Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi		18.400.000	18.312.880	2,26	3,40	2,26	3,82	169,29
7	001	Layanan Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi	4,00 Layanan	18.400.000	18.312.880	2,26	3,40	2,26	3,82	169,29
4	2438	Pembinaan Investasi Infrastruktur		2.172.448	2.172.445	8,21	70,33	9,13	70,76	775,45
8	001	Layanan Pembinaan Investasi Infrastruktur dan Pasar Konstruksi	4,00 Layanan	2.172.448	2.172.445	8,21	70,33	9,13	70,76	775,45
5	2439	Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi		18.200.784	17.901.845	6,00	6,30	6,00	6,38	106,31
9	001	Layanan Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	4,00 Layanan	18.200.784	17.901.845	6,00	6,30	6,00	6,38	106,31
6	2523	Penyelenggaraan Pendidikan Vokasional		42.000.000	38.879.512	11,83	5,99	12,49	6,86	54,92
10	001	Pelatihan SDM Vokasional Bidang Konstruksi	21.000,00 Orang	42.000.000	38.879.512	11,83	5,99	12,49	6,86	54,92
7	4201	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi		25.361.672	24.433.371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	001	Pembinaan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi	3,00 Profil	12.147.152	12.134.217	0,00	0,00	0,00	0,00	-
12	002	Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi	4.250,00 Hari	13.214.520	12.299.154	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8	5590	Kerjasama dan Pemberdayaan		194.570.404	183.508.889	10,75	6,22	10,81	6,26	57,88
13	001	Layanan Kerja Sama Lembaga Pemerintah dan Masyarakat serta Pemberdayaan Jasa Konstruksi	6,00 Layanan	11.227.256	10.770.356	8,74	6,10	8,74	6,10	69,83
14	002	Fasilitasi Pemberdayaan Jasa Konstruksi	1.300,00 Angkatan	183.343.148	172.738.534	10,88	6,22	10,94	6,27	57,30
	TOTAL			594.305.997	530.985.950	8,69	5,68	7,73	6,08	78,65

Lampiran 3. Capaian Bulanan

3. MARET

NO	Kode	Program/Kegiatan/Output	Target	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Bulan Maret				
						Keuangan		Fisik		
						RN	RL	RN	RL	Kinerja
1	06	Program Pembinaan Konstruksi		594.305.997	530.985.950	15,26	12,24	13,87	13,21	95,25
1	2435	Penyelenggaraan Pelayanan Teknis dan Administrasi		272.124.869	229.519.904	13,46	9,61	11,45	10,77	94,07
1	950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	12 Layanan	19.319.952	19.144.621	18,19	13,86	18,19	12,58	69,16
2	951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	47,00 Layanan	87.428.517	55.195.013	3,59	1,42	4,45	1,63	36,63
3	970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	12 Layanan	31.593.507	31.270.772	8,85	6,24	6,08	4,06	66,66
4	994	Layanan Perkantoran	12 Layanan	133.782.893	123.909.497	18,43	15,14	14,66	17,22	117,49
2	2436	Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi		21.475.820	16.257.104	11,00	10,35	11,00	10,33	93,90
5	001	Layanan Pembinaan Kelembagaan dan Usaha Jasa Konstruksi	3,00 Layanan	10.749.000	9.750.832	16,61	15,42	16,61	15,78	94,97
6	002	Layanan Pembinaan Rantai Pasok dan Produksi Produk Unggulan	3,00 Layanan	10.726.820	6.506.272	5,38	5,27	5,38	4,87	90,57
3	2437	Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi		18.400.000	18.312.880	9,70	7,66	9,70	8,21	84,65
7	001	Layanan Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi	4,00 Layanan	18.400.000	18.312.880	9,70	7,66	9,70	8,21	84,65
4	2438	Pembinaan Investasi Infrastruktur		2.172.448	2.172.445	17,62	77,14	19,45	77,14	396,66
8	001	Layanan Pembinaan Investasi Infrastruktur dan Pasar Konstruksi	4,00 Layanan	2.172.448	2.172.445	17,62	77,14	19,45	77,14	396,66
5	2439	Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi		18.200.784	17.901.845	17,59	10,70	17,59	10,84	61,64
9	001	Layanan Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	4,00 Layanan	18.200.784	17.901.845	17,59	10,70	17,59	10,84	61,64
6	2523	Penyelenggaraan Pendidikan Vokasional		42.000.000	38.879.512	20,59	17,38	21,19	19,95	94,16
10	001	Pelatihan SDM Vokasional Bidang Konstruksi	21.000,00 Orang	42.000.000	38.879.512	20,59	17,38	21,19	19,95	94,16
7	4201	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi		25.361.672	24.433.371	0,08	0,00	0,03	0,00	0,00
11	001	Pembinaan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi	3,00 Profil	12.147.152	12.134.217	0,00	0,00	0,00	0,00	-
12	002	Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi	4.250,00 Hari	13.214.520	12.299.154	0,14	0,00	0,03	0,00	0,00
8	5590	Kerjasama dan Pemberdayaan		194.570.404	183.508.889	18,78	16,45	20,01	17,03	85,14
13	001	Layanan Kerja Sama Lembaga Pemerintah dan Masyarakat serta Pemberdayaan Jasa Konstruksi	6,00 Layanan	11.227.256	10.770.356	18,27	12,36	18,27	12,36	67,68
14	002	Fasilitasi Pemberdayaan Jasa Konstruksi	1.300,00 Angkatan	183.343.148	172.738.534	18,81	16,71	20,11	17,32	86,12
	TOTAL			594.305.997	530.985.950	15,26	12,24	13,87	13,21	95,25

Lampiran 3. Capaian Bulanan

4. APRIL

NO	Kode	Program/Kegiatan/Output	Target	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Bulan April				
						Keuangan		Fisik		
						RN	RL	RN	RL	Kinerja
1	06	Program Pembinaan Konstruksi		594.305.997	530.985.950	22,57	18,85	20,63	20,54	99,59
1	2435	Penyelenggaraan Pelayanan Teknis dan Administrasi		272.124.869	229.519.904	19,69	15,64	16,69	17,23	103,22
1	950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	12 Layanan	19.319.952	19.144.621	30,92	19,57	30,92	16,23	52,50
2	951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	47,00 Layanan	87.428.517	55.195.013	6,19	6,47	7,78	7,48	96,13
3	970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	12 Layanan	31.593.507	31.270.772	14,84	15,84	10,13	13,14	129,71
4	994	Layanan Perkantoran	12 Layanan	133.782.893	123.909.497	25,43	21,01	20,05	23,80	118,67
2	2436	Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi		21.475.820	16.257.104	14,50	13,59	14,50	13,80	95,17
5	001	Layanan Pembinaan Kelembagaan dan Usaha Jasa Konstruksi	3,00 Layanan	10.749.000	9.750.832	20,17	18,78	20,17	19,33	95,86
6	002	Layanan Pembinaan Rantai Pasok dan Produksi Produk Unggulan	3,00 Layanan	10.726.820	6.506.272	8,82	8,39	8,82	8,25	93,60
3	2437	Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi		18.400.000	18.312.880	19,33	10,54	19,33	11,73	60,66
7	001	Layanan Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi	4,00 Layanan	18.400.000	18.312.880	19,33	10,54	19,33	11,73	60,66
4	2438	Pembinaan Investasi Infrastruktur		2.172.448	2.172.445	29,37	97,45	32,11	97,45	303,51
8	001	Layanan Pembinaan Investasi Infrastruktur dan Pasar Konstruksi	4,00 Layanan	2.172.448	2.172.445	29,37	97,45	32,11	97,45	303,51
5	2439	Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi		18.200.784	17.901.845	20,39	18,53	20,39	18,71	91,75
9	001	Layanan Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	4,00 Layanan	18.200.784	17.901.845	20,39	18,53	20,39	18,71	91,75
6	2523	Penyelenggaraan Pendidikan Vokasional		42.000.000	38.879.512	31,77	30,66	31,32	33,82	107,98
10	001	Pelatihan SDM Vokasional Bidang Konstruksi	21.000,00 Orang	42.000.000	38.879.512	31,77	30,66	31,32	33,82	107,98
7	4201	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi		25.361.672	24.433.371	0,11	0,00	0,04	0,00	0,00
11	001	Pembinaan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi	3,00 Profil	12.147.152	12.134.217	0,00	0,00	0,00	0,00	-
12	002	Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi	4.250,00 Hari	13.214.520	12.299.154	0,19	0,00	0,04	0,00	0,00
8	5590	Kerjasama dan Pemberdayaan		194.570.404	183.508.889	27,95	23,78	30,49	25,67	84,18
13	001	Layanan Kerja Sama Lembaga Pemerintah dan Masyarakat serta Pemberdayaan Jasa Konstruksi	6,00 Layanan	11.227.256	10.770.356	27,01	18,48	27,01	18,48	68,42
14	002	Fasilitasi Pemberdayaan Jasa Konstruksi	1.300,00 Angkatan	183.343.148	172.738.534	28,00	24,11	30,70	26,11	85,03
	TOTAL			594.305.997	530.985.950	22,57	18,85	20,63	20,54	99,59

Lampiran 3. Capaian Bulanan

5. MEI

NO	Kode	Program/Kegiatan/Output	Target	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Bulan Mei				
						Keuangan		Fisik		
						RN	RL	RN	RL	Kinerja
1	06	Program Pembinaan Konstruksi		594.305.997	530.985.950	30,11	28,17	27,62	29,56	107,03
1	2435	Penyelenggaraan Pelayanan Teknis dan Administrasi		272.124.869	229.519.904	26,55	27,10	22,28	27,90	125,23
1	950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	12 Layanan	19.319.952	19.144.621	37,74	37,25	37,74	29,82	79,03
2	951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	47,00 Layanan	87.428.517	55.195.013	8,63	13,40	9,90	15,56	157,20
3	970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	12 Layanan	31.593.507	31.270.772	23,84	33,30	16,18	22,58	139,53
4	994	Layanan Perkantoran	12 Layanan	133.782.893	123.909.497	33,81	33,11	26,61	35,80	134,54
2	2436	Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi		21.475.820	16.257.104	20,72	20,48	20,72	19,92	96,17
5	001	Layanan Pembinaan Kelembagaan dan Usaha Jasa Konstruksi	3,00 Layanan	10.749.000	9.750.832	30,15	29,22	30,15	29,27	97,08
6	002	Layanan Pembinaan Rantai Pasok dan Produksi Produk Unggulan	3,00 Layanan	10.726.820	6.506.272	11,27	11,72	11,27	10,56	93,73
3	2437	Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi		18.400.000	18.312.880	33,78	18,84	33,61	21,27	63,28
7	001	Layanan Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi	4,00 Layanan	18.400.000	18.312.880	33,78	18,84	33,61	21,27	63,28
4	2438	Pembinaan Investasi Infrastruktur		2.172.448	2.172.445	40,68	100,00	42,51	100,00	235,25
8	001	Layanan Pembinaan Investasi Infrastruktur dan Pasar Konstruksi	4,00 Layanan	2.172.448	2.172.445	40,68	100,00	42,51	100,00	235,25
5	2439	Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi		18.200.784	17.901.845	36,29	29,03	36,29	29,31	80,77
9	001	Layanan Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	4,00 Layanan	18.200.784	17.901.845	36,29	29,03	36,29	29,31	80,77
6	2523	Penyelenggaraan Pendidikan Vokasional		42.000.000	38.879.512	38,27	38,85	37,30	42,77	114,67
10	001	Pelatihan SDM Vokasional Bidang Konstruksi	21.000,00 Orang	42.000.000	38.879.512	38,27	38,85	37,30	42,77	114,67
7	4201	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi		25.361.672	24.433.371	2,62	0,00	1,12	0,00	0,00
11	001	Pembinaan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi	3,00 Profil	12.147.152	12.134.217	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00
12	002	Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi	4.250,00 Hari	13.214.520	12.299.154	0,76	0,00	0,25	0,00	0,00
8	5590	Kerjasama dan Pemberdayaan		194.570.404	183.508.889	35,74	31,87	39,94	33,86	84,78
13	001	Layanan Kerja Sama Lembaga Pemerintah dan Masyarakat serta Pemberdayaan Jasa Konstruksi	6,00 Layanan	11.227.256	10.770.356	34,15	26,96	34,15	26,96	78,95
14	002	Fasilitasi Pemberdayaan Jasa Konstruksi	1.300,00 Angkatan	183.343.148	172.738.534	35,84	32,18	40,29	34,28	85,09
	TOTAL			594.305.997	530.985.950	30,11	28,17	27,62	29,56	107,03

Lampiran 3. Capaian Bulanan

6. JUNI

NO	Kode	Program/Kegiatan/Output	Target	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Bulan Juni				
						Keuangan		Fisik		
						RN	RL	RN	RL	Kinerja
1	06	Program Pembinaan Konstruksi		594.305.997	530.985.950	37,76	31,62	36,95	33,60	90,94
1	2435	Penyelenggaraan Pelayanan Teknis dan Administrasi		272.124.869	229.519.904	34,71	32,13	32,58	34,33	105,36
1	950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	12 Layanan	19.319.952	19.144.621	52,28	39,26	52,28	38,40	73,45
2	951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	47,00 Layanan	87.428.517	55.195.013	12,34	13,66	13,32	15,82	118,79
3	970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	12 Layanan	31.593.507	31.270.772	33,79	38,23	28,39	36,53	128,65
4	994	Layanan Perkantoran	12 Layanan	133.782.893	123.909.497	42,66	41,73	38,33	43,59	113,71
2	2436	Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi		21.475.820	16.257.104	23,83	22,60	23,83	22,93	96,24
5	001	Layanan Pembinaan Kelembagaan dan Usaha Jasa Konstruksi	3,00 Layanan	10.749.000	9.750.832	33,25	31,86	33,25	32,37	97,35
6	002	Layanan Pembinaan Rantai Pasok dan Produksi Produk Unggulan	3,00 Layanan	10.726.820	6.506.272	14,39	13,32	14,39	13,48	93,68
3	2437	Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi		18.400.000	18.312.880	48,09	22,48	48,09	25,11	52,22
7	001	Layanan Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi	4,00 Layanan	18.400.000	18.312.880	48,09	22,48	48,09	25,11	52,22
4	2438	Pembinaan Investasi Infrastruktur		2.172.448	2.172.445	54,37	100,00	57,11	100,00	175,10
8	001	Layanan Pembinaan Investasi Infrastruktur dan Pasar Konstruksi	4,00 Layanan	2.172.448	2.172.445	54,37	100,00	57,11	100,00	175,10
5	2439	Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi		18.200.784	17.901.845	42,73	33,19	42,73	34,01	79,61
9	001	Layanan Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	4,00 Layanan	18.200.784	17.901.845	42,73	33,19	42,73	34,01	79,61
6	2523	Penyelenggaraan Pendidikan Vokasional		42.000.000	38.879.512	46,24	40,59	45,58	44,76	98,19
10	001	Pelatihan SDM Vokasional Bidang Konstruksi	21.000,00 Orang	42.000.000	38.879.512	46,24	40,59	45,58	44,76	98,19
7	4201	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi		25.361.672	24.433.371	10,49	3,55	12,96	3,55	27,41
11	001	Pembinaan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi	3,00 Profil	12.147.152	12.134.217	15,00	7,42	15,00	7,42	49,46
12	002	Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi	4.250,00 Hari	13.214.520	12.299.154	6,98	0,00	12,51	0,00	0,00
8	5590	Kerjasama dan Pemberdayaan		194.570.404	183.508.889	42,46	33,58	47,64	35,35	74,20
13	001	Layanan Kerja Sama Lembaga Pemerintah dan Masyarakat serta Pemberdayaan Jasa Konstruksi	6,00 Layanan	11.227.256	10.770.356	39,71	30,19	39,71	30,19	76,02
14	002	Fasilitasi Pemberdayaan Jasa Konstruksi	1.300,00 Angkatan	183.343.148	172.738.534	42,63	33,79	48,13	35,67	74,11
	TOTAL			594.305.997	530.985.950	37,76	31,62	36,95	33,60	90,94

Lampiran 3. Capaian Bulanan

7. JULI

NO	Kode	Program/Kegiatan/Output	Target	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Bulan Juli				
						Keuangan		Fisik		
						RN	RL	RN	RL	Kinerja
1	06	Program Pembinaan Konstruksi		594.305.997	530.985.950	45,80	39,16	46,61	41,03	88,04
1	2435	Penyelenggaraan Pelayanan Teknis dan Administrasi		272.124.869	229.519.904	42,77	39,41	42,73	41,84	97,91
1	950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	12 Layanan	19.319.952	19.144.621	67,73	51,53	67,73	49,37	72,89
2	951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	47,00 Layanan	87.428.517	55.195.013	14,67	14,26	15,66	16,21	103,45
3	970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	12 Layanan	31.593.507	31.270.772	47,23	61,27	42,74	55,71	130,37
4	994	Layanan Perkantoran	12 Layanan	133.782.893	123.909.497	50,98	48,93	49,49	51,84	104,75
2	2436	Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi		21.475.820	16.257.104	30,36	29,81	30,36	29,48	97,09
5	001	Layanan Pembinaan Kelembagaan dan Usaha Jasa Konstruksi	3,00 Layanan	10.749.000	9.750.832	42,90	41,92	42,90	42,13	98,22
6	002	Layanan Pembinaan Rantai Pasok dan Produksi Produk Unggulan	3,00 Layanan	10.726.820	6.506.272	17,80	17,67	17,80	16,80	94,38
3	2437	Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi		18.400.000	18.312.880	53,64	29,61	53,64	31,41	58,56
7	001	Layanan Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi	4,00 Layanan	18.400.000	18.312.880	53,64	29,61	53,64	31,41	58,56
4	2438	Pembinaan Investasi Infrastruktur		2.172.448	2.172.445	68,06	100,00	70,80	100,00	141,25
8	001	Layanan Pembinaan Investasi Infrastruktur dan Pasar Konstruksi	4,00 Layanan	2.172.448	2.172.445	68,06	100,00	70,80	100,00	141,25
5	2439	Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi		18.200.784	17.901.845	58,49	49,62	58,49	49,23	84,17
9	001	Layanan Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	4,00 Layanan	18.200.784	17.901.845	58,49	49,62	58,49	49,23	84,17
6	2523	Penyelenggaraan Pendidikan Vokasional		42.000.000	38.879.512	51,01	44,57	50,80	48,52	95,52
10	001	Pelatihan SDM Vokasional Bidang Konstruksi	21.000,00 Orang	42.000.000	38.879.512	51,01	44,57	50,80	48,52	95,52
7	4201	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi		25.361.672	24.433.371	23,25	11,79	27,81	11,78	42,38
11	001	Pembinaan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi	3,00 Profil	12.147.152	12.134.217	30,00	18,62	30,00	18,63	62,09
12	002	Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi	4.250,00 Hari	13.214.520	12.299.154	18,00	5,52	27,32	5,50	20,12
8	5590	Kerjasama dan Pemberdayaan		194.570.404	183.508.889	50,15	41,49	56,10	42,92	76,50
13	001	Layanan Kerja Sama Lembaga Pemerintah dan Masyarakat serta Pemberdayaan Jasa Konstruksi	6,00 Layanan	11.227.256	10.770.356	50,81	35,42	50,81	35,42	69,72
14	002	Fasilitasi Pemberdayaan Jasa Konstruksi	1.300,00 Angkatan	183.343.148	172.738.534	50,11	41,86	56,43	43,38	76,88
	TOTAL			594.305.997	530.985.950	45,80	39,16	46,61	41,03	88,04

Lampiran 3. Capaian Bulanan

8. AGUSTUS

NO	Kode	Program/Kegiatan/Output	Target	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Bulan Agustus				
						Keuangan		Fisik		
						RN	RL	RN	RL	Kinerja
1	06	Program Pembinaan Konstruksi		594.305.997	530.985.950	53,86	45,82	56,59	48,28	85,33
1	2435	Penyelenggaraan Pelayanan Teknis dan Administrasi		272.124.869	229.519.904	50,81	44,22	52,83	47,49	89,88
1	950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	12 Layanan	19.319.952	19.144.621	78,64	60,47	78,64	59,51	75,67
2	951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	47,00 Layanan	87.428.517	55.195.013	19,13	14,59	19,28	16,78	87,07
3	970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	12 Layanan	31.593.507	31.270.772	58,43	70,42	55,76	64,85	116,31
4	994	Layanan Perkantoran	12 Layanan	133.782.893	123.909.497	59,51	55,06	60,99	58,86	96,50
2	2436	Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi		21.475.820	16.257.104	39,50	37,88	39,50	38,56	97,62
5	001	Layanan Pembinaan Kelembagaan dan Usaha Jasa Konstruksi	3,00 Layanan	10.749.000	9.750.832	54,31	53,10	54,31	53,43	98,38
6	002	Layanan Pembinaan Rantai Pasok dan Produksi Produk Unggulan	3,00 Layanan	10.726.820	6.506.272	24,66	22,64	24,66	23,66	95,94
3	2437	Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi		18.400.000	18.312.880	65,34	38,62	65,34	40,15	61,45
7	001	Layanan Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi	4,00 Layanan	18.400.000	18.312.880	65,34	38,62	65,34	40,15	61,45
4	2438	Pembinaan Investasi Infrastruktur		2.172.448	2.172.445	77,19	100,00	79,92	100,00	125,12
8	001	Layanan Pembinaan Investasi Infrastruktur dan Pasar Konstruksi	4,00 Layanan	2.172.448	2.172.445	77,19	100,00	79,92	100,00	125,12
5	2439	Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi		18.200.784	17.901.845	63,99	68,66	63,99	69,21	108,15
9	001	Layanan Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	4,00 Layanan	18.200.784	17.901.845	63,99	68,66	63,99	69,21	108,15
6	2523	Penyelenggaraan Pendidikan Vokasional		42.000.000	38.879.512	55,63	46,09	56,27	50,25	89,30
10	001	Pelatihan SDM Vokasional Bidang Konstruksi	21.000,00 Orang	42.000.000	38.879.512	55,63	46,09	56,27	50,25	89,30
7	4201	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi		25.361.672	24.433.371	36,05	23,97	46,75	24,28	51,93
11	001	Pembinaan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi	3,00 Profil	12.147.152	12.134.217	42,50	34,78	42,50	34,79	81,86
12	002	Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi	4.250,00 Hari	13.214.520	12.299.154	31,03	14,04	47,69	14,61	30,63
8	5590	Kerjasama dan Pemberdayaan		194.570.404	183.508.889	58,18	49,65	64,76	51,38	79,34
13	001	Layanan Kerja Sama Lembaga Pemerintah dan Masyarakat serta Pemberdayaan Jasa Konstruksi	6,00 Layanan	11.227.256	10.770.356	63,47	41,75	63,47	41,75	65,78
14	002	Fasilitasi Pemberdayaan Jasa Konstruksi	1.300,00 Angkatan	183.343.148	172.738.534	57,86	50,14	64,84	51,97	80,16
	TOTAL			594.305.997	530.985.950	53,86	45,82	56,59	48,28	85,33

Lampiran 3. Capaian Bulanan

9. SEPTEMBER

NO	Kode	Program/Kegiatan/Output	Target	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Bulan September				
						Keuangan		Fisik		
						RN	RL	RN	RL	Kinerja
1	06	Program Pembinaan Konstruksi		594.305.997	530.985.950	63,64	53,55	67,59	54,48	80,61
1	2435	Penyelenggaraan Pelayanan Teknis dan Administrasi		272.124.869	229.519.904	62,17	50,63	64,95	52,29	80,50
1	950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	12 Layanan	19.319.952	19.144.621	84,09	67,47	84,09	67,70	80,50
2	951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	47,00 Layanan	87.428.517	55.195.013	35,16	21,75	36,19	17,56	48,52
3	970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	12 Layanan	31.593.507	31.270.772	73,42	76,81	71,33	76,14	106,74
4	994	Layanan Perkantoran	12 Layanan	133.782.893	123.909.497	68,71	60,90	71,21	63,89	89,72
2	2436	Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi		21.475.820	16.257.104	44,59	42,45	44,59	43,68	97,97
5	001	Layanan Pembinaan Kelembagaan dan Usaha Jasa Konstruksi	3,00 Layanan	10.749.000	9.750.832	60,46	59,22	60,46	59,73	98,81
6	002	Layanan Pembinaan Rantai Pasok dan Produksi Produk Unggulan	3,00 Layanan	10.726.820	6.506.272	28,68	25,64	28,68	27,59	96,20
3	2437	Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi		18.400.000	18.312.880	76,07	49,17	77,11	48,59	63,02
7	001	Layanan Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi	4,00 Layanan	18.400.000	18.312.880	76,07	49,17	77,11	48,59	63,02
4	2438	Pembinaan Investasi Infrastruktur		2.172.448	2.172.445	86,31	100,00	89,05	100,00	112,30
8	001	Layanan Pembinaan Investasi Infrastruktur dan Pasar Konstruksi	4,00 Layanan	2.172.448	2.172.445	86,31	100,00	89,05	100,00	112,30
5	2439	Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi		18.200.784	17.901.845	69,86	73,93	69,86	74,55	106,72
9	001	Layanan Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	4,00 Layanan	18.200.784	17.901.845	69,86	73,93	69,86	74,55	106,72
6	2523	Penyelenggaraan Pendidikan Vokasional		42.000.000	38.879.512	62,81	51,03	67,00	53,96	80,55
10	001	Pelatihan SDM Vokasional Bidang Konstruksi	21.000,00 Orang	42.000.000	38.879.512	62,81	51,03	67,00	53,96	80,55
7	4201	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi		25.361.672	24.433.371	52,46	38,11	62,33	38,15	61,20
11	001	Pembinaan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi	3,00 Profil	12.147.152	12.134.217	60,00	49,66	60,00	49,67	82,79
12	002	Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi	4.250,00 Hari	13.214.520	12.299.154	46,59	27,49	62,85	27,56	43,84
8	5590	Kerjasama dan Pemberdayaan		194.570.404	183.508.889	66,59	59,40	73,96	59,05	79,83
13	001	Layanan Kerja Sama Lembaga Pemerintah dan Masyarakat serta Pemberdayaan Jasa Konstruksi	6,00 Layanan	11.227.256	10.770.356	73,78	55,62	73,78	56,07	76,00
14	002	Fasilitasi Pemberdayaan Jasa Konstruksi	1.300,00 Angkatan	183.343.148	172.738.534	66,15	59,63	73,97	59,23	80,07
	TOTAL			594.305.997	530.985.950	63,64	53,55	67,59	54,48	80,61

Lampiran 3. Capaian Bulanan

10. OKTOBER

NO	Kode	Program/Kegiatan/Output	Target	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Bulan Oktober				
						Keuangan		Fisik		
						RN	RL	RN	RL	Kinerja
1	06	Program Pembinaan Konstruksi		594.305.997	530.985.950	76,08	63,12	79,49	65,49	82,39
1	2435	Penyelenggaraan Pelayanan Teknis dan Administrasi		272.124.869	229.519.904	72,47	56,89	76,15	58,73	77,12
1	950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	12 Layanan	19.319.952	19.144.621	94,09	78,84	94,09	75,71	80,46
2	951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	47,00 Layanan	87.428.517	55.195.013	45,10	25,96	45,94	22,40	48,76
3	970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	12 Layanan	31.593.507	31.270.772	86,92	85,45	85,84	85,12	99,17
4	994	Layanan Perkantoran	12 Layanan	133.782.893	123.909.497	78,45	67,19	82,13	70,40	85,71
2	2436	Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi		21.475.820	16.257.104	51,42	50,07	51,42	50,50	98,22
5	001	Layanan Pembinaan Kelembagaan dan Usaha Jasa Konstruksi	3,00 Layanan	10.749.000	9.750.832	70,76	69,48	70,76	69,96	98,88
6	002	Layanan Pembinaan Rantai Pasok dan Produksi Produk Unggulan	3,00 Layanan	10.726.820	6.506.272	32,04	30,62	32,04	31,00	96,77
3	2437	Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi		18.400.000	18.312.880	88,81	68,97	88,81	67,04	75,49
7	001	Layanan Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi	4,00 Layanan	18.400.000	18.312.880	88,81	68,97	88,81	67,04	75,49
4	2438	Pembinaan Investasi Infrastruktur		2.172.448	2.172.445	95,44	100,00	97,26	100,00	102,81
8	001	Layanan Pembinaan Investasi Infrastruktur dan Pasar Konstruksi	4,00 Layanan	2.172.448	2.172.445	95,44	100,00	97,26	100,00	102,81
5	2439	Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi		18.200.784	17.901.845	75,42	78,79	75,42	79,50	105,40
9	001	Layanan Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	4,00 Layanan	18.200.784	17.901.845	75,42	78,79	75,42	79,50	105,40
6	2523	Penyelenggaraan Pendidikan Vokasional		42.000.000	38.879.512	83,27	63,83	83,52	66,51	79,64
10	001	Pelatihan SDM Vokasional Bidang Konstruksi	21.000,00 Orang	42.000.000	38.879.512	83,27	63,83	83,52	66,51	79,64
7	4201	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi		25.361.672	24.433.371	68,40	61,05	77,12	60,63	78,61
11	001	Pembinaan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi	3,00 Profil	12.147.152	12.134.217	72,50	72,34	72,50	72,36	99,81
12	002	Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi	4.250,00 Hari	13.214.520	12.299.154	65,21	50,67	78,15	49,84	63,77
8	5590	Kerjasama dan Pemberdayaan		194.570.404	183.508.889	80,91	70,95	86,45	74,77	86,48
13	001	Layanan Kerja Sama Lembaga Pemerintah dan Masyarakat serta Pemberdayaan Jasa Konstruksi	6,00 Layanan	11.227.256	10.770.356	85,29	70,67	85,29	70,67	82,86
14	002	Fasilitasi Pemberdayaan Jasa Konstruksi	1.300,00 Angkatan	183.343.148	172.738.534	80,65	70,96	86,52	75,02	86,70
	TOTAL			594.305.997	530.985.950	76,08	63,12	79,49	65,49	82,39

Lampiran 3. Capaian Bulanan

11. NOVEMBER

NO	Kode	Program/Kegiatan/Output	Target	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Bulan November				
						Keuangan		Fisik		
						RN	RL	RN	RL	Kinerja
1	06	Program Pembinaan Konstruksi		594.305.997	530.985.950	86,02	72,91	88,80	74,55	83,95
1	2435	Penyelenggaraan Pelayanan Teknis dan Administrasi		272.124.869	229.519.904	82,01	65,24	86,59	65,83	76,02
1	950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	12 Layanan	19.319.952	19.144.621	97,73	84,30	97,73	81,67	83,56
2	951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	47,00 Layanan	87.428.517	55.195.013	60,07	29,51	61,45	26,11	42,48
3	970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	12 Layanan	31.593.507	31.270.772	93,40	89,43	95,75	88,47	92,40
4	994	Layanan Perkantoran	12 Layanan	133.782.893	123.909.497	87,08	80,13	91,71	80,45	87,73
2	2436	Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi		21.475.820	16.257.104	55,63	55,41	55,63	54,73	98,39
5	001	Layanan Pembinaan Kelembagaan dan Usaha Jasa Konstruksi	3,00 Layanan	10.749.000	9.750.832	77,74	76,52	77,74	76,95	98,98
6	002	Layanan Pembinaan Rantai Pasok dan Produksi Produk Unggulan	3,00 Layanan	10.726.820	6.506.272	33,47	34,26	33,47	32,47	97,03
3	2437	Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi		18.400.000	18.312.880	94,40	77,41	94,40	72,41	76,70
7	001	Layanan Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi	4,00 Layanan	18.400.000	18.312.880	94,40	77,41	94,40	72,41	76,70
4	2438	Pembinaan Investasi Infrastruktur		2.172.448	2.172.445	98,17	100,00	99,09	100,00	100,92
8	001	Layanan Pembinaan Investasi Infrastruktur dan Pasar Konstruksi	4,00 Layanan	2.172.448	2.172.445	98,17	100,00	99,09	100,00	100,92
5	2439	Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi		18.200.784	17.901.845	83,56	87,09	83,56	88,11	105,44
9	001	Layanan Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	4,00 Layanan	18.200.784	17.901.845	83,56	87,09	83,56	88,11	105,44
6	2523	Penyelenggaraan Pendidikan Vokasional		42.000.000	38.879.512	89,55	78,43	89,97	78,03	86,72
10	001	Pelatihan SDM Vokasional Bidang Konstruksi	21.000,00 Orang	42.000.000	38.879.512	89,55	78,43	89,97	78,03	86,72
7	4201	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi		25.361.672	24.433.371	82,43	76,39	93,12	76,22	81,85
11	001	Pembinaan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi	3,00 Profil	12.147.152	12.134.217	85,00	81,20	85,00	81,22	95,55
12	002	Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi	4.250,00 Hari	13.214.520	12.299.154	80,43	71,96	94,93	71,62	75,45
8	5590	Kerjasama dan Pemberdayaan		194.570.404	183.508.889	93,08	81,87	94,01	86,07	91,55
13	001	Layanan Kerja Sama Lembaga Pemerintah dan Masyarakat serta Pemberdayaan Jasa Konstruksi	6,00 Layanan	11.227.256	10.770.356	93,55	81,77	93,55	81,77	87,41
14	002	Fasilitasi Pemberdayaan Jasa Konstruksi	1.300,00 Angkatan	183.343.148	172.738.534	93,05	81,87	94,04	86,33	91,80
	TOTAL			594.305.997	530.985.950	86,02	72,91	88,80	74,55	83,95

Lampiran 3. Capaian Bulanan

12. DESEMBER

NO	Kode	Program/Kegiatan/Output	Target	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Bulan Desember				
						Keuangan		Fisik		
						RN	RL	RN	RL	Kinerja
1	06	Program Pembinaan Konstruksi		594.305.997	530.985.950	100,00	89,35	100,00	92,85	92,85
1	2435	Penyelenggaraan Pelayanan Teknis dan Administrasi		272.124.869	229.519.904	100,00	84,34	100,00	86,20	86,20
1	950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	12 Layanan	19.319.952	19.144.621	100,00	99,09	100,00	100,00	100,00
2	951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	47,00 Layanan	87.428.517	55.195.013	100,00	63,13	100,00	54,25	54,25
3	970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	12 Layanan	31.593.507	31.270.772	100,00	98,98	100,00	99,96	99,96
4	994	Layanan Perkantoran	12 Layanan	133.782.893	123.909.497	100,00	92,62	100,00	98,86	98,86
2	2436	Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi		21.475.820	16.257.104	100,00	75,70	100,00	76,61	76,61
5	001	Layanan Pembinaan Kelembagaan dan Usaha Jasa Konstruksi	3,00 Layanan	10.749.000	9.750.832	100,00	90,71	100,00	91,49	91,49
6	002	Layanan Pembinaan Rantai Pasok dan Produksi Produk Unggulan	3,00 Layanan	10.726.820	6.506.272	100,00	60,65	100,00	61,70	61,70
3	2437	Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi		18.400.000	18.312.880	100,00	99,53	100,00	100,00	100,00
7	001	Layanan Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi	4,00 Layanan	18.400.000	18.312.880	100,00	99,53	100,00	100,00	100,00
4	2438	Pembinaan Investasi Infrastruktur		2.172.448	2.172.445	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	001	Layanan Pembinaan Investasi Infrastruktur dan Pasar Konstruksi	4,00 Layanan	2.172.448	2.172.445	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	2439	Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi		18.200.784	17.901.845	100,00	98,36	100,00	100,00	100,00
9	001	Layanan Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	4,00 Layanan	18.200.784	17.901.845	100,00	98,36	100,00	100,00	100,00
6	2523	Penyelenggaraan Pendidikan Vokasional		42.000.000	38.879.512	100,00	92,57	100,00	100,00	100,00
10	001	Pelatihan SDM Vokasional Bidang Konstruksi	21.000,00 Orang	42.000.000	38.879.512	100,00	92,57	100,00	100,00	100,00
7	4201	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi		25.361.672	24.433.371	100,00	96,34	100,00	97,83	97,83
11	001	Pembinaan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi	3,00 Profil	12.147.152	12.134.217	100,00	99,89	100,00	100,00	100,00
12	002	Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi	4.250,00 Hari	13.214.520	12.299.154	100,00	93,07	100,00	95,83	95,83
8	5590	Kerjasama dan Pemberdayaan		194.570.404	183.508.889	100,00	94,31	100,00	99,90	99,90
13	001	Layanan Kerja Sama Lembaga Pemerintah dan Masyarakat serta Pemberdayaan Jasa Konstruksi	6,00 Layanan	11.227.256	10.770.356	100,00	95,93	100,00	100,00	100,00
14	002	Fasilitasi Pemberdayaan Jasa Konstruksi	1.300,00 Angkatan	183.343.148	172.738.534	100,00	94,22	100,00	99,89	99,89
	TOTAL			594.305.997	530.985.950	100,00	89,35	100,00	92,85	92,85



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INSPEKTORAT JENDERAL**

Jalan Pahlawan No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp. (021) 7251929 Fax. (021) 7267762

Nomor : PL. 02.04 - Tj / 15.02-PL
Sifat : Rahasia
Lampiran :
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
Tahun Anggaran 2018
Jakarta, 3 September 2019

Kepada Yth.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi

di
Jakarta

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan Evaluasi atas implementasi SAKIP pada Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2018 dengan uraian sebagai berikut:

- Evaluasi SAKIP Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Surat Tugas Nomor 1434/SPT/1/2019 Tanggal 2 September 2019 dengan tujuan:
 - Menilai penerapan SAKIP dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik serta pencegahan KKN, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).
 - Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi.
 - Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya.
 - Memberikan informasi kinerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR.
 - Memberikan saran perbaikan terhadap penerapan SAKIP guna peningkatan kinerja dan akuntabilitas Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR.
- Berdasarkan penilaian komponen sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi SAKIP, maka implementasi atas SAKIP Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2018 dapat dikategorikan **BB (Sangat Baik)**, dalam pengertian bahwa akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kerja, dengan pencapaian nilai 78,64% dengan rincian per komponen:

No.	Komponen	Bobot/Nilai Maks	Nilai Hasil Evaluasi
1.	Perencanaan Kinerja	30 %	26,80%
2.	Pengukuran Kinerja	25 %	18,50%
3.	Pelaporan Kinerja	15 %	10,90%
4.	Evaluasi Kinerja	10 %	6,50%
5.	Capaian Kinerja	20 %	13,00%
	Jumlah	100 %	78,64%

3. Uraian Hasil Evaluasi

Tidak tercapainya nilai maksimal dalam implementasi SAKIP di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi disebabkan masih adanya kelemahan dalam komponen/subkomponen SAKIP sebagai berikut:

No.	Komponen/Sub-komponen	Permasalahan
1.	Perencanaan Kinerja	
	I. Perencanaan Strategi	
	a. Penuhan Rencana	--
	b. Kualitas Rencana	--
	c. Implementasi Rencana	--
	II. Perencanaan Kinerja Tahunan (RKT)	
	a. Penuhan RKT	--
	b. Kualitas RKT	Belum seluruh kegiatan menjadi penyebab langsung berwujudnya tujuan dan sasaran.
	c. Implementasi RKT	- Mekanisme review dan peninjauan belum dijalankan terhadap pencapaian target kinerja. - Target kinerja pada Laporan Monitoring dan Evaluasi bulanan tidak sesuai dengan target kinerja Rencana Aksi sehingga Rencana Aksi tidak dijadikan acuan untuk mengevaluasi capaian output kegiatan.
2.	Pengukuran Kinerja	
	I. Penuhan Pengukuran	Mekanisme pengumpulan data kinerja yang ada belum mengatur waktu delivery dan mekanisme yang harus diikuti apabila terjadi kekhawatiran data serta belum meliputi

No.	Kategori/Sub-kategori	Pemenuhan
		pengumpulan data untuk seluruh pengukuran masing-masing indikator kinerja.
II.	Kualitas Pengukuran	Data yang dikumpulkan belum didasarkan pada suatu mekanisme yang memadai atau terstruktur yakni jenis mekanisme pengumpulan datanya, siapa yang mengumpulkan data, mencatat, dan siapa yang menampilkannya, serta sumber data valid.
III.	Implementasi Pengukuran	<ul style="list-style-type: none"> - Indikator Kinerja belum dapat dimanfaatkan sebagai dasar pemberian insentif dan promosi. - Belum terdapat mekanisme atau SOP yang jelas tentang mekanisme monitoring kinerja secara periodik. - Belum terdapat mekanisme reward and punishment yang dikaitkan dengan hasil pengukuran (jaringan) kinerja mulai dari tingkat eselon IV keatas. - Terdapat perubahan Indikator Prioritas Kinerja Keseluruhan BUK dengan Bertukar-tukar Besar menjadi Penetapan Kinerja BUK Berkinerja Baik, namun belum disertai dengan penyesuaian cara perhitungan capaian. Cara perhitungan pada tahun 2018 masih sama yaitu menggunakan BUK dengan kualifikasi besar. - Hasil pengukuran tersebut hanya untuk menyimpulkan tingkat sampai mempengaruhi alokasi.
3.	Pelaporan Kinerja	
I.	Pemenuhan Pelaporan	LK belum memuat penjelasan hubungan kausalitas mulai dari input-process-output dan outcome.
II.	Penyajian Informasi Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> - LK belum menyajikan data realisasi atau capaian kinerja berbasis terhadap standar nasional atau RPJMN. - LK belum menyajikan analisa efisiensi yang telah dilakukan.
III.	Pemenuhan Informasi Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan karena hanya menyajikan "langkah ke depan" terhadap permasalahan yang ada dimana hal tersebut lebih bersifat rekomendatif. - Laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan karena hanya diujikan dengan presentase tercapai kriteria bobot sehingga tidak ditunjukkan keberhasilan atau kegagalan program secara terukur.
4.	Evaluasi Internal	
I.	Pemenuhan Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> - belum dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi, dimana kriteria hasil evaluasi antara lain adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. Terdapat informasi tentang capaian hasil rencana atau agenda; b. Terdapat simpulan keberhasilan atau ketidakberhasilan rencana atau agenda; c. Terdapat analisis dan simpulan tentang kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakannya suatu rencana atau agenda;

No.	Kategori/Sub-kategori	Pemenuhan
		d. Terdapat ukuran yang memadai tentang keberhasilan rencana aksi agenda.
		- Belum ada indikator terhadap hasil evaluasi yang telah dibahas dan dijabarkan dengan pihak yang dievaluasi (yang bertanggung).
II.	Kualitas Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> - Telah dilakukan kegiatan supervisi terhadap hasil evaluasi, namun tidak terdokumentasi. - Evaluasi program yang telah dilaksanakan belum diartikan ukuran keberhasilan program masih belum jelas. - Rekomendasi hasil evaluasi program yang terkait dengan peningkatan kinerja belum seluruhnya diindaklanjuti.
III.	Pemenuhan Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> - SOP tentang Mekanisme Monitoring Rencana Secara Periodik dan Menindaklanjuti Seluruh Rekomendasi Hasil Monitoring Target Jangka Menengah, Monitoring Target Kinerja secara terencana, terjabar belum dibuat. - Hasil Evaluasi belum seluruhnya diindaklanjuti.
5.	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	
	Kinerja yang dilaporkan (output)	--
	Kinerja yang dilaporkan (outcome)	--
	Kinerja lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak terdapat bukti pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Unit Organisasi. - Sistem Manajemen Kinerja yang ada sama belum memiliki keterkaitan dengan insentif.

4. Terhadap kelemahan yang masih ada, direkomendasikan kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR beserta jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut:

No.	Kategori	Rekomendasi
1.	Perencanaan Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran keberhasilan tujuan, sasaran dan indikator kinerja sasaran (outcome dan output) agar diwujudkan kembali mengacu pada Pemas PAN dan RB No. PER/DIR/PAN/10200. 2. Menyusun SOP tentang mekanisme monitoring Rencana secara periodik dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil monitoring Target Jangka Menengah. 3. Menetapkan reward dan punishment pada monitoring rencana kinerja dan memasukkan hal terkait dengan dimensi dan etasial pelaksanaan atau perwujudan kegiatan pada Pemantauan Rencana Aksi atau Kinerja.

No.	Komponen	Rekomendasi
		d. Melakukan Monitoring dan Evaluasi bulanan dan melaporkan hasilnya sesuai dengan target kinerja Rencana Aksi.
2.	Pengukuran Kinerja	<p>a. Menyusun SOP pengumpulan data kinerja yang mengikut pemegang jawab, waktu delivery dan mekanisme yang jelas jika terjadi kesalahan data.</p> <p>b. Menggunakan capaian indikator Kinerja Baseline sebagai dasar promosi atau kenaikan/penurunan peringkat dasar insentif atau disinsentif terkait dengan reward dan punishment.</p> <p>c. Mendokumentasikan dan memonitoring target kinerja secara terencana dan terjadwal dan dilengkapi dengan SOP atau mekanisme yang jelas.</p> <p>d. Melaksanakan hasil rekomendasi pengukuran Rencana Aksi yang telah dilaksanakan.</p>
3.	Laporan Kinerja	<p>a. Menjadi perhatian agar dalam penyusunan Laporan Kinerja tahun berikutnya memuat penjelasan atau nilai dari input-process-output dan outcome, menyajikan analisis terkait efisiensi yang telah dilakukan serta menyajikan informasi capaian kinerja, terkait dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realisasi sampai dengan tahun berjalan dibandingkan dengan target jangka menengah; - Realisasi atau capaian tahun berjalan dibandingkan dengan standar nasional atau RPJMN; - Realisasi atau capaian organisasi/instansi dibanding realisasi atau capaian organisasi/instansi sejenis. <p>b. Dalam penyusunan Laporan Kinerja agar menyajikan informasi capaian kinerja yang terikat.</p> <p>c. Menjadikan informasi dalam Laporan Kinerja sebagai dasar perbaikan perencanaan (perencanaan jangka menengah, tahunan maupun dalam penetapan atau perjanjian kinerja yang disusun), perbaikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, perbaikan capaian kinerja organisasi yang telah baik periode berikutnya.</p> <p>d. Menggunakan Laporan Kinerja sebagai dasar informasi dalam perbaikan perencanaan, baik perencanaan jangka menengah, tahunan maupun dalam penetapan atau perjanjian kinerja yang disusun.</p>
4.	Evaluasi Kinerja	<p>a. Melakukan evaluasi dan memonitoring/rekomendasi hasil evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi, dimana terdapat hasil evaluasi antara lain adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat informasi tentang capaian hasil rencana atau agenda; - Terdapat simpulan keberhasilan atau ketidakberhasilan rencana atau agenda;

No.	Komponen	Rekomendasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat evaluasi dan simpulan tentang kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakannya suatu rencana atau agenda; - Terdapat laporan yang memuat tentang keterlaksanaan rencana atau agenda; <p>b. Mendokumentasikan kegiatan yang dilaksanakan sebagai hasil perbaikan sesuai rekomendasi evaluasi Rencana Aksi termasuk hasil supervisi terhadap hasil evaluasi.</p>
5.	Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi	<p>a. Agar berhasil dalam pemberantasan korupsi yaitu dengan upaya pembertakan zona bebas korupsi.</p> <p>b. Meningkatkan sistem manajemen kinerja dengan pemberian insentif/disinsentif kepada pegawai.</p>

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Inspektur Jenderal,

Ir. Widarta, Sp.I.
NIP. 196303201968111001

Tembusan: Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Sekretaris I/II Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Inspektur V/I/II Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Kepala Biro PAKLN Bagian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Lampiran 5. Matriks Revisi Renstra

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			CAPAIAN				PERKIRAAN CAPAIAN 2019	TOTAL CAPAIAN	CAPAIAN				PERKIRAAN CAPAIAN 2019	TOTAL CAPAIAN
			2015	2016	2017	2018			2015	2016	2017	2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT														
SASARAN STRATEGIS														
1.	Meningkatnya keterpaduan pembangunan													
1.	Indeks rasio dukungan infrastruktur PUPR terhadap keterpaduan pengembangan kawasan	%	77	76.59	90	95	100	100						
PROGRAM PEMBINAAN KONSTRUKSI														
SASARAN PROGRAM :														
1.	Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas								581,213.86	566,451.60	304,435.36	335,142.24	558,160.70	2,345,403.76
1.	Tingkat Pengendalian Pelaksanaan Konstruksi Nasional	%	80.87	90.44	90	90	90	90	581,213.86	566,451.60	304,435.36	335,142.24	558,160.70	2,345,403.76
KEGIATAN 1.2.1 : PEMBINAAN INVESTASI INFRASTRUKTUR														
UNIT KERJA : DIREKTORAT BINA INVESTASI INFRASTRUKTUR														
1.	SK 1.2.1.1 : Peningkatan Investasi Infrastruktur dan Pasar								25,419.95	25,278.51	32,523.22	10,999.45	2,172.45	96,393.58
1	ISK1. Tingkat Rasio Kapitalisasi Konstruksi	%	12.77	12.18	29.27	33.99	0	88	25,419.95	25,278.51	32,523.22	10,999.45	2,172.45	96,393.58
OUTPUT KEGIATAN :														
1.	Layanan Pembinaan Investasi Infrastruktur dan Pasar								25,419.95	25,278.51	32,523.22	10,999.45	2,172.45	96,393.58
a.	Jumlah Draft NSPK Pembinaan Investasi Infrastruktur dan Pasar Konstruksi	Draft NSPK	4	4	5	4	0	17	17,634.93	14,953.88	10,659.93	3,617.24	168.69	47,034.68
b.	Jumlah Profil Pembinaan Investasi Infrastruktur dan Pasar Konstruksi	Draft Profil	4	5	4	3	0	16	7,785.02	10,324.63	21,863.29	7,382.21	2,003.75	49,358.90
KEGIATAN 1.2.1 : PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA KONSTRUKSI														
UNIT KERJA : DIREKTORAT PENGADAAN JASA KONSTRUKSI														
1.	SK 1.2.1.1 : Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi								0.00	0.00	0.00	0.00	46,143.15	46,143.15
1	ISK1. Tingkat Kualitas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi	%	0	0	0	0	70	70	0.00	0.00	0.00	0.00	46,143.15	46,143.15
OUTPUT KEGIATAN :														
1.	Pembinaan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi								0.00	0.00	0.00	0.00	12,147.15	12,147.15
a.	Profil Kualitas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi	Profil	0	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	12,147.15	12,147.15
OUTPUT KEGIATAN :														
2.	Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi								0.00	0.00	0.00	0.00	33,996.00	33,996.00
a.	Rata-rata Waktu Layanan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi	Hari	0	0	0	0	125	125	0.00	0.00	0.00	0.00	33,996.00	33,996.00
KEGIATAN 1.2.2 : PEMBINAAN PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI														
UNIT KERJA : DIREKTORAT BINA PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI														
1.	SK 1.2.2.1 : Peningkatan Penerapan Manajemen Mutu,								40,838.34	29,157.38	17,495.91	14,144.68	18,400.00	120,036.31
1	ISK2. Persentase Kenaikan Tingkat Tertib Penyelenggaraan Konstruksi	%	4.13	5.94	8.31	11	11	40	40,838.34	29,157.38	17,495.91	14,144.68	18,400.00	120,036.31
OUTPUT KEGIATAN :														
1.	Layanan Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi								40,838.34	29,157.38	17,495.91	14,144.68	18,400.00	120,036.31
a.	Jumlah Draft NSPK Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi	Draft NSPK	7	7	7	7	7	35	20,612.52	19,485.83	8,861.22	5,712.76	3,850.00	58,522.33
b.	Jumlah Profil Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi	Draft Profil	5	5	5	5	5	25	20,225.82	9,671.55	8,634.69	8,431.92	14,550.00	61,513.98
KEGIATAN 1.2.3 : PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA JASA KONSTRUKSI														
UNIT KERJA : DIREKTORAT BINA KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA JASA KONSTRUKSI														
1.	SK 1.2.3.1 : Peningkatan Persentase Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) yang berkinerja baik dan Peningkatan Utilitas Produk Unggulan								31,761.30	26,233.68	20,625.74	14,886.23	21,475.82	114,982.76
1.	ISK3.1. Persentase Kenaikan BUJK Berkinerja Baik	%	32.37	25.18	115.83	64.75	11	184	27,402.11	19,837.88	13,503.25	11,410.44	10,749.00	82,902.67

Lampiran 5. Matriks Revisi Renstra

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN						ANGGARAN (Juta Rupiah)									
			CAPAIAN				PERKIRAAN CAPAIAN 2019	TOTAL CAPAIAN	CAPAIAN				PERKIRAAN CAPAIAN 2019	TOTAL CAPAIAN				
			2015	2016	2017	2018			2015	2016	2017	2018						
OUTPUT KEGIATAN :																		
1.	Layanan Pembinaan Kelembagaan dan Usaha Jasa Konstruksi												27,402.11	19,837.88	13,503.25	11,410.44	10,749.00	82,902.67
a.	Jumlah Draft NSPK Pembinaan Kelembagaan dan Usaha Jasa Konstruksi	Draft NSPK	2	4	4	6	8	24	23,826.82	17,626.63	3,826.51	5,340.49	6,550.00	57,170.45				
b.	Jumlah Profil Pembinaan Kelembagaan dan Usaha Jasa Konstruksi	Draft Profil	4	4	4	4	5	21	3,575.29	2,211.25	9,676.74	6,069.94	4,199.00	25,732.22				
2.	ISK3.2. Persentase Kenaikan Tingkat Utilitas Produk Unggulan	%	1.06	1.86	4.69	1.88	5.55	15	4,359.19	6,395.79	7,122.49	3,475.79	10,726.82	32,080,086.00				
OUTPUT KEGIATAN :																		
2.	Layanan Pembinaan Rantai Pasok dan Produksi Produk Unggulan								4,359.19	6,395.79	7,122.49	3,475.79	10,726.82	32,080.09				
a.	Jumlah Draft NSPK Pembinaan Rantai Pasok dan Produksi Produk Unggulan	Draft NSPK	0	4	4	6	4	18	2,348.44	4,700.70	5,057.91	703.30	8,566.82	21,377.17				
b.	Jumlah Profil Pembinaan Rantai Pasok dan Produksi Produk Unggulan	Draft Profil	4	4	4	4	4	20	2,010.75	1,695.10	2,064.58	2,772.49	2,160.00	10,702.92				
KEGIATAN 1.2.4 : KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN JASA KONSTRUKSI																		
UNIT KERJA : DIREKTORAT KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN																		
1.	SK 1.2.4.1 : Peningkatan Kerjasama dan								158,666.32	239,807.94	67,284.29	143,070.86	226,578.73	835,408.14				
1.	ISK4. Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	%	16.11	28.48	24.64	66.21	24	159	158,666.32	239,807.94	67,284.29	143,070.86	226,578.73	835,408.14				
OUTPUT KEGIATAN :																		
1.	Fasilitasi Pemberdayaan Jasa Konstruksi								123,082.80	211,516.83	52,525.02	132,522.10	215,351.47	734,998.22				
a.	Jumlah Fasilitasi Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Angkatan	1,234	2,182	1,888	5,073	1,842	12,219	123,082.80	211,516.83	52,525.02	132,522.10	215,351.47	734,998.22				
2.	Layanan Kerja Sama Lembaga Pemerintah dan								35,583.52	28,291.11	14,759.28	10,548.76	11,227.26	100,409.92				
a.	Jumlah Draft NSPK Kerja Sama Lembaga Pemerintah dan Masyarakat Serta Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Draft NSPK	3	1	2	2	1	9	26,038.20	16,723.92	748.11	3,434.27	1,030.00	47,974.50				
b.	Jumlah Profil Kerja Sama Lembaga Pemerintah dan Masyarakat Serta Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Profil	3	4	4	4	4	19	9,545.32	11,567.19	14,011.17	7,114.49	10,197.26	52,435.42				
KEGIATAN 1.2.5 : PEMBINAAN KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI																		
UNIT KERJA : DIREKTORAT BINA KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI																		
1.	SK 1.2.5.1 : Peningkatan Sumber Daya Manusia								28,099.16	28,334.58	20,432.70	15,731.74	18,450.00	111,048.18				
1.	ISK5. Persentase Kenaikan SDM Penyedia Jasa Konstruksi yang Kompeten	%	6.79	7.44	6.75	9.05	4	24.98	28,099.16	28,334.58	20,432.70	15,731.74	18,450.00	111,048.18				
OUTPUT KEGIATAN :																		
1.	Layanan Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas								28,099.16	28,334.58	20,432.70	15,731.74	18,450.00	111,048.18				
a.	Jumlah Draft NSPK Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	Draft NSPK	32	31	36	18	42	159	23,466.62	18,789.96	12,784.42	6,015.15	7,550.00	68,606.15				
b.	Jumlah Profil Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	Draft Profil	4	3	4	4	8	23	4,632.54	9,544.62	7,648.28	9,716.58	10,900.00	42,442.03				
KEGIATAN 1.2.6 : PENYELENGGARAAN PELAYANAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI																		
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI																		
1.	SK 1.2.6.1: Peningkatan Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya								296,428.79	217,639.52	146,073.50	136,309.28	224,940.55	1,021,391.64				
1.	Jumlah layanan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Layanan	5	4	5	5	6	25	296,428.79	217,639.52	146,073.50	136,309.28	224,940.55	1,021,391.64				

Lampiran 5. Matriks Revisi Renstra

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN						ANGGARAN (Juta Rupiah)						
			CAPAIAN				PERKIRAAN CAPAIAN 2019	TOTAL CAPAIAN	CAPAIAN				PERKIRAAN CAPAIAN 2019	TOTAL CAPAIAN	
			2015	2016	2017	2018			2015	2016	2017	2018			
	OUTPUT KEGIATAN :														
1.	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I									23,887.59	47,754.08	30,420.49	17,801.31	19,288.20	139,151.67
a.	Jumlah Layanan Manajemen	Layanan	3	2	3	3	4	15		23,887.59	47,754.08	30,420.49	17,801.31	19,288.20	139,151.67
2.	Layanan Internal (Overhead)									200,778.03	83,622.86	39,389.42	16,406.73	87,142.41	427,339.45
a.	Jumlah Layanan Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5		200,778.03	83,622.86	39,389.42	16,406.73	87,142.41	427,339.45
3.	Layanan Perkantoran									71,763.17	86,262.58	76,263.59	102,101.25	98,696.77	435,087.35
a.	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5		71,763.17	86,262.58	76,263.59	102,101.25	98,696.77	435,087.35
4.	Layanan Dukungan Manajemen Satker									0.00	0.00	0.00	0.00	19,813.17	19,813.17
a.	Jumlah Layanan Kesatkeran	Layanan	0	0	0	0	1	1		0.00	0.00	0.00	0.00	19,813.17	19,813.17



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : SP DIPA-033.13-0/2019**



05.1596-0000-8100-4607

A. DASAR HUKUM :

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Negara;
3. UU No. 12 Tahun 2018 tentang APBN TA 2019

B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK :

1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA	:	000 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. UNIT ORGANISASI	:	033.13 DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
3. PAGU	:	Rp. 558.160.700.000 (LIMA RATUS LIMA PULUH DELAPAN MILIAR SERATUS ENAM PULUH JUTA TUJUH RATUS RIBU RUPIAH)

C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN (DISCLAIMER) :

1. DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut diuangkan kedalam DIPA Pelikan untuk masing-masing Saliter.
2. Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Pelikan.
3. DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Informasi mengenai Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penanda Tangan SPM untuk masing-masing Saliter terdapat pada DIPA Pelikan.
5. Rencana Penarikan Dana dan Penilaian Penemuan yang tercantum dalam Halaman II DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Penilaian Penemuan dari seluruh saliter.
6. Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang terdapat dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
7. DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Jakarta, 05 Desember 2018
A N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ASKOLAH
NIP.196808111992021001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA-033.13-0/2019**



05.1556-0000-6108-4887

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

Halaman : 1 dari 1

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA	:	000 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. UNIT ORGANISASI	:	033.13 DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
3. PAGU	:	Rp.558.160.700.000 (LIMA RATUS LIMA PULUH DELAPAN MILAR SERATUS ENAM PULUH JUTA TUJUH RATUS RIBU RUPIAH)

B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN, STRATEGIS K/L, FUNGSI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP :

(dalam ribuan rupiah)

1. PROGRAM	:	06 Program Pembinaan Konstruksi		558.160.700
2. SASARAN STRATEGIS	:	01 Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antar daerah, antar sektor, dan antar tingkat pemerintahan didukung inovasi konstruksi yang berkualitas		
3. FUNGSI	:	04 EKONOMI		525.160.700
SUB FUNGSI	:	0407 INDUSTRI DAN KONSTRUKSI	525.160.700	
	:	15 PENDIDIKAN		32.000.000
	:	1090 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LAINNYA	32.000.000	

Jakarta, 05 Desember 2018
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

Prof. ANITA FIRMANI
NIP. 196006151067032001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA-033.13-0/2019



DS:1596-0000-8106-4687

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

Halaman : 1 dari 5

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT / INDIKATOR OUTPUT	TARGET / INDIKATOR	VOLUME / SATUAN	ALOKASI DANA
033.13.00	PROGRAM PEMBINAAN KONSTRUKSI SASARAN PROGRAM Meningkatkan Kapasitas dan Penguasaan Kualitas Konstruksi Nasional INDIKATOR KINERJA PROGRAM 01 Tingkat Penguasaan Pelaksanaan Konstruksi Nasional OUTPUT PROGRAM 01 Peningkatan Kapasitas Konstruksi Nasional INDIKATOR OUTPUT PROGRAM 01 Tingkat Kapasitas Konstruksi	80Persen		558.183.700 248.824.014
2436	KEGIATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA KONSTRUKSI SASARAN KEGIATAN Peningkatan Persentase Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) yang berkinerja baik dan Peningkatan Utilitas Produk Unggulan INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 01 Persentase Konvales BUJK yang Berkinerja Baik 02 Persentase Konvales Tingkat Utilitas Produk Unggulan OUTPUT KEGIATAN 2436.001 Layanan Pembinaan Kelembagaan dan Usaha Jasa Konstruksi INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN 01 Jumlah Draft NSPK Pembinaan Kelembagaan dan Usaha Jasa Konstruksi 02 Jumlah Prodi Pembinaan Kelembagaan dan Usaha Jasa Konstruksi	10Persen 40Persen	3 Layanan	21.475.820 10.749.000

KETENTUAN:

DIPA Induk ini dibagikan lebih lanjut ke dalam DIPA Pelikan dan DIPA Pelikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Setkor.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

**DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA-033.13-0/2019**



DS: 1596-0000-8108-4657

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

Halaman : 2 dari 6

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT / INDIKATOR OUTPUT	TARGET / INDIKATOR	VOLUME / SATUAN	ALOKASI DANA
2436.002	OUTPUT KEGIATAN Layanan Pembinaan Rantai Pasok dan Produksi Produk Unggulan INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN 01 Jumlah Draft NSPK Pembinaan Rantai Pasok dan Produksi Produk Unggulan 02 Jumlah Profil Pembinaan Rantai Pasok dan Produksi Produk Unggulan	4 Draft NSPK 4 Draft Profil	4 Layanan	10.725.820
2438	KEGIATAN PEMBINAAN INVESTASI INFRASTRUKTUR SASARAN KEGIATAN Peningkatan Investasi Infrastruktur dan Pasar Konstruksi INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 01 Tingkat Rasio Kapabilitas Konstruksi OUTPUT KEGIATAN Layanan Pembinaan Investasi Infrastruktur dan Pasar Konstruksi INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN 01 Jumlah Draft NSPK Pembinaan Investasi Infrastruktur dan Pasar Konstruksi 02 Jumlah Profil Pembinaan Investasi Infrastruktur dan Pasar Konstruksi	18 Peningkatan	4 Layanan	14.319.000
2439	KEGIATAN PEMBINAAN KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI SASARAN KEGIATAN Peningkatan Sumber Daya Manusia Penyedia Jasa Konstruksi yang Kompeten INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 01 Persentase Kenaikan SDM Penyedia Jasa Konstruksi yang Kompeten	6 Peningkatan		18.450.000

KETENTUAN

DIPA Induk ini diuraikan lebih lanjut ke dalam DIPA Pelikan dan DIPA Pelikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Salbu.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA-033,13-0/2019



DG:1596-0000-0108-4687

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

Halaman : 3 dari 6

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT / INDIKATOR OUTPUT	TARGET / INDIKATOR	VOLUME / SATUAN	ALOKASI DANA
2430-001	OUTPUT KEGIATAN Layanan Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN 01 Jumlah Draft NSPK Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi 02 Jumlah Profil Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	28 Draft NSPK 2000 Profil	4 Layanan	18.450.000
5500	KEGIATAN KERJASAMA DAN PEMBERDAYAAN SASARAN KEGIATAN Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 01 Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi OUTPUT KEGIATAN 5500-001 Layanan Kerja Sama Lembaga Pemerintah dan Masyarakat serta Pemberdayaan Jasa Konstruksi INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN 01 Jumlah Draft NSPK Kerja Sama Lembaga Pemerintah dan Masyarakat serta Pemberdayaan Jasa Konstruksi 02 Jumlah Profil Kerja Sama Lembaga Pemerintah dan Masyarakat serta Pemberdayaan Jasa Konstruksi OUTPUT KEGIATAN 5500-002 Fasilitas Pemberdayaan Jasa Konstruksi INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN 01 Jumlah Fasilitas Pemberdayaan Jasa Konstruksi	24 Person	8 Layanan	194.578.694
		10 Draft NSPK 1 Profil		11.227.258
		1000 Angkutan	1.300 Angkutan	193.351.338
	OUTPUT PROGRAM 03 Peningkatan Kualitas Konstruksi Nasional			18.400.000

KETENTUAN

DIPA Induk ini dibagikan lebih lanjut ke dalam DIPA Pelikan dan DIPA Pelikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Saliter.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR : DIPA-033.13-0/2019

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM



DS:1596-0000-6105-4687

Halaman : 4 dari 5

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT / INDIKATOR OUTPUT	TARGET / INDIKATOR	VOLUME / SATUAN	ALOKASI DANA
	INDIKATOR OUTPUT PROGRAM 01 Tingkat Pengendalian Kualitas Konstruksi	Persen		
2437	KEGIATAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI SASARAN KEGIATAN Peringatan Penerapan Manajemen Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Tertib Pengadaan dan Administrasi Kontrak INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 01 Persentase Keselamatan Tingkat Tertib Penyelenggaraan Konstruksi OUTPUT KEGIATAN Layanan Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi	10 Persen	4 Layanan	18.400.000
2437.001	INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN 01 Jumlah Draft MSPK Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi 02 Jumlah Profil Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi	7 Draft MSPK 3 Draft Profil		18.400.000
	OUTPUT PROGRAM 02 Output Internal Ekstern I INDIKATOR OUTPUT PROGRAM 01 Jumlah Layanan Internal Output Ekstern I	Layanan		258.598.686
2435	KEGIATAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI SASARAN KEGIATAN Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 01 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Layanan		258.598.686

KETENTUAN

DIPA Induk ini dibagikan lebih lanjut ke dalam DIPA Pelikan dan DIPA Pelikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan. Selain:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA-033.13-0/2019
I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM



051596-0000-0100-4687

Halaman : 5 dari 6

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT / INDIKATOR OUTPUT	TARGET / INDIKATOR	VOLUME / SATUAN	ALOKASI DANA
2435.950	OUTPUT KEGIATAN Layanan Dukungan Manajemen Ekstern I INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN 01 Jumlah Layanan Manajemen	1 Laporan	4 Laporan	19.319.952
2435.961	OUTPUT KEGIATAN Layanan Sarana dan Prasarana Internal INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN 01 Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Laporan	43 Laporan	83.428.517
2435.970	OUTPUT KEGIATAN Layanan Dukungan Manajemen Sadar INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN 01 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Sadar	1 Laporan	1 Laporan	58.885.073
2435.994	OUTPUT KEGIATAN Layanan Perkantoran INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN 01 Jumlah Layanan Perkantoran	1 Laporan	1 Laporan	97.503.144
04	OUTPUT PROGRAM Peningkatan SDM vokasi di bidang Konstruksi INDIKATOR OUTPUT PROGRAM 01 Jumlah SDM Vokasional Bidang Konstruksi Terampil	0 orang		32.000.000
2523	KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN VOKASIONAL SASARAN KEGIATAN Peningkatan SDM Vokasional Bidang Konstruksi Terlatih			32.000.000

KETENTUAN

DIPA Induk ini diuraikan lebih lanjut ke dalam DIPA Pelikan dan DIPA Pelikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Sadar.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA-033.13-0/2019



05.1595-0000-8105-4687

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

Halaman : 6 dari 6

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT / INDIKATOR OUTPUT	TARGET / INDIKATOR	VOLUME / SATUAN	ALOKASI DANA
2523.001	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 01 Jumlah SDM Vokasional Bidang Konstruksi Terlatih	16.000 Orang		
	OUTPUT KEGIATAN Pelatihan SDM Vokasional Bidang Konstruksi (PTK)		16.000 Orang	32.000.000
	INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN 01 Jumlah Fasilitas Pembedayaan SDM Vokasional Bidang Konstruksi	16000 Orang		

KETENTUAN

DIPA Induk ini dilampirkan lebih lanjut ke dalam DIPA Pelikan dan DIPA Pelikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan. Salinan.

Jakarta, 05 Desember 2018
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

Prof. ANITA FIRMANI
NP 198606151987032001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA-033.13-0/2019



03-1596-0000-0106-4657

II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

Halaman: 1 dari 3

A. IDENTITAS UNIT

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA :	003 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. UNIT ORGANISASI :	003.13 DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
3. PAOU :	Rp.558.180.700.000 (LIMA RATUS LIMA PULUH DELAPAN MILIAR SERATUS ENAM PULUH JUTA TUJUH RATUS RIBU RUPIAH)

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA	KP KD DK TP UB	JENIS BELANJA				PAOU/TARGET PENDAPATAN	TERCATAT
				PEGAWI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10
	003.13.00	Program Pengadaan Barang		61.904.880	422.680.290	83.073.917	0	568.190.700	0
	01	DK JAKARTA		41.021.170	350.434.278	83.163.800	0	374.678.248	0
	27000	DIREKTORAT BINA KELEMBAGAAAN DAN SUMBER DAYA JASA KONSTRUKSI	KP	3.204.158	24.841.335	0	0	30.045.493	0
	A00	RM		3.204.158	24.841.335	0	0	30.045.493	0
		Target Pendapatan						11.300.000	
	400814	DIREKTORAT KERJA SAMA DAN PEMERCEYAAN	KP	4.050.007	14.333.790	73.900	0	18.557.697	0
	A00	RM		4.050.007	14.333.790	73.900	0	18.557.697	0
	400843	BALAJASA KONSTRUKSI WILAYAH II JAKARTA	KP	1.136.090	36.370.106	88.900	0	37.675.296	0
	A00	RM		1.136.090	36.370.106	88.900	0	37.675.296	0
	670868	BALAJASA PENGAPLIKASI TEKNOLOGI KONSTRUKSI	KP	1.546.116	14.790.012	0	0	16.336.128	0
	A00	RM		1.546.116	14.790.012	0	0	16.336.128	0
	610968	DIREKTORAT BINA INVESTASI INFRASTRUKTUR	KP	4.846.342	17.201.097	100.900	0	22.248.439	0
	A00	RM		4.846.342	17.201.097	100.900	0	22.248.439	0
	610612	DIREKTORAT BINA PENYELenggaraAN JASA KONSTRUKSI	KP	6.809.790	21.085.037	100.900	0	28.095.727	0
	A00	RM		6.809.790	21.085.037	100.900	0	28.095.727	0
	600280	DIREKTORAT BINA KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI	KP	3.331.790	23.617.900	100.900	0	26.949.660	0
	A00	RM		3.331.790	23.617.900	100.900	0	26.949.660	0
	600001	SEKRETARAT DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI	KP	9.801.648	76.283.069	689.900	0	86.800.617	0
	A00	RM		9.801.648	76.283.069	689.900	0	86.800.617	0

KETENTUAN

DIPA Induk ini diuraikan lebih lanjut ke dalam DIPA Pelikan dan DIPA Pelikan disekad berikut, sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA-033.13-0/2019



DS:1558-0000-8108-4687

II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

Halaman : 3 dari 3

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN/NEGERA / LEMBAGA : 003 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. UNIT ORGANISASI : 003.13 DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
3. PAGU : Rp.588.190.700.000
(LIMA RATUS LIMA PULUH DELAPAN MILIAR SERATUS ENAM PULUH JUTA TUJUH RATUS RIBU RUPIAH)

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA	KP KD DK TP UB	JENIS BELANJA				PAGU/TARGET PENDAPATAN	TERCATAT
				PEGAWAI 51	BARANG 52	MODAL 53	BANTUAN SOSIAL 57		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10
	045000	BALAI MATERIAL DAN PERALATAN KONSTRUKSI	KP	1.451.050	21.554.040	82.000.000	0	105.405.090	0
	A00	RM		1.451.050	21.698.050	82.000.000	0	105.347.100	0
	000	PMBP		0	30.000	0	0	30.000	0
		TARGET PENDAPATAN						85.000	
	06	JAWA TIMUR		3.288.524	39.894.200	46.000	0	43.329.027	0
	01003	BALAI JAGA KONSTRUKSI WILAYAH IV SURABAYA	KP	3.288.524	39.998.200	46.000	0	43.329.027	0
	A00	RM		3.288.524	39.898.243	46.000	0	43.243.387	0
	000	PMBP		0	85.958	0	0	85.958	0
		TARGET PENDAPATAN						96.000	
	06	ACEH		1.872.497	25.849.022	27.000	0	27.549.019	0
	047073	BALAI JAGA KONSTRUKSI WILAYAH I SANDA ACEH	KP	1.872.497	25.849.022	27.000	0	27.549.019	0
	A00	RM		1.872.497	25.849.022	27.000	0	27.549.019	0
	11	SUMATERA SELATAN		1.350.734	22.895.078	71.000	0	25.517.410	0
	048028	BALAI JAGA KONSTRUKSI WILAYAH I PADJANG	KP	1.350.734	22.895.078	71.000	0	25.517.410	0
	A00	RM		1.350.734	22.895.078	71.000	0	25.517.410	0
	15	KALIMANTAN SELATAN		1.201.716	26.096.744	71.000	0	27.419.460	0
	047080	BALAI JAGA KONSTRUKSI WILAYAH V BANJUMASSIN	KP	1.201.716	26.096.744	71.000	0	27.419.460	0
	A00	RM		1.201.716	26.096.744	71.000	0	27.419.460	0
	19	SULAWESI SELATAN		1.470.217	30.135.214	124.000	0	31.730.000	0

KETENTUAN

DIPA Induk ini diuraikan lebih lanjut ke dalam DIPA Pekka dan DIPA Pelikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA-033.13-0/2019



03:1506-0000-8106-4667

II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

Halaman : 3 dari 3

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA
2. UNIT ORGANISASI
3. PAKSI

000 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
003.13 DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

Rp.558.180.700.000

(LIMA RATUS LIMA PULUH DELAPAN MILIAR SERATUS ENAM PULUH JUTA TUUH RATUS RIBU RUPIAH)

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA	RP KD DK TP UB	JENIS BELANJA				PAGU TARGET PENDAPATAN	TERCATAT
				PEGAWAI 01	BARANG 02	MODAL 03	BANTUAN SOSIAL 07		
1	2	3	4	5	6	7	8	9:5+6+7+8	10
	84794	BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH VI MAKASSAR	KP	1.470.317	38.136.214	124.852	0	31.730.083	0
	A00	RU		1.470.317	38.136.214	124.852	0	31.730.083	0
	25	PAPUA		1.640.038	36.214.603	73.115	0	27.837.403	0
	84820	BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH VI JAYAPURA	KP	1.640.038	36.214.603	73.115	0	27.837.403	0
	A00	RU		1.640.038	36.214.603	73.115	0	27.837.403	0
		TOTAL		51.964.090	422.536.290	83.075.517	0	508.180.700	0
		RU		51.964.090	422.536.290	83.075.517	0	508.180.490	0
		PNBP		0	144.250	0	0	144.250	0
		PONDAPATAW						11.516.000	

KETENTUAN

DIPA Induk ini dibagikan lebih lanjut ke dalam DIPA Pelikan dan DIPA Pelikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

Jakarta, 05 Desember 2018
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

Prof. ANITA FIRMANTI
NP 196006151567032001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA-033.13-0/2019
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS 1596-0000-5108-4687

Halaman : 1 dari 1

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. UNIT ORGANISASI : 033.13 DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
3. PAGU : Rp. 558.186.700.000
(LIMA RATUS LIMA PULUH DELAPAN MEJUR SERATUS ENAM PULUH JUTA TUJUH RATUS RIBU RUPIAH)

B. RENCANA PER PROGRAM

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN PROGRAM	PAGU	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
1	033.13.06	Program Pemukiman Kandang													
		RENCANA PENARIKAN DANA	558.186.700	7.292.567	14.251.484	21.306.536	30.085.811	31.960.211	37.094.390	58.000.647	30.522.885	65.116.462	61.113.979	70.996.062	99.482.008
2	033.13	PERKIRAAN : TARGET PENDAPATAN	11.518.000	909.834	909.834	909.834	909.834	909.834	909.834	909.834	909.834	909.834	909.834	909.834	909.834
		TOTAL RENCANA PENARIKAN DANA	558.186.700	7.292.567	14.251.484	21.306.536	30.085.811	31.960.211	37.094.390	58.000.647	30.522.885	65.116.462	61.113.979	70.996.062	99.482.008
		TOTAL PERKIRAAN : TARGET PENDAPATAN	11.518.000	909.834	909.834	909.834	909.834	909.834	909.834	909.834	909.834	909.834	909.834	909.834	909.834

Jakarta, 05 Desember 2018
s.d. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

Prof. ANITA FIRMANI
NP 196006151967032001

Pembahasan Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan Ditjen Bina Konstruksi 2020-2024



Workshop Administrasi Pelaksanaan Anggaran, Kepegawaian, Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Informasi Publik

Pembahasan Konsep Pembinaan Balai Jasa Konstruksi, Balai MPK, dan Balai PTK



*Fasilitasi Pembekalan dan Uji
Sertifikasi Kompetensi Bidang
Konstruksi Bagi Warga Binaan
Permasyarakatan (WBP) dan Petugas
Lapas Kelas IIA Solok*



*Pemantauan dan Evaluasi
Tertib Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi di Pontianak*

*Pendampingan Tugas dan
Fungsi Balai Pengadaan Jasa
Konstruksi Provinsi Papua
Barat*





PENGHARGAAN TOP 99 SISTEM INOVASI PELAYANAN PUBLIK (SINOVIK)



PERINGKAT VI TERBAIK PENILAIAN PPID KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2019 KATEGORI PELAKSANA PPID DAERAH TIPE II



APRESIASI P3DN UNTUK KATEGORI INSTANSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

Lampiran 10. Jumlah Paket Berkualitas Per Provinsi

REKAP DATA PAKET LELANG DAN PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN PBJ

BALAI	JUMLAH PAKET	PAKET SELESAI	PAKET BERKUALITAS	PERSENTASE KUALITAS
Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Aceh	181	181	181	100.00%
Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Bali	104	100	90	90.00%
Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Bangka Belitung	51	50	49	98.00%
Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Banten	93	89	89	100.00%
Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Bengkulu	86	85	85	100.00%
Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah DI Yogyakarta	111	111	111	100.00%
Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah DKI Jakarta	473	449	439	97.77%
Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Gorontalo	73	73	73	100.00%
Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jambi	147	147	146	99.32%
Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Barat	354	353	323	91.50%
Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Tengah	308	302	280	92.72%
Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Timur	307	302	288	95.36%
Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Barat	180	174	168	96.55%
Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Selatan	191	190	169	88.95%
Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Tengah	172	172	172	100.00%
Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Timur	203	201	201	100.00%
Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Utara	105	101	101	100.00%
Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan Riau	121	121	118	97.52%
Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Lampung	119	119	119	100.00%
Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Maluku	165	165	161	97.58%
Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Maluku Utara	150	150	150	100.00%
Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah NTB	130	124	123	99.19%

Lampiran 10. Jumlah Paket Berkualitas Per Provinsi

BALAI	JUMLAH PAKET	PAKET SELESAI	PAKET BERKUALITAS	PERSENTASE KUALITAS
Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah NTT	315	315	314	99.68%
Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Papua	411	407	386	94.84%
Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Papua Barat	241	239	238	99.58%
Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Riau	119	119	119	100.00%
Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Barat	97	93	93	100.00%
Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Selatan	214	214	212	99.07%
Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Tengah	165	164	164	100.00%
Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Tenggara	150	147	146	99.32%
Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Utara	164	153	153	100.00%
Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Barat	225	218	215	98.62%
Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Selatan	159	159	153	96.23%
Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Utara	254	254	239	94.09%
JUMLAH	6338	6241	6068	97.23%

Keterangan : Sampai dengan Penetapan Pemenang
sumber data : SPSE

Lampiran 12. Daftar BUJK Kualifikasi B2

NO	NAMA BADAN USAHA
1	BUNGA RAYA LESTARI
2	ASIAN ENGINEERING CONTRACTORS INDONESIA
3	ASAHI SYNCHROTECH INDONESIA
4	WIJATI AJI
5	INDO TEKNIK PEMBANGUNAN
6	FATIMAH INDAH UTAMA
7	SIGUR ROS INDONESIA
8	IMECO INTER SARANA
9	ADHI PERSADA GEDUNG
10	BANGUN CIPTA KONTRAKTOR
11	TAIYO SINAR RAYA TEKNIK
12	TAKENAKA INDONESIA
13	LEIGHTON CONTRACTORS INDONESIA
14	TARUNA PUTRA PERTIWI
15	INTI KARYA PERSADA TEKNIK
16	SMOE INDONESIA
17	INDOKOMAS BUANA PERKASA
18	NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING TBK
19	BUKAKA TEKNIK UTAMA, TBK
20	REKAYASA INDUSTRI
21	LEN RAILWAY SYSTEMS
22	TRUBA JAYA ENGINEERING
23	SAC NUSANTARA
24	BINTAI KINDENKO ENGINEERING INDONESIA
25	INDO STRAITS TBK
26	KRAKATAU ENGINEERING

NO	NAMA BADAN USAHA
27	SANTOSA ASIH JAYA
28	MINARTA DUTAHUTAMA
29	MEDAN SMART JAYA
30	SELARAS MANDIRI SEJAHTERA
31	SASMITO
32	ENVIROMATE TECHNOLOGY INTERNATIONAL
33	SURYA BAKTI GROUP
34	BINA NUSA LESTARI
35	LAMBOK ULINA
36	CANDRA ADYALAKSANA
37	WIDYA SATRIA
38	WIJAYA KARYA REKAYASA KONSTRUKSI
39	GRAMA BAZITA
40	TRIKENCANA SAKTI UTAMA
41	SULUH ARDHI ENGINEERING
42	WASKITA KARYA (PERSERO), TBK
43	KARYA REZEKI PANCA MULIA
44	RIDLATAMA BAHTERA CONSTRUCTION
45	GUNUNG BAJA KONSTRUKSI
46	ARMADA HADA GRAHA
47	KAPURINDO SENTANA BAJA
48	SEJAHTERA MULIA KENCANA
49	HIMINDO CITRA MANDIRI
50	PANCA DUTA KARYA ABADI
51	TOTAL BANGUN PERSADA Tbk
52	TEKNIKO INDONESIA

Lampiran 12. Daftar BUJK Kualifikasi B2

NO	NAMA BADAN USAHA
53	PGAS SOLUTION
54	RAKA UTAMA
55	BAHAGIA BANGUNNUSA
56	TRIPLE S INDOSEDULUR
57	ISTANA PUTRA AGUNG
58	MULTI KARYA ENGINEERING
59	BINTANG SEMBILAN INDAH
60	TANJUNG NUSA PERSADA
61	PRAMBANAN DWIPAKA
62	CAHAYA BARU PRIMA
63	WIJAYA KUSUMA CONTRACTORS
64	PERMATA ANUGERAH YALAPERSADA
65	TRIAGUNG JAYA ABADI
66	SARTONIA AGUNG
67	SIGMAGRAHA ARKANANTA
68	LANCARJAYA MANDIRI ABADI
69	PUTRA TANJUNG
70	MULTI FABRINDO GEMILANG
71	JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA, TBK
72	BANGUN BEJANA BAJA
73	WIJAYA KUSUMA EMINDO
74	KARYATAMA NAGA SARI
75	HORAS BANGUN PERSADA
76	SHIMIZU BANGUN CIPTA KONTRAKTOR
77	CHINA COMSERVICE INDONESIA
78	ANUGERAH KARYA AGRA SENTOSA

NO	NAMA BADAN USAHA
79	IDEE MURNI PRATAMA
80	TRIE MUKTY PERTAMA PUTRA
81	BUMI KARSA
82	POSCO ICT INDONESIA
83	REMAJA BANGUN KENCANA KONTRAKTOR
84	CITRA TUBINDO ENGINEERING
85	KBR INDONESIA
86	SARANA DWI MAKMUR
87	DALIMA PUTRA PERDANA
88	BERDIKARI PONDASI PERKASA
89	PETRONESIA BENIMEL
90	SENECA INDONESIA
91	TUNAS JAYA SANUR
92	JURONG ENGINEERING LESTARI
93	TRIPERKASA AMININDAH
94	KARYA BISA
95	ASHFRI PUTRALORA
96	CONBLOC INFRATECNO
97	MENARA GADING PUTIH
98	CEMERLANG SAMUDRA KONTRINDO
99	TWINK INDONESIA
100	MARKINAH
101	BANGUN PRIMA SEMESTA
102	HASTA KARYA PERDANA
103	THYSSENKRUPP INDUSTRIAL SOLUTIONS INDONESIA
104	RYANTAMA CITRAKARYA ABADI

Lampiran 12. Daftar BUJK Kualifikasi B2

NO	NAMA BADAN USAHA
105	CITRAMAS HEAVY INDUSTRIES
106	AMARTA KARYA (PERSERO)
107	KINDEN INDONESIA
108	INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI INDONESIA
109	MEGAH BANGUN BAJA SEMESTA
110	THE SECOND CONST ENG THIRD ENG BUREAU
111	LATANINDO GRAHA PERSADA
112	KOIN PRATAMA
113	CB POLAINDO
114	MODERN WIDYA TEHNICAL
115	CENTRA MULTI ELEKTRINDO
116	LEN INDUSTRI (PERSERO)
117	PUSAKA DEWA KRESNA
118	PERDASA
119	USAHA JAYAMAS BHAKTI
120	ANDESMONT SAKTI
121	KARMA MANGGALA YUDHA
122	BOSKALIS INTERNATIONAL INDONESIA
123	MULTIBRATA ANUGERAH UTAMA
124	LINCE ROMAULI RAYA
125	KARYA INTERTEK KENCANA
126	MULTI STRUCTURE
127	ISTAKA KARYA (PERSERO)
128	ELJINDO KONSTRUKSI ABADI
129	MARGA DWITAGUNA
130	BERLIAN AMAL PERKASA

NO	NAMA BADAN USAHA
131	AZBIL BERCA INDONESIA
132	TING TAI KONSTRUKSI INDONESIA
133	CG POWER SYSTEMS INDONESIA
134	WASKITA JAYA PURNAMA
135	ABB SAKTI INDUSTRI
136	MANDA PUTRA NUSANTARA
137	ELEKTRINDO PERKASA UTAMA
138	INDONESIA PONDASI RAYA TBK
139	GIRDER INDONESIA
140	REKAKARYA GEOTEKNIK
141	ONASIS INDONESIA
142	CITICON ADHI NUGRAHA
143	ISTANA KARANG LAUT
144	HAI YIN
145	VSL JAYA INDONESIA
146	META EPSI
147	VADHANA INTERNATIONAL
148	TIRTA DHEA ADDONNICS PRATAMA
149	DAYA MULIA TURANGGA
150	WASKITA BETON PRECAST TBK
151	ADHI PERSADA BETON
152	ARTAWA INDONESIA
153	MULTIBANGUN ADHITAMA KONSTRUKSI
154	TIMAS SUPLINDO
155	MAHIR JAYA MAHAKAM RAYA
156	SUMBER MITRA JAYA

Lampiran 12. Daftar BUJK Kualifikasi B2

NO	NAMA BADAN USAHA
157	HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR
158	WAHANAKARSA SWANDIRI
159	KARANGMAS UNGGUL
160	SYARIF MAJU KARYA
161	PILAR DASAR MEMBANGUN
162	NUSA RAYA CIPTA, TBK
163	WARTSILA INDONESIA
164	ENVITECH PERKASA
165	KEMBAR ABADI PRIMA
166	MEMIONTEC INDONESIA
167	AGRABUDI KARYAMARGA
168	DUTA MARINE
169	ABADI PRIMA INTI KARYA
170	DHARMA PERDANA MUDA
171	INDONAKANO
172	ACSET INDONUSA TBK
173	PAULA JAYA
174	SOLOBHAKTI TRADING & CONTRACTOR
175	BASWARA SINARMULIA
176	HUAWEI TECH INVESTMENT
177	BANGUN KARYA PERKASA JAYA
178	SWI JETTY NUSANTARA
179	PERKASA ADIGUNA SEMBADA
180	HAKA UTAMA
181	BUMI IRIAN PERKASA
182	SHANTY WIRAPERKASA

NO	NAMA BADAN USAHA
183	BERSAMA PAPUA UNGGUL
184	APECO KENCANA
185	PENATA KARYA KELUARGA UTAMA
186	WELTES ENERGI NUSANTARA
187	BUMI RIAU INDAH JAYA
188	PERDANA BUMI SYARIHARTI
189	INDOPORLEN SAKTI
190	PROMATCON TEPATGUNA
191	HILLCONJAYA SAKTI
192	JAGAT BAJA PRIMA UTAMA
193	MCCONNELL DOWELL INDONESIA
194	MITSUBISHI JAYA ELEVATOR AND ESCALATOR
195	RUDHIO DWIPUTRA
196	SUPRACO INDONESIA
197	SANKYU INDONESIA INTERNATIONAL
198	CHINA RAILWAY ENGINEERING INDONESIA
199	TORISHIMA GUNA ENGINEERING
200	JASAMARGA TOLLROAD MAINTENANCE
201	ACE ENGINEERING & CONSTRUCTION
202	HAMANROKO
203	CITRAMASJAYA TEKNIKMANDIRI
204	ADIPROTEK ENVIRODUNIA
205	SEIRAMA LAJU
206	BANGUN SARANA BAJA
207	ARTA NIAGA NUSANTARA
208	RUDY JAYA

Lampiran 12. Daftar BUJK Kualifikasi B2

NO	NAMA BADAN USAHA
209	GEMUNTUR AGUNG
210	SENTRA MULTIKARYA INFRASTRUKTUR
211	COGINDO DAYABERSAMA
212	INDO PUSAT BUMI
213	INFRATECH INDONESIA
214	HAFAR DAYA KONSTRUKSI
215	SSANGYONG KONSTRUKSI INDONESIA
216	OFFSHORE SERVICES INDONESIA
217	BAHANA CIPTA INTERNUSA
218	DAKA MEGAPERKASA
219	VITA SAMUDERA
220	SUMBERSARI CIPTAMARGA
221	FAHREZA DUTA PERKASA
222	SUAR ALAM ENGINEERING
223	TOKYU CONSTRUCTION INDONESIA
224	ETEC INDONESIA
225	DELTA BATARAJAYA JASA KONSTRUKSI
226	SIEMENS INDONESIA
227	KORINDO KONSTRUKSI
228	CIPTA NASYA PUTRASINDO
229	TELAGA MEGABUANA
230	MUTU UTAMA KONSTRUKSI
231	BASUKI RAHMANTA PUTRA
232	PETRA KONSTRUKSI ABADI
233	BLACKSTEEL PROPERTIES
234	VICTORY UTAMA KARYA

NO	NAMA BADAN USAHA
235	SCHNEIDER INDONESIA
236	BAUING CONSTRUCTION GROUP INDONESIA
237	JFE ENGINEERING INDONESIA
238	RAJAWALI CITRA TEKNIK
239	IOT EPC INDONESIA
240	MUTIARA INDAH ANUGRAH
241	SARIJATI ADHITAMA
242	KZAKON INDONESIA
243	SUMI GITA JAYA
244	POWERTECH INDONESIA
245	TRIFA ABADI
246	ANEKA JARINGAN INDONESIA
247	MITRA GUSNITA NANDA
248	HUTOMO MANDALA PERKASA
249	D & C ENGINEERING COMPANY
250	LIMA TUJUH TUJUH
251	SUBURO JAYANA INDAH COR
252	WARINGIN MEGAH
253	PATAMA ADIJAYA STEEL
254	INDRABAS PURNAMA MAKMUR
255	HEIN GLOBAL UTAMA
256	WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG TBK
257	PAL INDONESIA (PERSERO)
258	PENTA OCEAN CONSTRUCTION
259	HYPEC INTERNATIONAL
260	BERKAT KARUNIA PHALA

Lampiran 12. Daftar BUJK Kualifikasi B2

NO	NAMA BADAN USAHA
261	ALAM DUNIA ENGINEERING AND CONSTRUCTION
262	DUTA KARSACIPTA BUANA
263	THE SIXTH CHEMICAL ENGINEERING CONSTRUCTION
264	JAGAT KONSTRUKSI ABDIPERSADA
265	HAECHANG DEVELOPMENT INDONESIA
266	BERLIAN BANGUN CIPTA
267	SWING INDONESIA
268	JEMBATAN MAS ENGINEERING
269	RIFANSI DWI PUTRA
270	BOMA BISMA INDRA
271	YOKOGAWA INDONESIA
272	SMCC UTAMA INDONESIA
273	FABS INDONESIA
274	INSEMA SUNLY ENGINEERING
275	BAUER PRATAMA INDONESIA
276	TAKISHA INDONESIA ENGINEERING
277	MUTIARA INDAH CONSTRUCTION
278	AGUNG MULIA IRIANA
279	JATIWANGI
280	LINTECH DUTA PRATAMA
281	NAN YANG TECHNOLOGY INDONESIA
282	WIDYA SAPTA CONTRACTOR
283	MCC17 KONSTRUKSI INDONESIA
284	VAN OORD INDONESIA
285	WISMA SARANA TEKNIK
286	HANS JAYA UTAMA

NO	NAMA BADAN USAHA
287	FUJITEC INDONESIA
288	HASRAT TATA JAYA
289	WAAGNER BIRO INDONESIA
290	GEOTEKINDO
291	BETA PRAMESTI ASIA
292	ASET PRIMA TAMA
293	FUJI FURUKAWA E&C INDONESIA
294	ELNUSA TBK
295	CIPTA UTAMA
296	BUMI SENTOSA DWI AGUNG
297	JAYA OBAYASHI
298	WIJAYA KARYA INDUSTRI & KONSTRUKSI
299	HAZAMA ANDO MURINDA
300	CHINA ELEVENTH CHEMICAL CONSTRUCTION
301	KAEFER
302	MODERNA TEHNIK PERKASA
303	EPITERMA MAS INDONESIA
304	BERCA BUANA SAKTI
305	ISKABA PRATAMA
306	MARINDA UTAMAKARYA SUBUR
307	NITTOC CONSTRUCTION INDONESIA
308	KAJIMA INDONESIA
309	CG INTERNATIONAL CONSTRUCTION
310	PETROSEA TBK
311	BAKRIE METAL INDUSTRIES
312	WOJIN CONSTRUCTION INDONESIA

Lampiran 12. Daftar BUJK Kualifikasi B2

NO	NAMA BADAN USAHA
313	INDOTEL GRAHA PRATAMA
314	DAIFUKU INDONESIA
315	TEKNIKO E & C
316	NERIN INTERNATIONAL INDONESIA
317	INDONESIA RIVER ENGINEERING
318	GLOBAL JAYA MARITIMINDO
319	BAGUS KARYA
320	KELSRI
321	TAIHEI DENGYO INDONESIA
322	SINOTEK NANO INDONESIA
323	DINAMIKARAYA CIPTASELARAS
324	ANUGERAH KONSTRUKSI INDONESIA
325	ZHEJIANG TENAGA PEMBANGUNAN INDONESIA
326	MURINDA IRON STEEL
327	TOYO HITEC INDONESIA
328	HSING LOONG INDONESIA
329	ADVANCED OFFSHORE SERVICES
330	PELANGI ENGINEERING INDONESIA
331	CAZ KONSTRUKSI
332	INDO CHANGHAI KONSTRUKSI
333	HAN JIN KONSTRUKSI INDONESIA
334	MAKMUR JAYA BERKAT KONTRAKTOR
335	MAJUMAPAN BANGUNINDO
336	HUALONG NUSANTARA
337	KPM OIL & GAS
338	ACER KREASI PRATAMA

NO	NAMA BADAN USAHA
339	CITRA PRASASTI KONSORINDO
340	PULAU MAS PERKASA
341	SUMBER BIMA PRIMA
342	DONGHWA ELECTRIC ENGINEERING
343	INDONESIA WENJING ARCHITECTURE AND ENGINEERING
344	PILAR REKAYASA MANDIRI
345	BINTANG LIMA KONSTRUKSI
346	SHANGHAI THIRD HARBOR BENTENG CONSTRUCTION AND ENG
347	TEKNIK UMUM SANKO ENG.
348	CHINA RAILWAY SEVENTEENTH BUREAU GROUP INDONESIA
349	RUBY CITY CONSTRUCTION
350	MONTIS ENERGY
351	TIRTOBUMI ADYATUNGGAL
352	POESER INDONESIA
353	BECHTEL INDONESIA
354	CHINA CONSTRUCTION YANGTZE RIVER INDONESIA
355	LIAONING ANKUANG CONSTRUCTION INDONESIA
356	MEGA SEMPURNA HANDAL KONSTRUKSI
357	JAYA HANCHANG E&C
358	XD SAKTI INDONESIA
359	THE FAR EAST
360	NUSA SINARINDO KONSTRUKSI
361	PRATIWI PUTRI SULUNG
362	KASHIWABARA ENGINEERING INDONESIA
363	KITANIHON MURINDA INDONESIA
364	TAISEI PULAUINTAN CONSTRUCTION INTERNATIONAL

Lampiran 12. Daftar BUJK Kualifikasi B2

NO	NAMA BADAN USAHA
365	TRI DAYA ENERGI
366	HAMON INDONESIA
367	JINCHUAN CONSTRUCTION INDONESIA
368	SUEZ WATER TREATMENT INDONESIA
369	TELAGA GELANG INDONESIA
370	KARYA BERSINAR INDONESIA
371	CHOSUK DEVELOPMENT INDONESIA
372	CHINA STATE CONSTRUCTION OVERSEAS DEVELOPMENT SHAN
373	DREDGING INTERNATIONAL INDONESIA
374	MEGA NAGA INDO ENGINEERING GROUP
375	ANHE HYDRO ENGINEERING
376	KARYA BANGUN MANDIRI PERSADA
377	ENERGY CHINA TIANJIN INDONESIA
378	CIMENDANG SAKTI KONTRAKINDO
379	SEJIN CIPTA BANGUN
380	YAOWEI CONSTRUCTION GROUP INTERNATIONAL
381	POSCO E&C INDONESIA
382	GCI INDONESIA
383	GURMYONG INDONESIA
384	RAJAWALI SWIBER CAKRAWALA
385	SANGKAN JAYA
386	DAEKYUNG INDAH HEAVY INDUSTRY
387	MH POWER SYSTEMS INDONESIA
388	EQUITORIA OFFSHORE BERJAYA
389	SULZER INDONESIA
390	UNISON KARYATAMA

NO	NAMA BADAN USAHA
391	HARAPAN UTAMA PRIMA
392	WUHAN SOUTHERN GEO ENGINEERING INDONESIA
393	PORT ENGINEERING CSCEC INDONESIA
394	DAEAH E & C INDONESIA
395	COOEC INDONESIA
396	GUNAKARYA NUSANTARA
397	IND DONG YANG
398	DELIMA AGUNG UTAMA
399	FLUIDIC INDONESIA
400	VPOWER OPERATION SERVICES
401	IDROS SERVICES
402	KIS GREEN TECHNOLOGY PROJECTS
403	GOLTENS JAKARTA
404	VANTAGE INFRASTRUCTURE INDONESIA
405	HEBEI JIANKAN INDONESIA
406	DOOSAN HEAVY INDUSTRIES INDONESIA
407	AUDEX INDONESIA
408	MMC METAL FABRICATION
409	WIJAYA KARYA KOMPONEN BETON
410	CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION ENGINEERING INDO
411	SALVATOR MARITIME INDONESIA
412	NEXT NIPPON TECHNOLOGY
413	JGC INDONESIA
414	SATYAMITRA SURYA PERKASA
415	TECHNIP INDONESIA
416	SAIPEM INDONESIA

Lampiran 12. Daftar BUJK Kualifikasi B2

NO	NAMA BADAN USAHA
417	CITRA PANJI MANUNGGAL
418	CHINA HARBOUR INDONESIA
419	INDO SANSHENG C/R
420	CHINA ROAD AND BRIDGE CONSTRUCTION INDONESIA
421	HANKOOK ENGINEERING INDO RAYA
422	HAEU CONSTRUCTION INDONESIA
423	ADHI KARYA (PERSERO) TBK
424	BAKRIE CONSTRUCTION
425	BAM DECORIENT INDONESIA
426	CHIYODA INTERNATIONAL INDONESIA
427	ENCONA INTI INDUSTRI
428	GUNANUSA UTAMA FABRICATORS
429	HUTAMA KARYA (PERSERO)
430	KALIRAYA SARI
431	MCDERMOTT INDONESIA
432	MEINDO ELANG INDAH
433	ADIQUATRO ELEKTRIKINDO PERKASA
434	YASA PATRIA PERKASA
435	PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO)TBK
436	BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
437	TRIPATRA ENGINEERS AND CONSTRUCTORS
438	RAGA PERKASA EKAGUNA
439	JAYA TEKNIK INDONESIA
440	NINDYA KARYA (PERSERO)
441	TOTALINDO EKA PERSADA, TBK
442	PP URBAN

NO	NAMA BADAN USAHA
443	WIJAYA KARYA (PERSERO), TBK
444	SWADAYA GRAHA
445	PAESA PASINDO ENGINEERING
446	BARATA INDONESIA (PERSERO)
447	ANEKA KARYA KONSTRUKSI
448	AVIP INTERIORS
449	BIMA GOLDEN POWERINDO
450	BMH TECHNOLOGIES
451	BUANA JASA TEHNIKINDO
452	CHINA DRAZ ENGINEERING INDONESIA
453	CHINA RAILWAY NINETEEN BUREAU
454	DAIWA TETRA MANUNGGAL KONSTRUKSI
455	DINAMIKA DAYA UTAMA
456	EPC-M FABRICATORS PERKASA
457	GEOCEAN INDONESIA
458	GLOBAL INDUSTRIES ASIA PASIFIC
459	GLOBAL LINK PONDASI
460	HIDAYAH TEKNIK INDOMAS
461	IADECCO
462	INDO SARANA ABADI
463	INDOKOR
464	INDOTURBINE
465	INTI KARYA INDONESIA
466	ITO TAKA CONSTRUCTION
467	JOONGSAN INDONESIA
468	KARABHA GRYAMANDIRI

Lampiran 12. Daftar BUJK Kualifikasi B2

NO	NAMA BADAN USAHA
469	MCC20 INDONESIA CONSTRUCTION
470	MERLASAKTI ABADI
471	PIEE INTERNASIONAL
472	PIPIT BUANA
473	PLANT SAMYOUNG INDONESIA
474	PRASADHA PAMUNAH LIMBAH INDUSTRI
475	SABARITHA PERKASA ABADI
476	SANDIN ENGINEERING
477	SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEMS INDONESIA
478	SEO HEUNG JAYA INDONESIA
479	SEPULUH SUMBER ANUGERAH
480	SHAFTINDO ENERGI
481	SINOCONST CONSTRUCTION INDONESIA
482	SUMBER TEKNIK KONSTRUKSI
483	SUNRAY GLOBAL
484	SURYA PRIMA ABADI
485	TAKASAGO THERMAL ENGINEERING
486	TAKENAKADOBOKU INDONESIA
487	TEKNIK UMUM
488	TERAS TEKNIK PERDANA
489	TERAS TEKNIK SEJAHTERA
490	TOBA JAYA SENTOSA
491	TOKO ENGINEERING INDONESIA
492	TOYO KANETSU INDONESIA
493	TRILOGI SURYAWISESA
494	YALA PERSADA ANGKASA

NO	NAMA BADAN USAHA
495	ANEKA JASA GRHADIKA
496	BUDI BAKTI PRIMA

Lampiran 13. Kapasitas Produksi Beton Pracetak

A. KAPASITAS PRODUKSI ANGGOTA ASOSIASI PRODUSEN PRACETAK DAN PRATEGANG INDONESIA

No.	ANGGOTA AP3I	KAPASITAS PRODUKSI	
		TON/TAHUN 2019	JUMLAH PABRIK
1	PT Waskita Beton Precast Tbk.	6,959,285	13
2	PT Wijaya Karya Beton Tbk.	7,100,000	10
3	PT Jaya Beton Indonesia	3,727,577	4
4	PT Adhimix Precast Indonesia	3,445,889	5
5	PT Saeti Concretindo Wahana	2,794,179	4
6	PT PP Pracetak	2,705,412	6
7	PT Adhi Persada Beton	1,707,844	5
8	PT Beton Prima Indonesia	1,045,800	2
9	PT Pacific Prestress Indonesia	1,000,000	1
10	PT Varia Usaha Beton	980,304	4
11	PT Kunango Jantan	802,226	2
12	PT Duta Sarana Perkasa	668,000	1
13	PT Brantas Abipraya	638,675	4
14	PT Beton Elemenindo Perkasa	630,885	2
15	PT Dantosan Precon Perkasa	638,814	2
16	PT Rekagunatek Persada	485,856	2
17	PT HAKAASTON	324,728	6
18	PT Griyaton Indonesia	250,000	1
19	PT Komponindo Beton Jaya	247,000	1
20	PT Girder Indonesia	114,325	2
21	PT Nindya Beton	93,000	1
22	PT Wijaya Karya Komponen Beton	90,000	1
23	PT Bonna Indonesia	75,136	1
24	PT Bina Sarana Dirgantara	50,000	1
25	PT Satriacipta Astakencana	47,803	1
26	PT VSL Indonesia	5,571	1
TOTAL		36,628,309	83

B. PRODUK RUMAH RISHA

No.	ANGGOTA AP3I	KAPASITAS PRODUKSI	
		TON/TAHUN 2019	JUMLAH PABRIK
1	PT Wijaya Karya Beton Tbk.	65,500	1
2	PT Waskita Beton Precast Tbk.	87,500	1
3	PT PP Urban	40,938	1
4	PT Adhi Persada Beton	32,813	1
5	PT Nindya Beton	41,250	1
6	PT Brantas Abipraya	15,688	1

Lampiran 13. Kapasitas Produksi Beton Pracetak

No.	ANGGOTA AP3I	KAPASITAS PRODUKSI	
		TON/TAHUN 2019	JUMLAH PABRIK
7	PT Adhimix Precast Indonesia	40,000	1
8	PT Hakaaston	26,438	1
9	PT Saeti Concretindon Wahana	15,688	1
10	PT Beton Prima Indonesia	15,688	1
11	PT Varia Usaha Beton	81,250	1
TOTAL		462,753	11

C. PRODUK FASAD GEDUNG

No.	ANGGOTA AP3I	KAPASITAS PRODUKSI	
		TON/TAHUN 2019	JUMLAH PABRIK
1	PT Waskita Beton Precast Tbk.	375,000	1
2	PT Wijaya Karya Beton Tbk.	375,000	1
3	PT PP Urban	375,000	1
4	PT Adhi Persada Beton	375,000	1
5	PT Brantas Abipraya	375,000	1
TOTAL		1,875,000	5

D. TAMBAHAN DATA PRODUKSI

NO	ANGGOTA AP3I	KAPASITAS PRODUKSI (TON/TAHUN)
1	Ditjen Penyediaan Perumahan	
	a. Rumah Susun Pasar Jumat 28000 m2	28,000
	b. Rumah Susun Paspampres 15000 m2	13,125
	c. Rusun Regular	50,000
2	Modern Panel	76,050
3	Perumnas 3000 Unit	90,000
4	BNPB 4831 Unit	145,830
5	Facade Pengembang Swasta 75000 unit (est)	1,912,500
TOTAL		2,315,505